

**KAJIAN
EKONOMI REGIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Triwulan I - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Mataram**

Penerbit :

BANK INDONESIA MATARAM

Bidang Ekonomi, Moneter dan Perbankan

Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter

Jl. Pejanggik No.2 Mataram

Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600 ext. 111

Fax : 0370-631793

E-mail : b_widihartanto@bi.go.id

thommy@bi.go.id

trinil@bi.go.id



MISI DAN VISI BANK INDONESIA

Visi Bank Indonesia :

“Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

Misi Bank Indonesia :

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan”

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia :

“Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan”

Visi Kantor Bank Indonesia Mataram :

“Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai economic intelligence dan unit penelitian”

Misi Kantor Bank Indonesia Mataram :

“Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait”

KATA PENGANTAR

Perekonomian Nusa Tenggara Barat di awal tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 3,89%, terutama didorong pertumbuhan dari sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 1,25% yang berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekspor regional. Sementara itu, laju inflasi Kota Mataram mulai menunjukkan trend penurunan. Secara kumulatif (y-t-d) inflasi pada triwulan I 2006 tercatat sebesar 1,63%, bahkan telah terjadi deflasi sebesar -1,30% secara bulanan pada bulan Maret 2006. Namun secara tahunan, inflasi mencapai angka sebesar 15,92% atau sedikit lebih tinggi diatas angka inflasi nasional sebesar 15,74%.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi turut berpengaruh pula terhadap kinerja perbankan regional, terlihat dari meningkatnya total asset, dana pihak ketiga dan bahkan kredit yang mencapai angka 6,85%, meskipun disisi lain, ada kecenderungan sedikit peningkatan rasio kredit bermasalah.

Disamping ulasan di atas, buku ini juga mengupas perkembangan makro ekonomi regional, perkembangan inflasi, perkembangan perbankan dan sistem pembayaran, perkembangan keuangan dan investasi serta prospek ekonomi ke depannya yang dapat menjadikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia maupun *stakeholders* di daerah.

Bank Indonesia sangat *concern* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penelitian dan kajian yang dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan determinan inflasi barang dan jasa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya kepada semua pihak terutama jajaran Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun Kota, dinas/instansi terkait, perbankan, akademisi dan pihak lainnya yang telah membantu penyusunan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat bagi kita semua dalam berkarya.

Mataram, Mei 2006

BANK INDONESIA MATARAM

I Made Sudja

Pemimpin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR GRAFIK & LAMPIRAN	vii	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix	
BAB I	Perkembangan Ekonomi Makro Regional	1
	1.1 Ringkasan Umum Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB	1
	1.2 PDRB menurut Penggunaan/sisi pengeluaran	4
	1.2.1 Gambaran Umum	4
	1.2.2 Pengeluaran Konsumsi	5
	1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	7
	1.2.4 Pertumbuhan Net Ekspor (Ekspor – Impor) Regional & Internasional	8
	1.2.5 Kinerja Ekspor - Impor Luar Negeri Propinsi NTB	10
	1.3 PDRB menurut sisi sektoral (penawaran)	13
	1.3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB	13
	1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB ditinjau Secara Tahunan (y-o-y)	14
	1.3.3 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha	15
	1.3.3.1 Kondisi Dunia Usaha	15
	1.3.3.2 Penggunaan Tenaga Kerja	16
	1.3.4 Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral	16
	1.3.4.1 Sektor Pertanian	16
	1.3.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian	19
	1.3.4.3 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	20
	1.3.4.4 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	21
	1.3.4.5 Sektor Bangunan	22
	1.3.4.6 Sektor Lainnya	23
	1.4 Tenaga Kerja ke Luar Negeri	24

BAB II	Evaluasi Perkembangan Inflasi Propinsi Nusa Tenggara Barat	27
	2.1 Gambaran Umum Inflasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat	27
	2.2 Inflasi Inti, Inflasi <i>Volatile Food</i> , Inflasi <i>Administered Price</i>	28
	2.3 Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram	29
	2.3.1 Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram Triwulan I-2006	29
	2.3.2 Trend Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram	30
	2.4 Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Mataram	32
	2.5 Komoditi Penyumbang Inflasi dan Deflasi Terbesar	34
	2.6 Perbandingan Inflasi Kota Mataram dengan Kota Terdekat	35
BAB III	Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran	36
	3.1 Kinerja Perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat	36
	3.2 Bank Umum	37
	3.2.1 Kelembagaan	37
	3.2.2 Asset	38
	3.2.3 Dana Pihak Ketiga	38
	3.2.4 Kredit	40
	3.2.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)	44
	3.2.6 Profitabilitas & Efisiensi Bank Umum	45
	3.3 Bank Umum Syariah	45
	3.4 Perkembangan BPR	46
	3.4.1 Kelembagaan	47
	3.4.2 Asset	47
	3.4.3 Dana Pihak Ketiga	47
	3.4.4 Perkembangan Kredit yang diberikan	48
	3.4.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)	49
	3.4.6 Profitabilitas & Efisiensi BPR	50
	3.5 Perkembangan Sistem Pembayaran	50
	3.5.1 Transaksi Keuangan Secara Tunai	51
	3.5.1.1 Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)	51
	3.5.1.2 Uang Palsu	52
	3.5.2 Transaksi Keuangan Secara Non Tunai	53
	3.5.2.1 Transaksi RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>)	53
	3.5.2.2 Transaksi Kliring	53

BAB IV	Perkembangan Keuangan Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat	54
BAB V	Perkembangan Investasi di Nusa Tenggara Barat	59
BAB VI	Prospek Perekonomian dan Inflasi Regional	64
	5.1 Prospek Makro Ekonomi Regional (<i>Economic Outlook</i>)	64
	5.2 Prospek Inflasi	66
	5.3 Isu-isu Strategis dan Rekomendasi	67
BOKS 1	Tanaman Jarak: Sumber Energi Alternatif dan Pemanfaatan Lahan Marginal di NTB	26-a
BOKS 2	Trend Peningkatan <i>Undisbursed Loan</i> di Triwulan II 2006	37-a
BOKS 3	Survei Opini Pimpinan/Pejabat Bank Umum Triwulan II 2006 Terhadap Pemberian Kredit	40-a
BOKS 4	Potensi <i>Linkage Program</i> Menggerakkan Roda Perekonomian Propinsi NTB di Triwulan Mendatang	48-a

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan (Sisi Pengeluaran)	4
Tabel 1.2. Realisasi Ekspor Propinsi NTB	11
Tabel 1.3. Negara Tujuan Ekspor Terbesar dan Pelabuhan Muat Ekspor NTB	12
Tabel 1.4. Realisasi Impor Propinsi NTB	12
Tabel 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Propinsi NTB	13
Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)	14
Tabel 1.7. Nilai Balance Score Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha	15
Tabel 2.1. Inflasi Triwulanan (q-t-q) Triwulan I-2006 & Triwulan II-2006	30
Tabel 2.2. Inflasi Triwulanan (y-o-y) Triwulan I-2006 & Triwulan II-2006	33
Tabel 2.3. Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan I-2006	34
Tabel 2.4. Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan I-2006	35
Tabel 2.5. Perbandingan Inflasi Kota Mataram dengan Kota Terdekat Triwulan I-2006	35
Tabel 3.1. Indikator Utama Perbankan NTB	37
Tabel 3.2. Komposisi Golongan Pemilik Dana	39
Tabel 3.3. Komposisi Penghimpunan dan Sebaran Dana Pihak Ketiga	40
Tabel 3.4. Perkembangan Jumlah Rekening DPK Bank Umum	40
Tabel 3.5. Penyaluran Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Bank Umum	43
Tabel 3.6. Rasio LDR Bank Umum Per Maret 2006	44
Tabel 3.7. Indikator Utama Bank Umum Syariah di NTB	46
Tabel 3.8. Indikator Utama BPR di NTB	46
Tabel 3.9. Perkembangan Kredit dan NPL BPR di NTB	48
Tabel 3.10. Perkembangan aliran uang di KBI Mataram	51
Tabel 3.11. Uang palsu yang ditemukan di Kantor Bank Indonesia Mataram	52
Tabel 3.12. Transaksi RTGS di Kantor Bank Indonesia Mataram	53

Tabel 3.13.	Data perputaran Kliring di KBI Mataram	53
Tabel 4.1.	APBD 2006 Propinsi NTB, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima	54
Tabel 4.2.	Pertumbuhan APBD 2006 Propinsi, Kota Mataram, Kab. Dompu dan Kota Bima	55
Tabel 4.3.	Dana Alokasi Umum (DAU) 2006 di Nusa Tenggara Barat	56
Tabel 4.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) 2006 di Nusa Tenggara Barat	56
Tabel 4.5.	Realisasi APBD 2006 Hingga Triwulan II 2006 Propinsi NTB, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Dompu	57
Tabel 4.6.	Perkiraan Realisasi APBD 2006 (Propinsi, Kota Mataram & Kabupaten Sumbawa Barat)	58
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN di NTB (s.d Desember 2004)	59
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN di NTB (s.d Desember 2005)	60

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1. PDRB & Pertumbuhan Ekonomi NTB	1
Grafik 1.2. Distribusi PDRB Sektoral ADH Konstan Th.2000	2
Grafik 1.3. Distribusi PDRB NTB ADH Konstan Th.2000 Menurut Penggunaan	3
Grafik 1.4. Pertumbuhan Sisi Konsumsi PDRB NTB Triwulanan (y-o-y)	5
Grafik 1.5. Indeks Hasil Survei Konsumen Kota Mataram	6
Grafik 1.6. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7
Grafik 1.7. Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	8
Grafik 1.8. Pertumbuhan Ekspor Impor NTB	9
Grafik 1.9. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pertanian	16
Grafik 1.10. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Pengecilian	19
Grafik 1.11. PDRB & Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	20
Grafik 1.12. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	21
Grafik 1.13. PDRB & Pertumbuhan Sektor Bangunan	22
Grafik 1.14. Negara Penampung TKI NTB Terbanyak - Triwulan I-2006	24
Grafik 1.15. TKI NTB Berdasarkan Sektor dan Jenis Kelamin - Triwulan I-2006	25
Grafik 1.16. Daerah Asal TKI NTB - Triwulan I-2006	25
Grafik 1.17. Latar Belakang Pendidikan TKI NTB	26
Grafik 2.1. Inflasi Kota Mataram	27
Grafik 2.2. Pergerakan Inflasi Umum, Inflasi Inti, <i>Administered Price & Volatile Food</i> Kota Mataram	28
Grafik 2.3. Inflasi (q-t-q) Kota Mataram Per Komoditi (1)	31
Grafik 2.4. Inflasi (q-t-q) Kota Mataram Per Komoditi (2)	31
Grafik 3.1. Perkembangan DPK Bank Umum	38
Grafik 3.2. Perkembangan Golongan Pemilik DPK Bank Umum	39
Grafik 3.3. Perkembangan Kredit di NTB	40

Grafik 3.4.	Perkembangan Outstanding Kredit Menurut Jenis Penggunaan	41
Grafik 3.5.	Pertumbuhan Kredit Menurut Jenis Penggunaan	41
Grafik 3.6.	Perkembangan Outstanding Kredit Sektoral	41
Grafik 3.7.	Pertumbuhan Kredit Sektoral	41
Grafik 3.8.	Komposisi Golongan Debitur Bank Umum Per Maret 2006	42
Grafik 3.9.	Sebaran Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	42
Grafik 3.10.	Pertumbuhan Sebaran Kredit Bank Umum	42
Grafik 3.11.	Perkembangan NPL Bank Umum	42
Grafik 3.12.	Perkembangan Kredit UKM yang disalurkan Bank Umum	44
Grafik 3.13.	Perkembangan LDR Bank Umum	44
Grafik 3.14.	Perkembangan Profitabilitas Bank Umum	45
Grafik 3.15.	Perkembangan Bank Umum Syariah di NTB	46
Grafik 3.16.	Perkembangan Aset BPR Per Wilayah	47
Grafik 3.17.	Perkembangan DPK BPR di NTB	48
Grafik 3.18.	Peningkatan DPK BPR Per Wilayah	48
Grafik 3.19.	Perkembangan Kredit BPR Swasta	48
Grafik 3.20.	Perkembangan Kredit BPR Pemda	49
Grafik 3.21.	Perkembangan NPL Kredit BPR Pemda	49
Grafik 3.22.	Perkembangan NPL Kredit BPR Swasta	49
Grafik 3.23.	Perkembangan LDR BPR di NTB	50
Grafik 3.24.	Perkembangan Profitabilitas & Efisiensi BPR di NTB	50
Grafik 3.25.	Perkembangan Temuan Uang Palsu	52

LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Indikator Ekonomi dan Moneter Propinsi NTB	70
--------------	--	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi, Inflasi dan Perbankan di Nusa Tenggara Barat

Perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Barat pada triwulan I 2006 **mengalami pertumbuhan sebesar 3,89%** walaupun pertumbuhannya tidak sebesar triwulan sebelumnya yang mencapai 4,29% (y-o-y). Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi yaitu sektor Jasa-Jasa; Pertanian; Pengangkutan; Industri Pengolahan serta sektor pertambangan & penggalian. Sedangkan dari sisi penggunaan disebabkan menurunnya pengeluaran konsumsi swasta, rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut karena pada triwulan I 2006 ini terjadi kontraksi sebesar -9,24%, sedangkan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya (q-t-q) adalah sebesar -9,09%. Pada triwulan ini sebagian besar (7 dari 9) sektor ekonomi mengalami penurunan, terutama sektor Industri Pengolahan, Perdagangan serta Hotel & Restoran, sedangkan dari sisi penggunaan terutama adanya penurunan konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Terjadinya kontraksi pada periode tersebut merupakan karakteristik perekonomian NTB yang cenderung terjadi pada setiap akhir tahun sampai dengan awal tahun berikutnya, terutama pada sektor Pertanian yang dipengaruhi faktor musim, dan sektor Pertambangan & Penggalian karena menurunnya permintaan konsentrat tembaga dari luar negeri.

Kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi tahunan (y-o-y) secara sektoral masih diberikan oleh sektor Pertambangan & Penggalian dengan sumbangan sebesar 1,25%, disusul sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dengan kontribusi sebesar 0,71%, sedangkan pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Bangunan dan sektor Pengangkutan & Komunikasi masing-masing sebesar 8,64% dan 6,27%. Sementara itu dari sisi Penggunaan/Pengeluaran PDRB, walaupun perubahan stok pada triwulan ini mengalami penurunan hingga 97,55%, namun ekspor, terutama ekspor konsentrat tembaga yang memiliki peranan dominan dalam perekonomian NTB, mengalami kenaikan sebesar 36,14%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (15,02%), sehingga angka pertumbuhan ekonomi masih positif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 6,46% karena meningkatnya daya beli masyarakat didorong oleh kenaikan gaji PNS dan TNI serta masih berlangsungnya pencairan kompensasi subsidi BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Sementara itu, laju inflasi kota Mataram pada triwulan ini menunjukkan penurunan dibandingkan posisi akhir tahun 2005, baik secara kumulatif (Januari s.d Maret) yang hanya sebesar 1,63% (menyentuh titik terendah dalam 2 tahun terakhir) maupun secara tahunan (y-o-y) sebesar 15,92%, bahkan secara bulanan (m-t-m) terjadi deflasi sebesar -1,30%. Laju inflasi tahunan berada

sedikit di atas laju inflasi nasional sebesar 15,74% dan Kota Mataram merupakan daerah yang mengalami inflasi tertinggi kedua setelah Kediri (16,17%).

Terjadinya pertumbuhan ekonomi regional dan penurunan laju inflasi pada triwulan I 2006 terkait pula dengan kinerja perbankan, terlihat dari meningkatnya asset, dana pihak ketiga dan kredit perbankan yang sempat mengalami tekanan pada awal tahun 2006. Total asset perbankan meningkat sebesar 3,39% sehingga menjadi sebesar Rp5,68 triliun, sedangkan penyaluran kredit perbankan mengalami kenaikan sebesar 6,85% menjadi Rp3,58 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pada penghimpunan dana pihak ketiga yang mengalami kenaikan sebesar 3,37% menjadi Rp4,20 triliun, sehingga angka rasio LDR meningkat dari sebesar 82,43% menjadi 85,20%, jauh lebih tinggi dibandingkan angka LDR nasional yang baru mencapai sebesar 61,14%, namun risiko kredit (NPLs) cenderung meningkat yaitu dari sebesar 2,66% menjadi 2,81%, meskipun masih relatif jauh di bawah angka NPLs (*gross*) nasional yang telah mencapai sebesar 8,19%.

Selanjutnya dari transaksi pembayaran non tunai melalui kliring dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*) pada triwulan ini masing-masing meningkat sebesar 3,71% dan 48,14% dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga jumlah transaksinya menjadi Rp698 miliar dan Rp2.482 miliar. Sementara itu aliran uang masuk (*inflow*) dan keluar (*outflow*) menghasilkan *net inflow* sebesar Rp160 milyar. Fenomena pergeseran transaksi secara tunai kepada transaksi non tunai masyarakat pada triwulan ini dipengaruhi faktor *seasonal* di awal tahun setelah usainya perayaan hari besar di akhir tahun dan adanya peningkatan *transfer received* (transaksi masuk) antara lain berasal dari masuknya dana perimbangan dan lanjutan pembayaran dana kompensasi BBM. Disisi lain masyarakat perlu lebih memperhatikan tentang keaslian uang, karena jumlah uang palsu yang tercatat di Bank Indonesia Mataram dalam 2 tahun terakhir ini, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya terhadap uang pecahan besar (Rp100.000,- dan Rp50.000,-), dimana pada triwulan I 2006 tercatat sebesar Rp36,68 juta atau mencapai 76,37% dari temuan uang palsu pada tahun 2005.

Prospek Makro Ekonomi Regional (*Economic Outlook*) dan Inflasi

Dari survei kegiatan dunia usaha (SKDU) diketahui pada umumnya kalangan dunia usaha memiliki ekspektasi bahwa kegiatan usaha di Nusa Tenggara Barat pada triwulan II 2006 diprediksi akan terjadi penurunan produksi sebagai akibat adanya kecenderungan menurunnya permintaan oleh masyarakat. Kondisi ini diharapkan tidak terjadi secara berkelanjutan apabila beberapa upaya dapat terwujud antara lain yaitu perlunya merealisasikan rencana kegiatan investasi yang cukup besar sehingga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi NTB yang **pada triwulan II 2006 diperkirakan sebesar 3-4% ($\pm 1\%$)**.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercapai apabila sektor Pertambangan & Penggalan masih dapat diharapkan memberikan sumbangan yang tinggi dengan meningkatkan

kapasitas produksi yang berorientasi ekspor. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan agar kejadian terbakarnya kamp di areal tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) tidak berdampak serius bagi rencana ekspansi/perluasan areal tambang yang tengah di eksplorasi di lokasi Elang Dodo, Sumbawa. Sementara itu sektor Pertanian diharapkan pula dapat meningkatkan produksinya dengan dukungan faktor iklim/cuaca yang kondusif seperti saat ini.

Disisi lain, perkiraan meningkatnya penyaluran kredit perbankan ke sektor riil akan turut mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, apalagi adanya perubahan arah kebijakan perbankan yang cenderung untuk menyalurkan kreditnya ke modal kerja daripada konsumtif.

Sementara itu, laju inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan akan mengalami perlambatan yang cukup signifikan, karena semakin berkurangnya efek *shock* terhadap kenaikan harga barang yang cukup tinggi pada akhir tahun 2005. Secara kumulatif (y-t-d) sampai dengan triwulan II 2006, **angka inflasi Kota Mataram diprediksi sebesar 3% ($\pm 1\%$)**, namun secara tahunan (y-o-y) diperkirakan masih berada dalam kisaran angka yang cukup tinggi sebesar 15% ($\pm 1\%$) karena tingginya inflasi bulan-bulan sebelumnya pada periode tersebut yang dipengaruhi oleh *administered price* sebagai dampak kebijakan kenaikan harga BBM, sedangkan secara triwulanan (q-t-q) akan berada pada kisaran yang relatif lebih rendah yaitu sebesar 2% ($\pm 1\%$), dengan asumsi faktor musiman bersifat normal dan tidak ada faktor eksternal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian NTB.

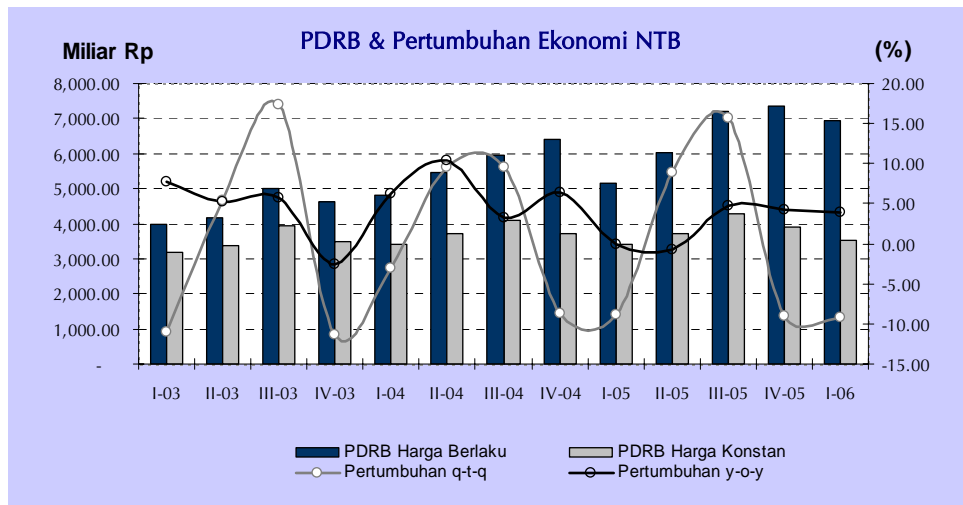
Harapan atas prediksi tersebut akan tercapai apabila didukung oleh peran positif Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Perbankan dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk itu dalam kajian ini disajikan pula rekomendasi kepada berbagai pihak tersebut tentang berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti.

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1. 1. RINGKASAN UMUM PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI NTB

Kegiatan perekonomian di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I-2006 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-t-q) mengalami kontraksi, tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar -9,24% (ADH Konstan 2000). Penurunan ini lebih besar dari kontraksi yang terjadi pada triwulan sebelumnya sebesar -9,09%. Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y), perekonomian Propinsi NTB pada triwulan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,89%, meskipun masih lebih rendah dari pertumbuhan y-o-y triwulan sebelumnya sebesar 4,29%.

Grafik 1.1



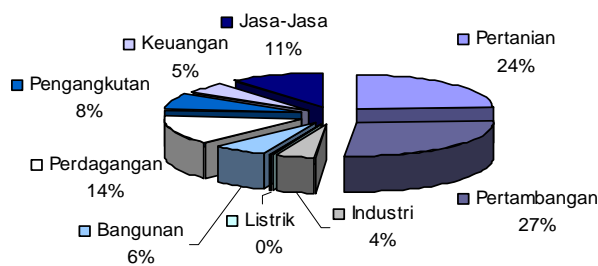
Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Grafik 1.1 di atas menunjukkan perkembangan PDRB dan laju pertumbuhan perekonomian Propinsi NTB selama 3 tahun terakhir. Tampak bahwa PDRB NTB cenderung meningkat pada triwulan III setiap tahunnya. Pada triwulan ini, nilai tambah yang tercermin dari PDRB NTB, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan tahun 2000, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di triwulan I-2006, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6,92 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 3,53 triliun. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB triwulanan (q-t-q) terlihat berfluktuasi namun memiliki pola yang sama, yang trendnya meningkat pada awal hingga pertengahan tahun dan mencapai puncak di triwulan III,

kemudian menurun di triwulan IV, yang disebabkan oleh struktur ekonomi NTB cenderung sangat dipengaruhi faktor musiman terkait dengan basis perekonomian pada sektor pertanian. Pada triwulan ini kembali terjadi penurunan/kontraksi sebesar -9,24%, setelah pada triwulan sebelumnya kontraksi PDRB juga terjadi sebesar -9,09%. Hal ini didorong oleh penurunan nilai tambah yang terjadi pada 7 sektor ekonomi dalam struktur PDRB NTB. Secara tahunan (y-o-y), trend PDRB NTB menunjukkan fluktuasi dengan *range* yang cukup lebar. Pada triwulan I-2006, laju pertumbuhan ekonomi tahunan mengalami perlambatan dari pertumbuhan y-o-y yang dicapai pada triwulan sebelumnya dari 429, menjadi 3,89%.

Grafik 1.2

Distribusi PDRB Sektoral ADH Konstan Th.2000
Tw I-2006



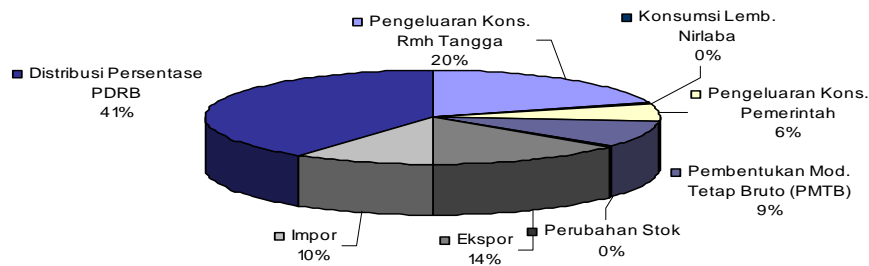
Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Struktur perekonomian NTB pada triwulan I-2006 berdasarkan harga konstan tahun 2000, secara sektoral didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian masing-masing sebesar 27,14% dan 24,12%. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang selama ini selalu mendominasi struktur PDRB NTB. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tertinggi peranannya sejak tahun 2001, menggeser dominasi sektor pertanian pada tahun-tahun sebelumnya. Sektor lain yang juga berperan cukup besar adalah sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan.

Di sisi lain, ditinjau dari sisi penggunaan, struktur PDRB menurut pengeluaran hingga triwulan I-2006 belum menunjukkan pergeseran yang signifikan. Sektor yang paling dominan tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir, yaitu konsumsi rumah tangga dan ekspor masing-masing sebesar 50,37% dan 35,74%. Pada triwulan ini, konsumsi rumah tangga semakin besar peranannya dari periode sebelumnya sebesar 46,84%, berbeda dengan ekspor yang semakin menurun dari sebelumnya yang mencapai 38,90%.

Grafik 1.3

**Distribusi PDRB NTB ADH Konstan Th.2000
Menurut Penggunaan Tw I-2006**



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Pada triwulan ini, secara tahunan (y-o-y), seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi masing-masing sebesar 8,64% dan 6,27%. Dalam 3 tahun terakhir, kedua sektor ini terus berkembang dan selalu memberikan pertumbuhan dan kontribusi positif bagi perekonomian NTB.

Meskipun pertumbuhannya tertinggi, kedua sektor tersebut bukan merupakan sektor dengan *share* terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB, karena masing-masing hanya berkontribusi sebesar 0,53% dan 0,47% dari angka pertumbuhan sebesar 3,89%. Sumbangan tertinggi pada triwulan ini diberikan oleh sektor dengan distribusi tertinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 1,25%. Sisanya disumbangkan oleh sektor lainnya yang juga turut memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi NTB dengan kisaran angka 0,06% sampai dengan 0,71%.

Disisi penggunaan, komponen ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 36,14%. Komponen konsumsi seluruhnya mengalami pertumbuhan positif, yang tertinggi terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga sebesar 6,46%. Kedua komponen tersebut sekaligus sebagai penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan/pengeluaran secara konsisten sejak pertengahan tahun 2005 dan pada triwulan ini besarnya sumbangan kedua sektor tersebut masing-masing 9,86% dan 3,18%.

1.2. PDRB MENURUT PENGGUNAAN/SISI PENGELUARAN

1.2.1. Gambaran Umum

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penggunaan atau pengeluaran pada triwulan ini (secara y-o-y) didominasi oleh ekspor, diikuti oleh konsumsi. Meningkatnya ekspor luar negeri secara signifikan yang didominasi oleh ekspor konsentrat tembaga mendorong pertumbuhan ekspor pada triwulan ini.

Disisi lain, harga barang-barang tambang termasuk harga minyak mentah dunia yang terus meningkat, mendorong meningkatnya ekspor konsentrat tembaga yang pangasanya hampir seluruhnya merupakan konsumsi luar negeri. Angka pertumbuhan tahunan (y-o-y) ekspor yang dicapai pada triwulan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya pada triwulan sebelumnya (15,02%) maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (-11,83%).

Tabel 1.1

Pertumbuhan Sisi Pengeluaran (y-o-y) ADH Konstan Th.2000 (%)	2004				2005				2006
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pengeluaran Kons. Rmh Tangga	4.51	4.98	5.37	4.39	3.55	3.51	5.12	6.50	6.46
Konsumsi Lemb. Nirlaba	8.27	15.07	7.63	7.12	5.40	4.00	5.91	6.14	4.80
Pengeluaran Kons. Pemerintah	4.46	3.79	4.58	4.53	3.77	4.88	3.62	2.36	2.35
Pembentukan Mod. Tetap Bruto (PMTB)	5.78	8.16	7.02	9.56	6.80	5.98	5.93	-0.33	4.35
Perubahan Stok	149.09	-29.07	310.15	-27.39	29.06	-682.67	-17.47	-245.65	-97.55
Ekspor	1.77	11.69	-4.46	15.32	-11.83	-24.85	7.56	15.02	36.14
Impor	18.37	-1.21	6.21	13.90	11.41	35.02	9.13	-1.20	-0.69
Pertumb. Ek. Trmsk Pertambangan Non Migas	6.24	10.43	3.20	6.33	-0.14	-0.67	4.77	4.29	3.89
Pertumb. Ek. Tidak Trmsk Pertambangan Non Migas	6.25	6.18	4.98	4.51	4.32	5.61	4.81	4.03	3.67

Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

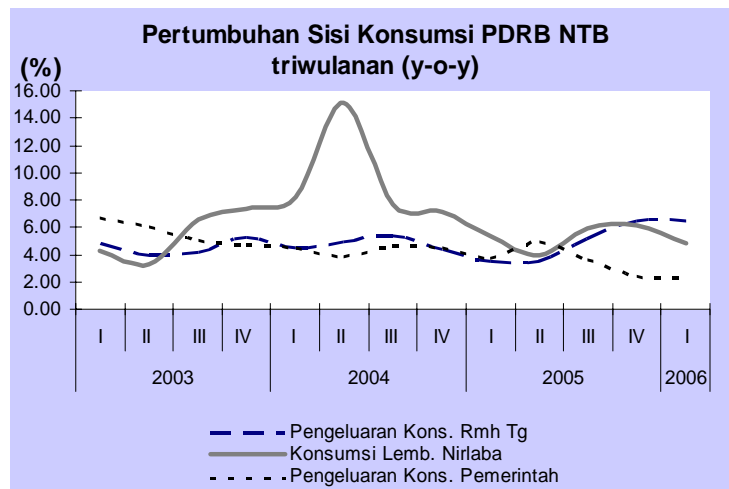
Seluruh komponen konsumsi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang tertinggi kedua pertumbuhannya setelah ekspor, mencapai 6,46%. Sedangkan konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah pada triwulan ini mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,80%, 2,35%. Pertumbuhan seluruh komponen konsumsi pada triwulan ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2005. Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang trendnya cenderung terus menurun selama tahun 2005 bahkan mengalami pertumbuhan negatif di akhir tahun. Namun pada triwulan ini komponen PMTB mengalami pertumbuhan positif yang cukup tinggi sebesar 4,35%. Peningkatan ini terutama didukung oleh peningkatan di sektor konstruksi, baik yang dibiayai oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Sedangkan perubahan stok dan impor pada triwulan ini

masih mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -97,55% dan -0,69%. Menurunnya aktivitas impor tersebut terutama terjadi pada impor luar negeri. Penurunan ini terkait dengan situasi perekonomian yang saat ini masih terasa berat dengan berbagai indikator makro ekonomi.

1.2.2. Pengeluaran Konsumsi

Dari grafik 1.4 dapat dilihat pertumbuhan PDRB Propinsi NTB secara tahunan (y-o-y) dari sisi konsumsi yang menggambarkan kecenderungan pertumbuhan yang menurun pada triwulan I-2006, setelah sebelumnya, sejak pertengahan tahun hingga akhir 2005 terus meningkat dan menyentuh level cukup tinggi pada triwulan IV-2005.

Grafik 1.4



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

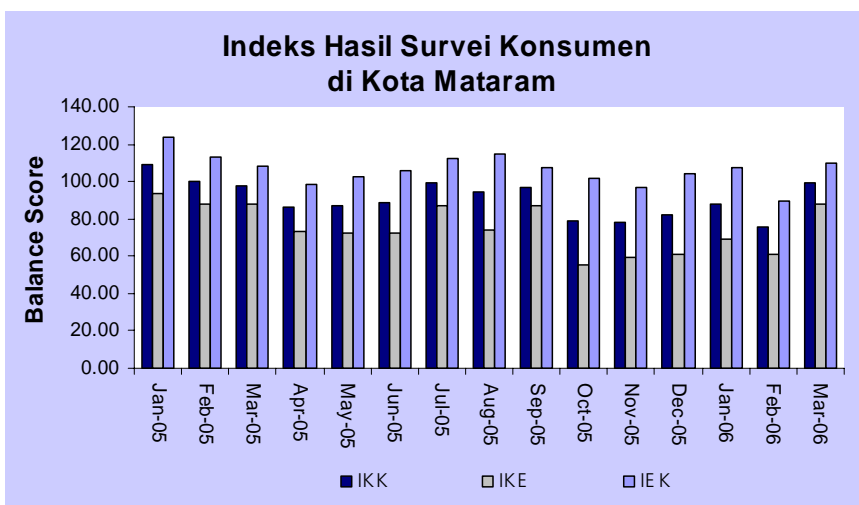
Meskipun pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seluruh komponen konsumsi pada triwulan ini, baik untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba dan pengeluaran konsumsi pemerintah, masih mengalami pertumbuhan positif. Namun demikian, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (triwulan I-2005), hanya konsumsi rumah tangga yang mengalami percepatan pertumbuhan, sedangkan konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah mengalami penurunan pertumbuhan.

Tumbuhnya konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi pada triwulan ini didorong oleh kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan ABRI yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan masih berlangsungnya pencairan kompensasi dari pemerintah berupa kebijakan kompensasi subsidi BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000,- per rumah tangga miskin, dan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) serta subsidi biaya kesehatan untuk masyarakat ekonomi golongan bawah. Disamping itu, meningkatnya konsumsi bahan makanan seiring dengan beberapa perayaan seperti tahun baru Masehi, Hari Raya Idul Adha, peringatan tahun baru Hijriah, tahun baru Imlek, serta Hari Raya Nyepi oleh umat Hindu yang cukup banyak penganutnya di wilayah NTB juga cukup berpengaruh.

Seiring dengan kecenderungan pertumbuhan konsumsi pada triwulan I-2006, konsumsi pemerintah juga tumbuh sebesar 2,35%, namun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhannya pada periode sebelumnya. Indikator meningkatnya pertumbuhan komponen pemerintah adalah peningkatan fungsi pelayan publik, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pegawai pemerintah termasuk kepolisian dan ABRI. Peningkatan tersebut diindikasikan oleh meningkatnya belanja aparatur pemerintah berupa upah dan gaji pegawai pemerintah sebagai dampak dari peningkatan jumlah pegawai. Khusus untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, kecenderungannya hampir merata sehingga tidak mempunyai pola tertentu setiap triwulannya.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi pada triwulan I-2006 ini sejalan dengan hasil survei konsumen yang diselenggarakan atas kerjasama Bank Indonesia Mataram dengan BPS Propinsi NTB, yang mengalami kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) baik bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, maupun dengan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun masih berada pada kondisi pesimis karena nilai saldo bersih berada dibawah 100. Hal ini menggambarkan sikap pesimis para konsumen dalam menyikapi perkembangan perekonomian ke depan. Angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari hasil survei konsumen pada triwulan I-2006 (Maret 2006) adalah 98,9. Meskipun Indeks Ekspektasi Umum (IEK) menunjukkan angka yang optimis (109,80), namun Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) sebesar 88,00 memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga secara umum keyakinan konsumen menjadi pesimis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah baik pusat dan daerah masih dilandasi kondisi pesimis, namun mulai menunjukkan perbaikan/cenderung membaik.

Grafik 1.5



Keterangan :

- IKK : Indeks Keyakinan Konsumen
- IKE : Indeks Kondisi Ekonomi
- IEK : Indeks Ekspektasi Konsumen

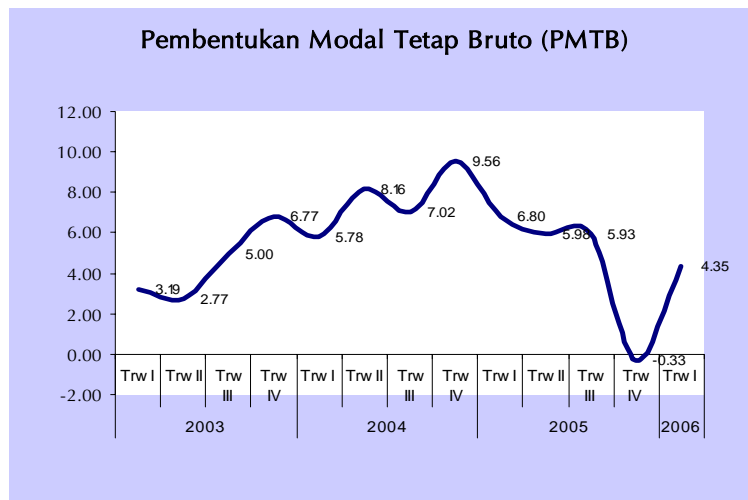
Pertumbuhan seluruh komponen konsumsi pada triwulan ini didorong pula oleh kredit yang disalurkan perbankan di NTB yang masih didominasi oleh kredit konsumsi. Meskipun secara

perlahan telah terjadi pergeseran yang ditandai dengan penurunan realisasi kredit konsumsi dan peningkatan kredit modal kerja dan investasi, namun selama ini pangsa kredit konsumsi masih merupakan yang terbesar, rata-rata berada di atas 50%, sehingga peningkatan jumlah kredit konsumsi yang disalurkan perbankan pada triwulan ini, cukup memberikan dampak terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat.

1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pertumbuhan PMTB secara tahunan (y-o-y) pada triwulan I-2006 cukup menggembirakan setelah menyentuh titik terendah dalam 2 tahun terakhir pada triwulan IV-2005 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,33%. Pada triwulan ini, komponen PMTB menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,35%. Peningkatan ini terutama didukung oleh peningkatan di sektor konstruksi, baik yang dibiayai oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Kondisi tersebut menandakan terjadinya pemulihan meskipun secara perlahan, dari kondisi sebelumnya saat masih sangat dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM yang berakibat pada meningkatnya biaya-biaya produksi di sektor riil, disamping daya beli masyarakat juga mengalami stagflasi akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa. Proyek pemerintah yang masih berlangsung hingga saat ini adalah program rutin pemeliharaan dan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan, terutama yang berlokasi di Pulau Sumbawa. Namun demikian, pertumbuhan y-o-y PMTB pada triwulan I-2006 tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhannya pada triwulan I-2005 yang mencapai 6,80%. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya keterbatasan anggaran dalam APBD, yang mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan ditunda pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, proyek yang ditunda antara lain pembangunan jalan dan jembatan Sengkal-Malili, Lenangguar-Teladan, Teladan-Kelawis, Dusun Baru-Sampe, Tanjung Menangis yang rusak akibat bencana banjir di awal tahun 2006 dan proyek-proyek lainnya.

Grafik 1.6.

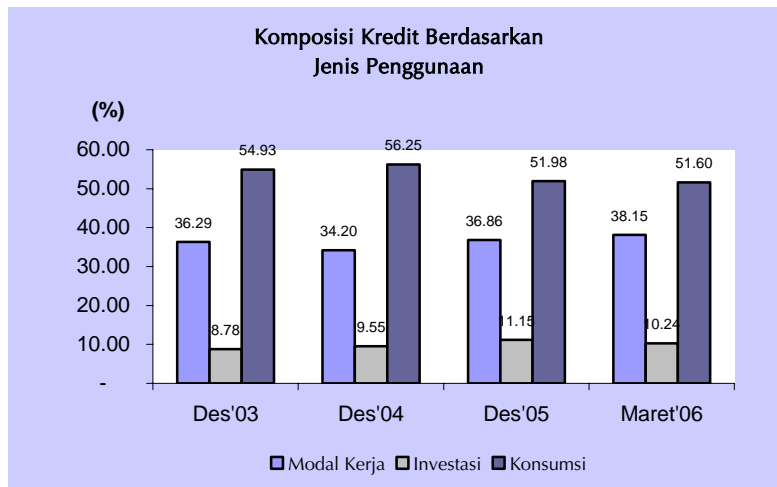


Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Sementara itu, data realisasi investasi swasta baik PMDN dan PMA belum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2005 hanya terdapat tambahan realisasi PMA sebesar 5,86% dari yang direncanakan, sedangkan PMDN tidak ada yang terealisasi (sumber : BKPM Propinsi NTB).

Dilihat dari sisi penyaluran kredit perbankan pada triwulan ini, terjadi peningkatan jumlah kredit perbankan yang cukup signifikan yang diberikan untuk kegiatan investasi. Sebagian besar kredit tersebut disalurkan oleh bank umum yang beroperasi di NTB. Kredit yang disalurkan kepada sektor riil dalam bentuk modal kerja dan investasi pada triwulan I-2006 dibandingkan dengan posisi Desember 2005 mengalami peningkatan sebesar 7,70%. Sejak pertengahan tahun 2004, secara perlahan terjadi pergeseran penyaluran kredit dari kredit konsumsi kepada kredit kepada sektor riil/usaha-usaha produktif. Dari Grafik 1.7 dapat dilihat bahwa meskipun pangsa kredit konsumsi terhadap total kredit yang disalurkan perbankan NTB adalah yang terbesar, rata-rata berada di atas 50%, namun terdapat kecenderungan terus mengalami penurunan, dari sebesar 56,51% pada tahun 2004 menjadi 51,27% pada akhir triwulan I-2006. Sementara pangsa kredit perbankan yang disalurkan bank umum di NTB kepada berupa modal kerja dan investasi mengalami peningkatan dari 43,75% pada tahun 2004 menjadi 48,40% pada triwulan I-2006. Sektor yang saat ini banyak diminati adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa dunia usaha. Perubahan komposisi kredit dari jenis konsumtif ke sektor produktif ini turut berperan dalam pembentukan investasi di NTB.

Grafik 1.7



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

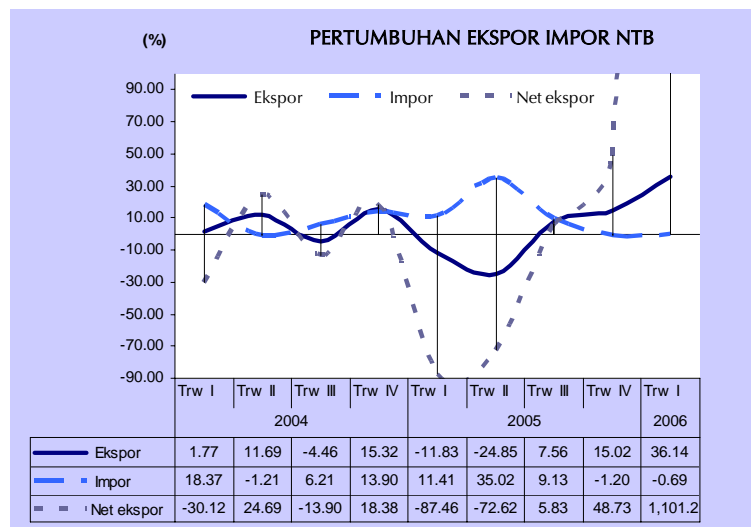
1.2.4. Pertumbuhan Net Ekspor (Ekspor – Impor) Regional & Internasional

Kegiatan ekspor dan impor yang dibahas dalam konsep PDRB ini meliputi transaksi barang dan jasa baik antar regional (daerah) maupun dengan dunia internasional (luar negeri). Pada triwulan I-2006, nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekspor NTB meningkat cukup signifikan

sebesar 36,14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-o-y). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan komponen ekspor (ditinjau secara tahunan) adalah meningkatnya secara signifikan ekspor luar negeri, yang didominasi oleh ekspor konsentrat tembaga. Disamping itu, terjadi peningkatan harga barang-barang tambang termasuk harga minyak mentah dunia yang cukup tinggi, mendorong peningkatan nilai penjualan ekspor konsentrat tembaga yang pangsaanya hampir seluruhnya merupakan konsumsi luar negeri. Komoditi ekspor konsentrat ini lebih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global seperti harga konsentrat dunia dan permintaan dari luar negeri. Perdagangan antar daerah (ekspor regional) juga menunjukkan peningkatan, karena di akhir triwulan, hasil panen produk-produk pertanian cukup berhasil terutama produk-produk yang diperdagangkan antar daerah.

Disisi lain, komponen impor masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,69%, namun sedikit membaik dari pertumbuhan y-o-y pada triwulan sebelumnya sebesar -1,20%. Dari Grafik 1.8, impor NTB terlihat relatif stabil dengan kecenderungan menurun hingga triwulan ini. Menurunnya aktivitas impor tersebut terutama terjadi pada impor luar negeri. Penurunan ini terkait dengan situasi perekonomian yang saat ini masih terasa berat dengan berbagai indikator makro ekonomi, seperti nilai tukar rupiah yang relatif masih tinggi, rencana kenaikan tarif dasar listrik, dan sebagainya, sehingga cenderung memperlambat laju impor.

Grafik 1.8



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, NTB selalu mengalami surplus/net ekspor, karena nilai ekspor yang lebih tinggi dari nilai impornya. Dari Grafik 1.8 terlihat pertumbuhan ekspor impor NTB yang cenderung berfluktuasi dalam 2 tahun terakhir. Fluktuasi angka pertumbuhan yang tajam terjadi pada triwulan II-2005 saat terjadi kontraksi yang cukup signifikan, meskipun masih mengalami net ekspor, namun nilainya mengalami penurunan hingga -87,46% (y-oy). Namun menjelang akhir

2005, angka pertumbuhan net ekspor semakin meningkat. Pertumbuhan tahunan (y-o-y) yang sangat tinggi diperlihatkan pada triwulan ini, hingga mencapai 1.101,28%, didorong oleh nilai ekspor NTB yang terus mengalami peningkatan, sementara nilai impor mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong ekspor daerah, baik upaya peningkatan hasil produksi dan kualitas barang ekspor NTB dan substitusi barang impor dengan produksi barang yang dapat dibuat/dihasilkan dari daerah NTB, di samping aktif melakukan promosi dengan mengikuti berbagai pameran produk yang diselenggarakan di beberapa negara.

1.2.5. Kinerja Ekspor - Impor Luar Negeri Propinsi NTB

Berdasarkan data ekspor impor dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB, kinerja ekspor luar negeri NTB pada triwulan I-2006 mengalami penurunan sebesar 26,21% dibandingkan dengan ekspor pada periode yang sama tahun sebelumnya (triwulan I-2005).

Tabel 1.2

Volume : Ton
 Nilai : US \$

REALISASI EKSPOR PROPINSI NTB PERIODE JANUARI-MARET 2005 & JANUARI-MARET 2006								
No.	Komoditi	Januari - Maret 2005		Januari - Maret 2006		Pangsa (%) Jan-Mar'06	Pertumbuhan	
		Volume	Nilai	Volume	Nilai		Volume	Nilai
1	Konsentrat tembaga	169,977.26	152,631,637.67	86,784.08	112,500,461.24	99.81	(48.94)	(26.29)
2	Ikan hias	0.85	9,481.10	0.53	3,554.05	0.00	(37.65)	(62.51)
3	Abalone			1.25	6,283.71	0.01		
4	Paprika	3.50	4,275.93	11.05	19,009.09	0.02	215.71	344.56
5	Kepiting			0.20	790.18	0.00		
6	Ikan segar			0.32	1,113.73	0.00		
7	Tripang			0.27	450.00	0.00		
8	Mutiara bulat			-	44,373.40	0.04		
9	Lada	1.00	1,462.18			-	(100.00)	(100.00)
10	Kerajinan	94.72	109,369.31	107.66	143,144.53	0.13	13.66	30.88
	- Cerabah	29.94	46,517.17	32.91	39,030.36		9.92	(16.09)
	- Kerajinan kayu	20.85	16,911.65	3.53	5,813.05		(83.07)	(65.63)
	- Kerajinan bambu	2.18	452.13	2.50	617.90		14.68	36.66
	- Kerajinan batu	37.31	19,304.40	22.36	4,845.07		(40.07)	(74.90)
	- Kerajinan tenun			0.03	10,006.92			
	- Kerajinan buah kering	4.21	13,893.64	38.33	72,591.22		810.45	422.48
	- Kerajinan keramik	0.20	290.32	3.00	8,082.55		1,400.00	2,684.01
	- Kerajinan alang-alang			5.00	1,775.54			
	- Kerajinan emas mutiara			-	381.92			
	- Tenun ikat	0.03	12,000.00	-	-		(100.00)	(100.00)
	Total	170,077.33	152,756,226.19	86,905.36	112,719,179.93	100.00	(48.90)	(26.21)

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

Realisasi ekspor yang tercatat dari data Pemberitahuan Ekspor Barang yang berasal dari pengiriman barang-barang dari NTB ke luar negeri melalui beberapa pelabuhan dan bandar udara di Indonesia pada triwulan I-2006 sebesar US\$ 112.72 juta, menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 152.76 juta. Demikian volume pengiriman

barang juga menurun sebesar 48,90% dari 170 ribu ton menjadi 87 ribu ton pada triwulan ini. Penurunan tersebut dipicu oleh penurunan ekspor komoditi konsentrat tembaga yang mendominasi komoditi ekspor NTB sebesar 99,81%.

Ekspor terbesar ditujukan kepada negara Jepang (US\$ 76.05 juta) , Philipina (US\$ 21.53 juta), India (US\$ 14.94 juta), Korea (US\$ 0.44 juta) dan sisanya ke negara-negara lainnya seperti Jerman, Inggris, Hongkong, Spanyol, Amerika, Perancis, Malaysia, Singapura, Belanda, Belgia, Polandia, dan lain-lain. Produk utama yang diekspor adalah konsentrat tembaga yang secara konsisten sebagai produk dengan nilai ekspor tertinggi. Secara tahunan, dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, distribusi produk ini sedikit menurun dari tahun posisi triwulan I-2005. Nilai ekspor konsentrat tembaga pada triwulan I-2005 mencapai US\$ 152,63 juta atau 99,92% dari total nilai ekspor pada triwulan I-2005. Selebihnya adalah produk paprika, mutiara dan produk-produk kerajinan. Dari kerajinan, kerajinan buah kering, gerabah dan tenun merupakan produk unggulan.

Tabel 1.3

Negara Tujuan Ekspor terbesar dan Pelabuhan Muat Ekspor NTB Januari - Maret 2006					
Negara	Nilai (US\$)	Pangsa (%)	Pelabuhan/ Bandara	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
Jepang	76,051,487.19	67.47	Benete - Sumbawa, NTB	112,500,461.24	99.81
Philipina	21,533,170.14	19.10	Tanjung Perak - Surabaya	143,144.53	0.13
India	14,939,014.30	13.25	Selaparang - NTB	75,574.16	0.07
Korea	44,373.40	0.04			
Negara lainnya (16 negara)	151,134.90	0.13			
Total	112,719,179.93	100.00	Total	112,719,179.93	100.00

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

Ekspor produk dari NTB pada triwulan ini sebagian besar dikirimkan melalui pelabuhan Benete - Sumbawa, yaitu ekspor konsentrat tembaga dari PT. Newmont Nusa Tenggara. Disamping pelabuhan tersebut, ada juga yang dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya dan Bandar Udara Selaparang - NTB. Dari data tersebut, terlihat bahwa ekspor dari sektor pertanian (dalam arti luas) relatif kecil, padahal potensinya sangat besar, seperti permintaan sapi asal NTB, hasil laut lainnya di luar mutiara dan rumput laut (ikan kerapu, kakap, udang, dan sebagainya) dan juga hasil perkebunan. Belum adanya pelabuhan laut internasional seperti propinsi Bali (Pelabuhan Benoa) menyebabkan hasil ekspor non migas tidak dapat dikapalkan langsung ke negara tujuan. Dominasi komoditi ekspor pada 1 jenis komoditi di NTB ini membawa konsekuensi jangka panjang yang kurang baik, karena akan terjadi penurunan ekspor yang tajam apabila komoditi konsentrat tembaga semakin berkurang. Oleh karena itu, menjadi sangat penting sejak saat ini pengembangan komoditi ekspor non migas menjadi prioritas utama melalui bantuan teknis dan dana ke sektor-sektor yang berpotensi khususnya ekspor industri berbasis pertanian dalam arti luas yang menjadi karakteristik daerah ini sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja lebih besar.

Sementara itu, realisasi impor NTB dari luar negeri pada triwulan I-2006 ini tidak signifikan nilainya dibandingkan dengan nilai ekspor luar negeri NTB. Berdasarkan PIB dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Mataram, pada triwulan I-2006 realisasi impor NTB hanya sebesar Rp 38,19 juta, antara lain berupa produk *capsium seeds* dan *spareparts for motor cycle* dari Singapura. Pada umumnya barang impor NTB digunakan untuk sektor yang produktif seperti untuk kelancaran sarana transportasi dan industri. Secara net, perdagangan luar negeri Propinsi NTB pada triwulan ini mengalami surplus perdagangan yang sangat besar.

1.3. PDRB MENURUT SISI SEKTORAL (PENAWARAN)

1.3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB

Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB mencapai 4,62%. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan rata-rata tertinggi dicapai oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 12,06%. Sektor lainnya hanya berada pada kisaran rata-rata pertumbuhan sebesar 2,16% sampai 5,34%. Pada tahun 2005, terdapat 7 sektor yang mengalami pertumbuhan di atas rata-rata yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertambangan dan penggalian dan sektor bangunan. Hanya 2 sektor yang tumbuh di bawah rata-rata yaitu sektor jasa-jasa dan sektor pertanian.

Tabel 1.4

SEKTOR	Pertumbuhan y-o-y (%)					
	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
Pertanian	-0.02	0.61	4.63	2.73	2.81	2.16
Pertambangan	20.40	3.49	0.25	8.88	(3.98)	5.81
Industri	5.67	5.88	6.49	6.35	7.29	6.34
Listrik	9.06	7.04	3.13	8.07	4.06	6.27
Bangunan	4.47	4.59	5.86	5.61	5.31	5.17
Perdagangan	6.62	5.27	5.14	6.78	6.22	6.00
Pengangkutan	4.27	6.64	5.80	6.70	7.22	6.13
Keuangan	7.35	10.23	20.89	16.14	5.70	12.06
Jasa-Jasa	0.59	1.72	1.58	5.16	4.01	2.61
PDRB	7.32	3.34	3.87	6.41	2.17	4.62

Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB ditinjau Secara Tahunan (y-o-y)

Pada triwulan I-2006, pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB secara tahunan (y-o-y) sebesar 3,89%, didorong oleh pertumbuhan di semua sektor. Dibandingkan dengan pertumbuhan secara y-o-y pada triwulan sebelumnya, terlihat adanya perlambatan pertumbuhan. Hal ini didorong oleh turunnya pertumbuhan sektor ekonomi yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian NTB.

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini adalah sektor bangunan (8,64%) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (6,27%).

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan Th.2000)

SEKTOR	TRW/III-2005				TRW/IV-2005				TRW/I-2006			
	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG
	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)
Pertanian	1,261.91	29.51	3.33	1.00	957.61	24.63	3.85	0.95	851.10	24.12	1.63	0.40
Pertambangan	1,143.04	26.73	4.55	1.22	1,064.34	27.38	4.97	1.35	957.62	27.14	4.65	1.25
Industri	173.67	4.06	5.89	0.24	191.02	4.91	2.49	0.12	158.50	4.49	4.22	0.19
Listrik	11.65	0.27	4.35	0.01	12.06	0.31	3.73	0.01	11.33	0.32	5.20	0.02
Bangunan	295.51	6.91	6.01	0.41	269.05	6.92	5.13	0.35	226.96	6.43	8.64	0.53
Perdagangan	544.36	12.73	6.87	0.86	549.50	14.13	3.03	0.43	479.70	13.60	5.26	0.71
Pengangkutan	283.34	6.63	7.08	0.46	286.38	7.37	7.44	0.53	273.05	7.74	6.27	0.47
Keuangan	173.94	4.07	5.68	0.23	176.88	4.55	4.77	0.22	177.09	5.02	5.41	0.27
Jasa-Jasa	388.97	9.10	3.79	0.35	380.73	9.79	3.15	0.31	392.92	11.14	0.48	0.06
Total	4,276.41	100.00	4.77	4.77	3,887.57	100.00	4.29	4.29	3,528.28	100.00	3.89	3.89

Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Dilihat dari besarnya sumbangan pertumbuhan yang diberikan oleh masing-masing sektor, kontribusi terbesar bersumber dari sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mendominasi struktur perekonomian NTB. Besarnya sumbangan oleh sektor ini mencapai 1,25% dari total pertumbuhan ekonomi NTB. Penyumbang tertinggi kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,71%. Berikutnya adalah bangunan yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini memberikan kontribusi sebesar 0,53%. Sektor lainnya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang sebesar 0,47%. Sementara itu, pada triwulan ini, kontribusi sektor pertanian yang merupakan sektor dominan kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, yaitu hanya sebesar 0,40% (pada triwulan IV-2005 mencapai 0,95%). Sektor lainnya hanya menyumbang dengan kisaran angka di bawah 0,3%.

1.3.3. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

1.3.3.1. Kondisi Dunia Usaha

Penurunan/kontraksi secara triwulanan yang terjadi di beberapa sektor sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan melalui kerja sama antara Bank Indonesia Mataram dengan BPS Propinsi NTB setiap triwulan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, terdapat 6 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif dan hanya 2 sektor yang tumbuh positif. Kontraksi terbesar terjadi pada sektor industri pengolahan (-17,02%), disusul oleh sektor bangunan (-15,64%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (12,70%), sektor pertanian (-11,12%),

sektor pertambangan dan penggalian (-10,03%) dan kontraksi terendah terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi (-4,65%). Secara umum, ditinjau secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB sangat dipengaruhi oleh faktor *seasonal* sesuai dengan karakteristik daerah ini.

Dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha tersebut, diperoleh gambaran bahwa pada umumnya para responden yang berasal dari kalangan dunia usaha menyatakan bahwa kegiatan usaha pada triwulan ini mengindikasikan terjadinya penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih/NSB (balance score) -28,33, menurun dari sebelumnya sebesar -5,00.

Tabel 1.5
Nilai Balance Score Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

Sektor	TRWI-05		TRWII-05		TRWIII-05		TRWIV-05		TRWI-06	
	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis
Umum	-8.33	15.00	-10.00	16.67	8.33	20.00	-5.00	15.00	-28.33	10.00
Pertanian	28.57	19.05	-9.20	14.29	-9.52	28.57	-9.52	28.57	28.57	19.05
Pertambangan	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-50.00	-100.00	-50.00	-100.00	0.00
Industri	-50.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	-25.00	-75.00	-25.00
Listrik	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	0.00	50.00	0.00
Bangunan	-100.00	0.00	-33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
Perdagangan	-45.45	0.00	-27.27	9.09	45.45	36.36	9.09	18.18	-63.64	9.09
Pengangkutan	14.29	28.57	28.57	42.86	57.14	42.86	14.29	28.57	-85.71	14.29
Keuangan	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00
Jasa-jasa	-40.00	40.00	-40.00	20.00	-20.00	0.00	-40.00	0.00	-40.00	0.00

Sumber Data : Hasil Survei SKDU BI-BPS Prop.NTB

Penurunan kegiatan usaha pada triwulan ini didorong oleh turunnya permintaan pasar, terutama dari dalam negeri, yang berpengaruh terhadap turunnya pendapatan/nilai penjualan perusahaan. Salah satu faktor lainnya yang diduga mempengaruhi penurunan permintaan tersebut adalah faktor musiman, dimana terjadi penurunan permintaan setelah pada triwulan IV-2005, di mana pada saat itu terdapat beberapa hari besar seperti bulan puasa, Hari Raya Idul Fitri dan hari Natal yang biasanya sangat mempengaruhi peningkatan kegiatan usaha. Di samping itu indikasi penurunan kegiatan usaha juga tercermin pada menurunnya nilai realisasi kontrak dan menurunnya produksi, meskipun indikator lainnya menunjukkan optimisme seperti rata-rata harga/tarif, kondisi keuangan perusahaan dan situasi bisnis. Sementara itu, persepsi responden terhadap situasi bisnis pada triwulan I-2006 mengindikasikan optimisme, tercermin dari Saldo Bersih (SB) 10,00 (meningkat) meskipun tidak sebesar triwulan sebelumnya dengan SB 15,00.

Dari hasil survei, terdapat 6 (enam) sektor yang mengindikasikan penurunan pada triwulan ini, yaitu sektor bangunan (Saldo Bersih Tertimbang /SBT -7,94%), sektor perdagangan, hotel & restoran (SBT -9,21%), sektor pengangkutan & komunikasi (SBT -7,01%) dan sektor jasa-jasa (SBT -7,63%). Sedangkan sektor lainnya (3 sektor) mengindikasikan peningkatan kegiatan usaha, yang tertinggi terjadi pada sektor pertanian (SBT 9,10%), dan disusul oleh keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,97%) dan yang terendah adalah sektor listrik, gas dan air bersih (0,32%).

Penurunan kegiatan usaha di sektor perdagangan, hotel & restoran pada triwulan I-2006 dipengaruhi oleh turunnya permintaan yang berdampak pada turunnya nilai penjualan. Indikasi penurunan terutama terjadi pada sub sektor perdagangan besar & eceran dengan SBT -8,55%. Selain kurangnya permintaan, faktor tingginya persaingan usaha pada sektor yang sama dan penurunan pangsa pasar merupakan faktor yang membatasi kinerja usaha pada sektor ini. Sedangkan di sektor bangunan, penurunan terutama disebabkan karena pada triwulan ini kegiatan sektor bangunan telah selesai dan belum adanya kontrak pekerjaan yang baru. Selain turunnya permintaan, faktor yang membatasi kegiatan usaha di sektor ini adalah tingginya harga bahan bangunan/material serta meningkatnya upah tenaga kerja. Demikian pula sektor jasa-jasa pada triwulan I-2006, penurunannya dipicu oleh turunnya permintaan dan persaingan. Kegiatan usaha di sektor pengangkutan sangat dipengaruhi terbatasnya bahan bakar dan tingginya persaingan usaha pada sektor yang sama.

Disisi lain, peningkatan yang terjadi disektor seperti pertanian didorong oleh mulai membaiknya hasil produksi pertanian karena telah memasuki musim panen pada akhir triwulan I-2006. Sedangkan peningkatan di sub sektor listrik dipicu oleh penyediaan energi listrik yang sudah mulai stabil oleh PT PLN sehingga memberikan dorongan terhadap peningkatan di sektor listrik, gas dan air bersih.

1.3.3.2. Penggunaan Tenaga Kerja

Pada triwulan ini, penggunaan tenaga kerja secara umum di NTB cenderung stabil, ditunjukkan oleh sebagian besar responden (81,67%) dunia usaha yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengurangi atau menambah jumlah karyawannya (tetap). Hanya sebagian kecil yang berkeinginan mengurangi (6,67% dari jumlah responden) atau menambah (10% dari jumlah responden) jumlah tenaganya. Penambahan tenaga kerja teridentifikasi berasal dari sektor pertanian, yaitu di sub sektor perkebunan; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan pengurangan tenaga kerja terjadi pada sektor bangunan, karena pesimisme pelaku dunia usaha di sektor ini akibat kenaikan harga bahan bangunan dan sektor industri pengolahan terkait dengan kesulitan biaya produksi yang dihadapi.

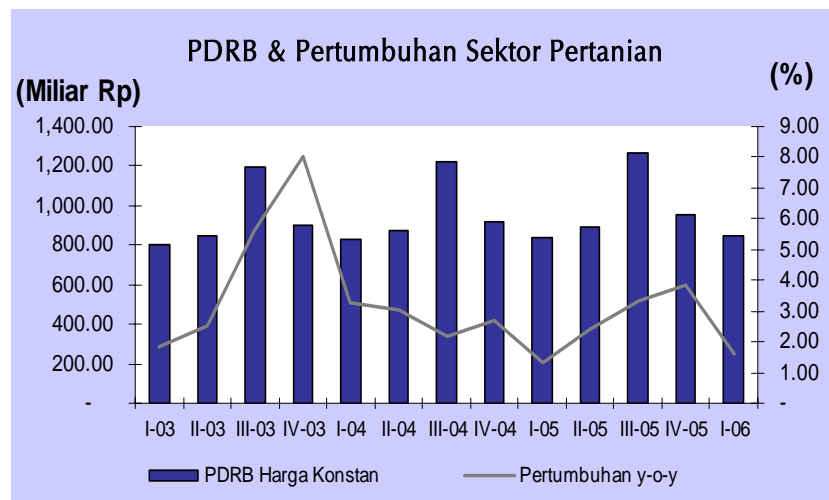
1.3.4. Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral

1.3.4.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada triwulan ini, ditinjau secara tahunan (y-o-y) hanya tumbuh sebesar 1,63%. Peningkatan pada sektor ini disebabkan karena peningkatan pada hampir semua sub sektornya, kecuali sub sektor kehutanan yang masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,81%. Selama 3 tahun terakhir, sub sektor ini terus mengalami pertumbuhan negatif, kecuali pada

triwulan II-2005 tumbuh positif sebesar 2,14%. Masih maraknya kasus *illegal logging* di NTB dirasakan sangat menghambat pertumbuhan sub sektor ini.

Grafik 1.9



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Dari sektor pertanian, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sub sektor perkebunan sebesar 3,30%, diikuti oleh sub sektor perikanan (2,09%), tanaman bahan makanan (1,65%) dan yang terendah adalah peternakan dan hasil-hasilnya (0,98%). Pertumbuhan pada sub sektor perkebunan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka pertumbuhannya pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,27%. Percepatan pertumbuhan tersebut didorong oleh masih berlangsungnya musim panen tembakau pada triwulan ini dengan hasil produksi yang lebih besar dari tahun lalu . Selain itu juga terus meningkatnya permintaan terhadap produk tembakau Virginia NTB. Hingga saat ini mutu tembakau Virginia omprongan Lombok diakui sebagai yang terbaik di Indonesia. Bahkan NTB merupakan pemasok 60% dari kebutuhan tembakau Virginia nasional. Usaha perkebunan tembakau ini cukup besar pengaruhnya dalam menggerakkan roda perekonomian NTB dan dapat menyerap tenaga kerja hingga 126 ribu orang di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Hingga saat ini, luas areal penanaman tembakau Virginia di NTB mencapai 18 ribu hingga 20 ribu hektar setiap tahunnya. Pada tahun 2005, dari areal seluas 18.746 hektar dapat dihasilkan 36.500 ton daun kerosok dengan nilai jual sekitar Rp 484 miliar. Faktor lain yang juga mendorong pertumbuhan di sub sektor perkebunan adalah dimulainya pengembangan agribisnis kakao di Lombok Timur. Tanaman jarak yang sedang dikembangkan di NTB juga mestinya akan turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan di sub sektor ini, karena alternatif bahan bakar dengan bahan alam (bio energi) telah menjadi prioritas pemerintah pada saat ini dan ke depan.

Sementara itu, pertumbuhan pada sub sektor tanaman bahan makanan yang juga cukup tinggi antara lain didorong oleh meningkatnya supply beras yang telah mulai memasuki masa panen raya pada akhir triwulan I-2006, setelah sebelumnya sempat terjadi penurunan persediaan pada awal

hingga pertengahan triwulan I-2006 karena faktor musiman pada tahun ini yang kurang mendukung, dan masih berada dalam masa tanam. Keadaan tersebut sempat diperburuk oleh bencana banjir yang terjadi di Lombok dan Sumbawa sehingga menyebabkan kerusakan ratusan hektar sawah petani. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras pada awal hingga pertengahan triwulan I-2006. Di samping itu, dari sisi permintaan, terjadi peningkatan, terkait beberapa perayaan pada triwulan ini, seperti tahun baru Masehi, Hari Raya Idul Adha, peringatan tahun baru Hijriah, tahun baru Imlek, serta Hari Raya Nyepi. Demikian pula untuk permintaan atas produksi hasil tanaman palawija, terutama jagung yang meningkat. Saat ini jagung NTB sangat diminati oleh negara Philipina dan Malaysia. Namun demikian, belum seluruh permintaan tersebut dapat dipenuhi karena produksi jagung di NTB belum terlalu banyak. Oleh karena itu, prospek penjualan jagung yang bagus perlu ditindaklanjuti dengan perhatian yang lebih serius terhadap penanaman serta pemasaran jagung serta pemberian pemahaman kepada petani agar dapat menghasilkan produksi jagung yang sesuai dengan kualitas ekspor.

Di sub sektor perikanan, budidaya mutiara di NTB semakin menarik perhatian, tercermin dari tingginya permintaan terhadap produk ini. Pada tahun 2005 saja, produksi biji mutiara mencapai 1,8 ton yang dihasilkan oleh sedikitnya 24 perusahaan yang tersebar di enam kabupaten di NTB. Potensi mutiara di NTB setiap tahun mencapai 3,72 ton, namun hingga kini baru bisa menghasilkan 1,8 ton. Potensi areal budidaya mutiara di NTB mencapai 23.381 Ha, namun baru 8.478 Ha yang dimanfaatkan (36,26%). Secara umum, pertumbuhan di sub sektor ini didukung oleh potensi kelautan yang dimiliki NTB. Saat ini potensi perikanan NTB mencapai 428 ribu ton. Selain potensi perikanan, laut NTB juga menyimpan potensi lainnya seperti budidaya rumput laut, abalone, ikan kerapu dan lobster.

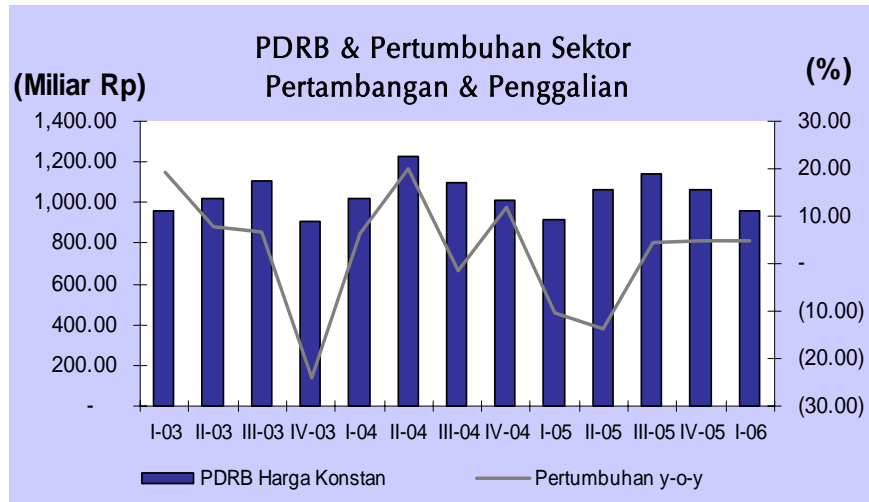
Pertumbuhan yang terjadi di sub sektor peternakan dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan hewan ternak, terutama kerbau oleh luar negeri. Venezuela merupakan salah satu negara yang membutuhkan kiriman ternak dari NTB untuk menunjang kegiatan pertaniannya. Negara ini tidak membatasi pesanan ternak kerbaunya, melainkan tergantung *supply* yang dapat dipasok oleh peternak NTB yang memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini menimbulkan peluang bagi peternak NTB untuk bisa menjual kerbaunya ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Selama ini NTB mengirim ternaknya ke Malaysia dan Timor Leste rata-rata 3.000 ekor per tahun. Potensi ternak terutama sapi dan kerbau di NTB mencapai 450 ribu ekor sapi dan 250 ribu ekor kerbau, sebagian dikirim ke daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Barat.

Ditinjau dari jumlah kredit yang disalurkan perbankan NTB kepada sektor pertanian pada triwulan ini mengalami peningkatan dibandingkan posisi akhir tahun 2005. Pada triwulan I-2006, kredit kepada sektor pertanian meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 19,48%. Dana yang bergulir ini turut memberikan peranan terhadap pertumbuhan sektor pertanian NTB pada triwulan ini.

1.3.4.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan I-2006 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% dan dapat memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan ini sebesar 1,25%. Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhannya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -10,49%, sektor ini mengalami percepatan pertumbuhan. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan y-o-y pada triwulan

Grafik 1.10



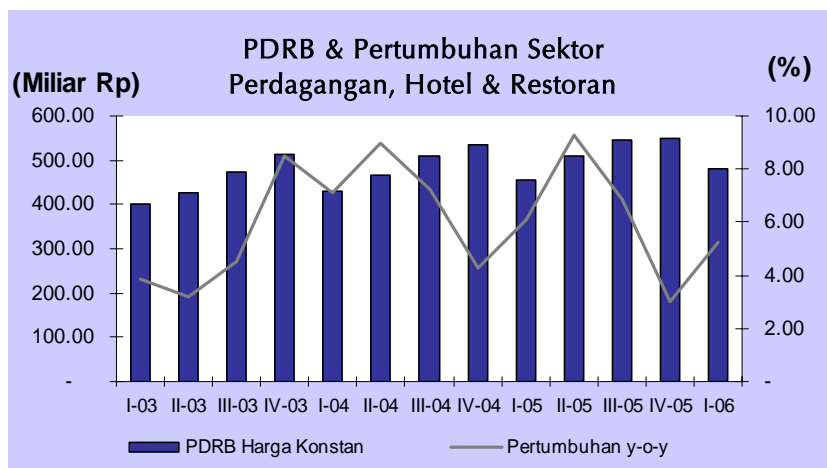
Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

sebelumnya, terjadi penurunan pertumbuhan dari sebesar 4,97% pada triwulan IV-2005. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya hasil produksi pertambangan non migas terutama pada produksi konsentrat tembaga yang mendominasi sektor ini. Namun demikian, pertumbuhan yang terjadi di sektor ini pada triwulan I-2006 didorong oleh peningkatan nilai penjualan hasil produksi konsentrat tembaga yang dipengaruhi oleh kenaikan harga penjualan produk tersebut di pasar internasional karena penjualan sangat dipengaruhi oleh pasar global.

1.3.4.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan ini terlihat cenderung membaik. Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan sektor ini tampak berfluktuasi. Selama tahun 2005, titik pertumbuhan terendah terjadi pada triwulan IV-2005, setelah peristiwa bom Bali II.

Grafik 1.11



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Pada triwulan I-2006, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,26%, dengan kontribusi yang cukup tinggi, sebesar 0,71%. Pertumbuhan sektor ini ditunjang oleh pertumbuhan semua sub sektor pendukungnya, terutama sub sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,53% yang menyumbang sebesar 0,66%. Sedangkan pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran hanya sebesar 3,06% dan hanya memberikan sumbangan sebesar 0,04%.

Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran didorong oleh peningkatan penjualan kebutuhan barang sehari-hari seiring dengan beberapa perayaan tahun baru Masehi, Hari Raya Idul Adha, peringatan tahun baru Hijriah, tahun baru Imlek, serta Hari Raya Nyepi, khususnya bahan makanan dan barang sandang. Disisi lain, peningkatan jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan ini cukup memberikan andil terhadap pertumbuhan sektor ini, dimana pertumbuhan kreditnya secara y-o-y mencapai 8,00%.

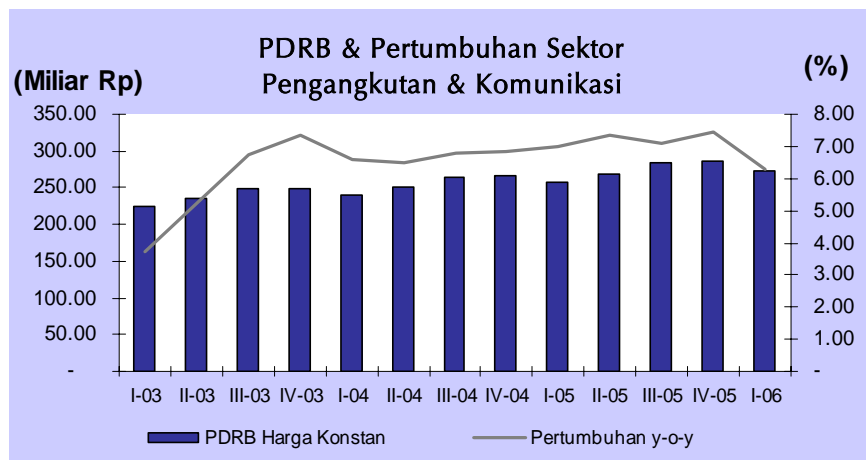
Pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan ke NTB menunjukkan trend yang semakin meningkat. Sejak tahun 2000 hingga 2005, jumlah wisatawan (mancanegara dan nusantara) yang berkunjung ke Lombok Barat (sebagai tempat mayoritas yang dikunjungi wisatawan) cenderung terus mengalami peningkatan, kecuali pada awal tahun 2003 yang jumlahnya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengaruh dari peristiwa bom Bali I yang terjadi pada bulan Oktober 2002 dan pada akhir tahun 2005 pasca peristiwa bom Bali II. Saat ini, kondisi kepariwisataan NTB semakin membaik. Pada tahun 2006, kunjungan wisatawan asing dan domestik ditargetkan mencapai 290 ribu orang dan sejumlah 40 ribu diantaranya diharapkan dari wisatawan asing. Setiap tahun, secara umum dalam situasi normal, angka kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Dari data dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lombok Barat saja terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat pada tahun 2005 mencapai 222.730 orang, meningkat 11% dibandingkan tahun 2004 sebanyak

200.240 orang. Dari jumlah tersebut, wisatawan asing mendominasi sekitar 60% (134.531 orang). Wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari Eropa seperti Jerman, Belanda, Italia, Inggris, disusul dari kawasan Asean, Asia Pasifik dan Amerika. Tempat terfavorit di Lombok Barat yang dikunjungi adalah Senggigi (81,36%), Gili Terawang (10,74%), dan tempat lainnya seperti Gili Meno, Gili Air, Tanjung, Narmada, Sekotong dan Bayan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah tamu yang menginap di hotel dan aktivitas penjualan makanan oleh restoran.

1.3.4.4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor bangunan, dengan angka pertumbuhan sebesar 6,27%. Sumbangan yang diberikan oleh sektor ini terhadap perekonomian NTB mencapai 0,47%. Selama 3 tahun terakhir, angka pertumbuhan sektor ini secara konsisten berada di atas 5%, yang dapat dilihat pada Grafik 1.12.

Grafik 1.12



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

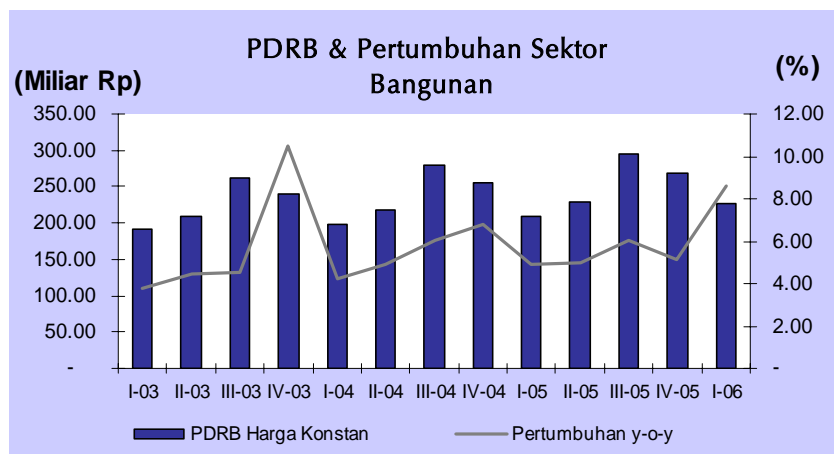
Pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan ini didorong oleh pertumbuhan angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara. Terkait dengan penggunaan jasa angkutan darat dan laut yang terjadi pada triwulan ini, dipicu oleh masih banyaknya kebutuhan barang-barang kebutuhan masyarakat NTB yang didatangkan dari luar daerah, apalagi pada triwulan ini kebutuhan tersebut meningkat seiring dengan perayaan beberapa peristiwa keagamaan. Dari angkutan udara, persaingan tarif penerbangan mendorong penurunan harga jasa angkutan udara sehingga alat transportasi ini relatif lebih dipilih oleh masyarakat yang ingin mengadakan perjalanan jauh. Di samping itu, cenderung meningkatnya kunjungan wisatawan ke NTB sebagaimana yang ditargetkan pada tahun 2006 baik wisatawan domestik maupun mancanegara, serta adanya beberapa kegiatan pertemuan beberapa partai politik juga turut berpengaruh terhadap perkembangan sektor ini. Selain itu, di sub sektor komunikasi, masih berlangsungnya ekspansi

jaringan operator seluler memberikan kontribusi terhadap perkembangan komunikasi. Saat ini jaringan yang menggunakan layanan CDMA dengan tarif yang lebih murah dari GSM, sedang berkembang di Mataram. Perluasan jaringan tersebut akan diarahkan pula ke Pulau Sumbawa. PT Telkom dalam hal ini sebagai penyedia jasa telah berencana membangun tower flexi di wilayah Sumbawa, terkait dengan tingginya tingkat permintaan masyarakat akan fasilitas tersebut.

1.3.4.5. Sektor Bangunan

Sektor bangunan merupakan sektor yang tertinggi pertumbuhannya pada triwulan I-2006, yang mencapai 8,64% dan memberikan sumbangan sebesar 0,53% terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Dari Grafik 1.13 terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sektor ini secara konsisten mengalami pertumbuhan di atas 4%, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang berpotensi untuk terus berkembang. Dalam kurun waktu tersebut, trend pergerakan pertumbuhan sektor ini tidak terlalu berfluktuasi. Salah satu indikator pertumbuhan di sektor bangunan adalah realisasi proyek-proyek swasta, terutama menjamurnya pembangunan ruko-ruko baru di Mataram. Pembangunan ruko-ruko tersebut diharapkan dapat menjadi mata rantai guna mendukung terwujudnya rencana pengembangan Kota Mataram sebagai pusat perbelanjaan dalam konsep belanja wisata yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Pertumbuhan sektor bangunan ini mengindikasikan bahwa tingginya harga bahan bangunan dan meningkatnya upah tenaga kerja saat ini tampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap pesatnya pertumbuhan di sektor bangunan.

Grafik 1.13



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Disamping pengaruh dari realisasi pembangunan proyek-proyek pihak swasta, pertumbuhan ini didorong pula oleh peningkatan pendanaan dari perbankan NTB, tercermin dari jumlah kredit yang disalurkan kepada sektor konstruksi yang mengalami peningkatan. Pada triwulan I-2006, pertumbuhan kredit perbankan NTB yang disalurkan kepada sektor ini sebesar 4,97% (y-t-d).

Meskipun angka NPL sektor konstruksi cenderung tinggi (di atas 5%), prospek perkembangannya yang cukup baik pada sektor ini membuatnya cukup menarik untuk dibiayai perbankan. Hal ini terbukti dari tetap konsistennya pertumbuhan sektor ini meskipun pada periode sebelumnya terjadi kenaikan harga bahan bangunan yang cukup tinggi pasca kenaikan harga BBM.

1.3.4.6. Sektor Lainnya

Sektor lainnya seperti industri pengolahan; listrik, gas & air bersih; keuangan; persewaan & jasa perusahaan serta jasa-jasa juga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian NTB. Pada triwulan I-2006, sektor industri pengolahan tumbuh cukup tinggi, mencapai 6,49%, namun sumbangan yang diberikan relatif masih rendah, sebesar 0,19%. Pertumbuhan di sektor industri pengolahan ini terutama didorong oleh industri formal yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Pada tahun 2005, jumlah industri formal sudah mencapai 6.374 buah yang menyerap 54.950 tenaga kerja. Diperkirakan pada triwulan ini, peningkatan tersebut juga terjadi, seiring dengan peningkatan volume dan nilai ekspor hasil kerajinan NTB. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pada triwulan I-2006, volume hasil kerajinan NTB mencapai 107,66 ton dari 94,72 ton pada triwulan I-2005. Demikian pula nilai yang diekspor dari produk tersebut meningkat dari US\$ 109,37 ribu menjadi US\$ 143,14 ribu. Disisi lain, penyaluran kredit perbankan pada sektor industri pengolahan yang cukup signifikan pertumbuhannya, yaitu sebesar 38,71% mendorong pertumbuhan sektor tersebut pada triwulan ini.

Sementara itu, sektor listrik, gas dan air bersih juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan ini, yaitu sebesar 5,20%, dengan kontribusi terendah, hanya sebesar 0,02%. Pertumbuhan di sektor ini terutama didorong oleh pertumbuhan sub sektor listrik. Pada periode ini, permasalahan di sektor kelistrikan terkait dengan keterbatasan *supply* energi listrik telah dapat diatasi. Keterbatasan energi listrik tersebut dipicu antara lain karena kerusakan beberapa mesin pembangkit listrik yang berada di Tanjung Karang. Namun saat ini telah dilakukan perbaikan terhadap sebagian mesin yang rusak tersebut. Disamping itu, ekspansi PT PLN di Lombok Timur yang melayani kebutuhan listrik untuk 18.600 orang di wilayah itu setelah tidak beroperasinya lagi KLP Sinar Rinjani yang selama ini memasok kebutuhan listrik di Lombok Timur, turut mendorong pertumbuhan sub sektor listrik ini. Peningkatan pemasokan energi listrik juga terjadi di Kabupaten Bima, tepatnya di wilayah Kecamatan Wera yang melayani 2.500 pelanggan PT. PLN.

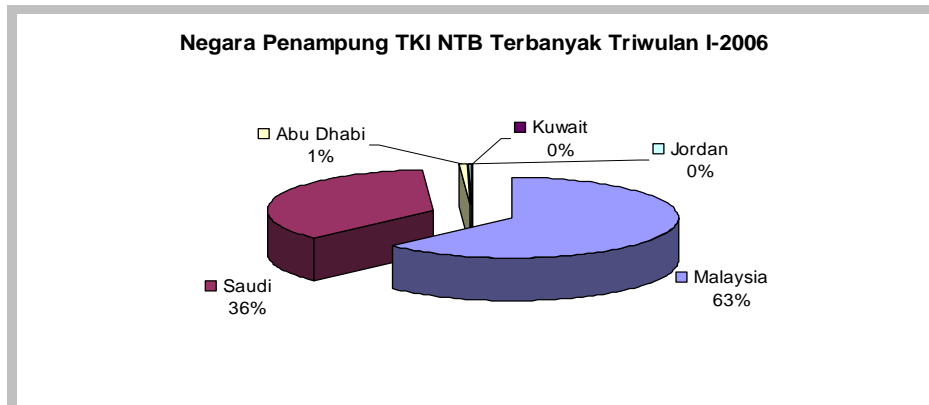
Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada triwulan ini tumbuh sebesar 5,41%. Dengan pertumbuhan tersebut, sektor ini hanya mampu menyumbang 0,27% terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Pertumbuhan sektor bangunan turut berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ini, karena didorong oleh meningkatnya jasa sewa bangunan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor ini. Sedangkan sektor jasa-jasa pada triwulan ini hanya tumbuh sebesar 0,48% dan memberikan sumbangan yang sangat kecil, hanya sebesar 0,06%.

1.4. TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI

Tenaga Kerja Indonesia di NTB memiliki peranan yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, pemasukan dari TKI ini setiap tahun jumlahnya cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari potensi NTB yang telah dikenal sebagai salah satu daerah potensial pengirim TKI. Dampak positif lain dari potensi tersebut adalah memberikan peluang bagi berkembangnya lembaga PJTKI, yang pada tahun 2005 berjumlah lebih dari 150 PJTKI yang resmi terdaftar dan beroperasi di NTB. Meskipun di sisi lain berdampak negatif antara lain semakin berkurangnya tenaga produktif di sektor pertanian atau bangunan serta dampak sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, pada triwulan I-2006, terdapat sekitar 19.365 orang lowongan bekerja di luar negeri. Dari lowongan tersebut, hanya dipenuhi sebanyak 61%. Jumlah TKI dari NTB yang ditempatkan bekerja di luar negeri pada periode ini hanya sebanyak 11.851 orang. Malaysia merupakan negara penampung TKI asal NTB terbesar, dimana sebanyak 7.444 orang (62,81%) dipekerjakan di negara ini. Saudi Arabia menempati urutan kedua yang mempekerjakan TKI NTB yang menampung sekitar 4.291 orang (36,21%), dan berikutnya adalah negara Abu Dhabi, Jordan dan Kuwait yang hanya mempekerjakan sedikit TKI dari NTB.

Grafik 1.14



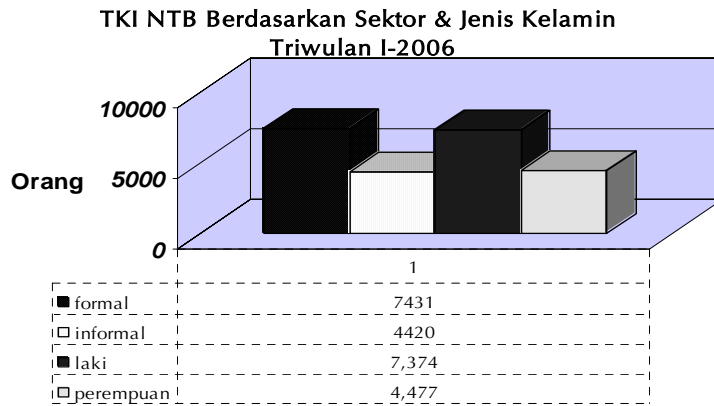
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

Dari penempatan TKI tersebut, menurut Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, pada triwulan I-2006, jumlah *remittance* yang mengalir ke NTB mencapai Rp 97 miliar. Malaysia sebagai negara terbesar penampung TKI NTB memberikan kontribusi *remittance* tertinggi sebesar Rp 70,94 miliar (73,14%) dan dari Arab Saudi sebesar Rp24,09 miliar (24,83%). Selain kedua negara tersebut, Kuwait, Singapura, Jepang, Jordan dan UEA serta beberapa negara lainnya juga berperan menyumbangkan *remittance* meskipun tidak cukup signifikan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari perbankan di NTB yang memberikan jasa transfer *remittance* dari TKI NTB, pada triwulan I-2006 jumlah *remittance* yang masuk lebih besar. Total *remittance* yang tercatat di perbankan NTB mencapai Rp 187,80 miliar. Jika dibandingkan dengan *remittance* nasional, yang pada tahun 2005 rata-rata setiap triwulannya mencapai US\$ 0.73 miliar

atau setara dengan Rp 6,53 triliun (asumsi nilai kurs per dollar AS sebesar Rp9.000,-), maka NTB menyumbang *remittance* sebesar 1,49% terhadap nasional. *Remittance* TKI pada tahun 2006 berasal dari TKI yang bekerja tersebar di berbagai negara yang didominasi oleh negara-negara Timur Tengah dan Malaysia.

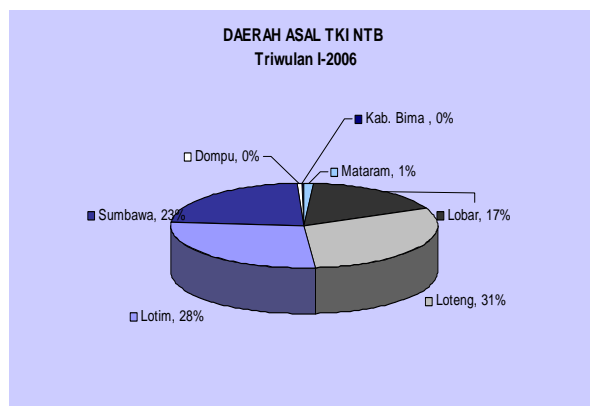
Grafik 1.15



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

Sementara itu, lowongan bekerja di luar negeri untuk pekerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan perbandingan 57,90% dan 42,10%. Hal ini disebabkan karena lowongan yang tersedia lebih membutuhkan pekerja di bidang petani perkebunan, konstruksi, *cleaning service*, peternakan dan pengemudi. Sedangkan tenaga kerja perempuan lebih terbatas pada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, operator dan *cleaning service*. Penempatan jumlah TKI NTB disesuaikan dengan jumlah kebutuhannya, dimana jumlah tenaga kerja laki-laki yang ditempatkan sebanyak 62,20 % dan sisanya 37,80% adalah perempuan. Pada triwulan ini, jumlah TKI NTB yang bekerja di sektor formal lebih banyak dibandingkan sektor informal. Di sektor formal dipekerjakan sekitar 7.431 orang (62,70%), sedangkan yang bekerja di sektor informal hanya 4.420 orang (37,30%).

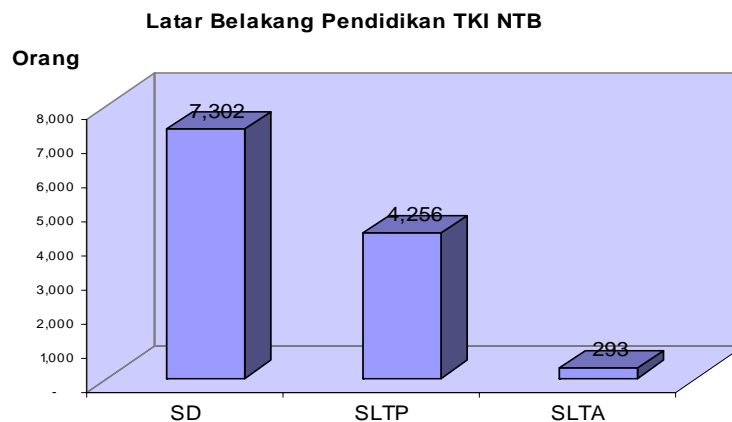
Grafik 1.16



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

Dilihat dari daerah asalnya, TKI di NTB, terbanyak berasal dari Lombok Tengah (31,00%), disusul oleh TKI dari Lombok Timur (28,00%) dan berikutnya dari Sumbawa (23,00%), Lombok Barat (17,00%), dan hanya sebagian kecil yang berasal dari Mataram dan Dompu.

Grafik 1.17



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

Pada umumnya TKI yang dikirim ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, tercermin dari mayoritas pendidikannya adalah lulusan SD (61,62%), SLTP (35,91%) dan SLTA (2,47%). Masalah rendahnya tingkat pendidikan TKI tersebut menyebabkan pengetahuan dan keterampilan para TKI menjadi sangat terbatas dan pada saat bekerja akhirnya banyak yang mengalami kendala/kesulitan.

BOKS-3**SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN/KOTA DI
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Segmentasi PDRB secara sektoral tiap daerah kota/kabupaten terhadap segmentasi PDRB sektoral propinsi digunakan untuk dapat melihat sektor-sektor mana di suatu kota/kabupaten dikatakan sektor unggulan/potensial atau andalan. Ukuran atau angka rasio/indeks tersebut lebih dikenal dengan angka Indeks *Location Quotient* atau disingkat Indeks LQ. Apabila angka indeks sektoral di suatu daerah di kabupaten lebih besar dari 1 (satu), maka dapat dikatakan sektor itu merupakan sektor unggulan di daerah tersebut dalam lingkup propinsi.

Tabel Boks 3.1

INDEKS LQ KAB./KOTA DI PROPINSI NTB TAHUN 2004

NO	SEKTOR	KABUPATEN						KOTA		
		LOBAR	LOTENG	LOTIM	SBW	SBW BRT	DOMPU	BIMA	BIMA	MTR
1	Pertanian	1.27	1.42	1.49	1.76	0.11	1.72	1.92	0.88	0.13
2	Pertambangan & Penggalian	0.13	0.12	0.15	0.09	3.27	0.09	0.12	0.01	0.00
3	Industri Pengolahan	0.95	1.50	1.72	0.98	0.05	0.98	1.04	1.34	2.21
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.44	0.94	1.02	1.44	0.06	0.90	0.71	2.63	2.77
5	Bangunan	1.56	1.65	1.12	1.64	0.13	1.19	1.08	1.12	1.16
6	Perdagangan, Hotel & Rest	1.64	1.31	1.20	1.27	0.11	1.35	1.23	1.47	1.41
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.31	0.70	0.90	0.82	0.13	0.84	0.95	1.84	3.90
8	Keuangan,Persewaan &Jasa Perush.	1.30	1.23	1.14	0.85	0.05	1.44	0.69	1.08	3.30
9	Jasa-jasa	1.22	1.62	1.56	1.11	0.06	1.26	0.97	2.22	1.48
	TOTAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber data : BPS Propinsi NTB

Dari perhitungan yang dilakukan terhadap data sektoral PDRB per kota/kabupaten di propinsi di NTB pada tahun 2004 dan rata-rata selama 5 tahun (2000-2004), diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kabupaten Lombok Barat unggul di hampir seluruh sektor, kecuali sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sektor unggulan dengan indeks LQ tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, tercermin dari berkembangnya sektor pariwisata di daerah tersebut. Dilihat dari rata-rata indeks LQ selama 5 tahun terakhir, sektor ini secara konsisten lebih unggul dibandingkan sektor lainnya, disusul oleh sektor bangunan. Selama kurun waktu tersebut, tidak terjadi perubahan struktur ekonomi yang signifikan di Lombok Barat.
- Terdapat 6 sektor unggulan di Kabupaten Lombok Tengah dengan angka indeks LQ lebih dari 1, yang tertinggi adalah sektor bangunan dan sektor jasa-jasa (terindikasi dari besarnya jasa pengerahan tenaga kerja keluar negeri). Kedua sektor tersebut secara konsisten memiliki indeks LQ tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2000 sampai dengan 2004.
- Di Kabupaten Lombok Timur, industri pengolahan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor unggulan dominan selain 4 sektor lainnya, yaitu sektor pertanian; perdagangan; listrik, gas dan air bersih; bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Secara rata-rata, indeks

LQ sektor-sektor unggulan tersebut tidak mengalami perubahan selama 5 tahun terakhir.

Tabel Boks 3.2

INDEKS LQ RATA-RATA KAB./KOTA DI PROPINSI NTB TAHUN 2000-2004

NO	SEKTOR	KABUPATEN						KOTA		
		LOBAR	LOTENG	LOTIM	SBW	SBW BRT	DOMPU	BIMA	BIMA	MTR
1	Pertanian	1.27	1.44	1.50	1.76	0.12	1.79	1.66	0.87	0.13
2	Pertambangan & Penggalian	0.14	0.12	0.15	0.09	3.43	0.09	0.11	0.01	0.00
3	Industri Pengolahan	0.95	1.45	1.72	0.99	0.06	1.00	0.96	1.37	2.30
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.43	0.91	0.99	1.49	0.07	0.89	0.63	2.59	3.01
5	Bangunan	1.57	1.68	1.15	1.65	0.13	1.15	0.97	1.11	1.13
6	Perdagangan, Hotel & Rest	1.66	1.30	1.22	1.28	0.12	1.30	1.13	1.48	1.44
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.19	0.61	0.79	0.75	0.12	0.71	1.43	1.65	3.67
8	Keuangan,Persewaan &Jasa Perush.	1.33	1.19	1.14	0.86	0.05	1.40	0.64	1.11	3.44
9	Jasa-jasa	1.25	1.64	1.54	1.10	0.06	1.25	0.88	2.30	1.50
	TOTAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber data : BPS Propinsi NTB

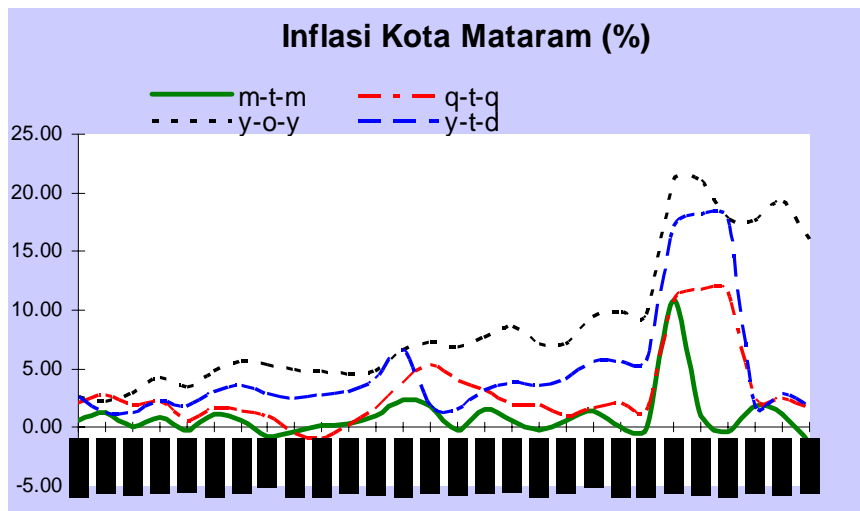
- Sektor pertanian dan sektor bangunan merupakan sektor unggulan dengan indeks LQ tertinggi di Kabupaten Sumbawa. Tiga sektor unggulan lainnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Seluruh sektor unggulan tersebut tidak mengalami perubahan struktur ekonomi di daerah ini.
- Sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun terakhir hingga kini ini adalah hanya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sementara sektor lainnya belum menjadi sektor unggulan.
- Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Dompu yang diikuti oleh sektor andalan lainnya yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa dan bangunan. Intensitas sektor pertanian dan perdagangan terlihat semakin menguat selama 5 tahun terakhir.
- Begitu pula dengan Kabupaten Bima yang bertumpu pada sektor pertanian sebagai sektor unggulan, diikuti sektor unggulan lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran; bangunan; dan industri pengolahan. Tampak pula pola pembangunan relatif stabil/stagnan yang tercermin dari stabilnya angka indeks LQ dalam kurun 5 tahun terakhir.
- Kota Bima yang termasuk kota termuda di Propinsi NTB terlihat banyak memiliki sektor unggulan yaitu sebanyak 7 sektor dengan indeks LQ tertinggi pada sektor listrik, gas dan air bersih dan jasa-jasa. Hanya 2 sektor yang tidak masuk dalam kategori sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Namun dalam kurun 5 tahun, sektor bangunan dan sektor pengangkutan & komunikasi terlihat perkembangan yang cukup berarti tercermin dari angka indeks LQ yang semakin meningkat.
- Di Kota Mataram, sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor unggulan saat ini. Sektor unggulan selanjutnya adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tercermin dari banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi di kota Mataram. Secara struktural, tidak banyak perubahan yang terjadi, hanya sektor listrik, gas dan air bersih yang terlihat kinerjanya semakin menurun.

BAB II EVALUASI PERKEMBANGAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT

2.1 GAMBARAN UMUM INFLASI DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mengawali tahun 2006, laju inflasi kota Mataram pada triwulan I-2006 mulai menunjukkan trend yang menurun dari posisi akhir tahun 2005. Penurunan yang sangat signifikan ini terlihat jelas, baik ditinjau secara triwulanan (q-t-q) dan kumulatif (Januari s.d Maret) hanya sebesar 1,63% maupun secara tahunan (y-o-y) sebesar 15,92%. Inflasi kumulatif (y-t-d) pada triwulan ini menyentuh titik terendah dalam 2 tahun terakhir, setelah yang terjadi pada awal tahun 2004 dan 2005. Bahkan secara bulanan (m-t-m) Kota Mataram mengalami deflasi sebesar -1,30%.

Grafik 2.1



Sumber : data BPS Pusat, diolah

Grafik 2.1 memperlihatkan trend pergerakan inflasi selama 2 tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, trend inflasi cenderung meningkat, terutama menjelang akhir tahun 2005, saat terjadi kenaikan yang sangat tajam, menyebabkan inflasi tahunan mencapai angka tertinggi pada bulan Oktober 2005 (21,05%) dan berlanjut terus hingga Desember 2005 (17,73%). Hal ini terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada bulan Oktober 2005 hingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga barang-barang secara umum. Namun sejak awal tahun 2006 meskipun angkanya masih positif, kecenderungannya mulai menurun, seiring dengan berkurangnya dampak kebijakan pemerintah tersebut dan mulai stabilnya kondisi perekonomian, yang tercermin dari terjadinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini, lebih baik dari triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi. Pada triwulan I-2006, secara tahunan, angka inflasi Kota Mataram telah berada di angka 15,92%.

Setelah terus merangkak naik sejak akhir Desember 2003, lonjakan yang sangat tajam terjadi di awal triwulan IV-2005 dan secara berangsur-angsur menurun pada akhir tahun 2005. Meskipun kembali terjadi sedikit peningkatan pada pertengahan triwulan I-2006, namun pada akhir triwulan terlihat adanya kecenderungan penurunan. Trend yang sama diperlihatkan pula oleh inflasi triwulanan (q-t-q), setelah mengalami peningkatan secara terus menerus dalam 2 tahun terakhir, pada triwulan ini terjadi penurunan yang sangat drastis dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan ini, inflasi triwulanan jatuh di level 1,63%, jauh lebih rendah dari posisi triwulan IV-2005 sebesar 11,44%. Meskipun cenderung lebih berfluktuasi dan melonjak lebih tinggi pada akhir tahun 2005, angka inflasi kumulatif Kota Mataram sejak Januari hingga Maret 2006 tidak berbeda dengan angka inflasi triwulanan, yaitu sebesar 1,63%. Sedangkan bila ditinjau secara bulanan, inflasi Kota Mataram tidak terlalu berfluktuasi secara signifikan dalam 2 tahun terakhir, lonjakan yang tinggi hanya terjadi di bulan Oktober 2005. Pada bulan Maret 2006, bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-t-m), di Kota Mataram telah terjadi penurunan harga barang-barang secara umum, sehingga terjadi deflasi sebesar -1,30%.

2.2 INFLASI INTI, INFLASI *VOLATILE FOOD*, INFLASI *ADMINISTERED PRICE*

Perkembangan inflasi secara triwulanan (q-t-q) di Kota Mataram pada triwulan I-2006 didominasi oleh pergerakan inflasi inti, diikuti oleh inflasi *volatile food* dan inflasi *administered price* dengan peranan masing-masing terhadap inflasi Kota Mataram sebesar 54,90%; 26,88% dan 18,22%. Namun apabila dilihat dari grafik 2.2 terlihat jelas lonjakan inflasi sejak triwulan III hingga IV pada tahun 2005, yang lebih disebabkan oleh inflasi *administered price* dan *volatile food*.

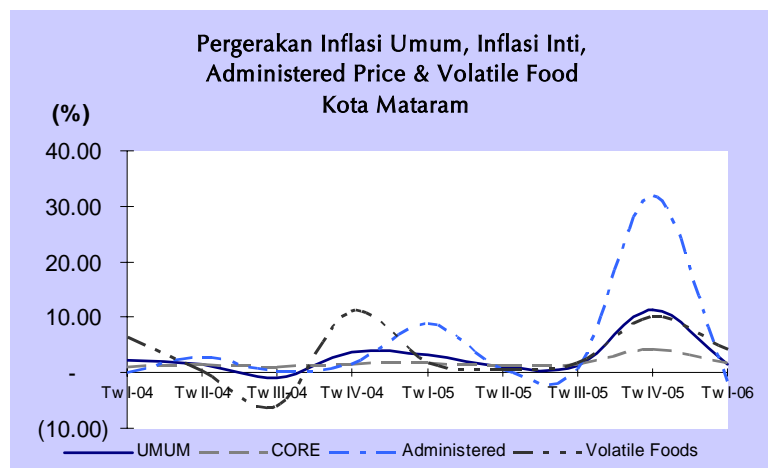
Baik inflasi inti, inflasi *volatile food* dan *administered price* trendnya mengalami penurunan pada triwulan I-2006 setelah mengalami lonjakan yang signifikan pada akhir tahun 2005. Inflasi inti Kota Mataram pada triwulan ini sebesar 1,87%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,27%, sebagai dampak kebijakan uang ketat oleh Bank Indonesia dalam meredam inflasi. Kondisi ini didukung oleh ekspektasi masyarakat terhadap harga barang secara umum yang diperkirakan akan menurun, setelah kenaikan yang tinggi pada triwulan IV-2005.

Sementara itu, inflasi *volatile food* pada triwulan I-2006 sebesar 4,32%, terjadi penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2005 yang mencapai 10,15%. Fluktuasi komoditi ini sangat dipengaruhi oleh faktor *seasonal*. Secara triwulanan, karakteristik NTB yang berbasis pertanian, faktor musiman ini memberikan dampak yang besar. Oleh karena itu, komoditi yang mendorong penurunan inflasi *volatile food* pada triwulan ini adalah hasil produksi pertanian, baik dari sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan dan perikanan. Curah hujan dan gelombang laut cukup mendukung nelayan untuk melaut dan mulainya musim panen mendominasi iklim NTB pada triwulan ini sehingga *supply* komoditi ini kembali normal dan mendorong deflasi yang cukup tinggi

pada triwulan ini. Komoditi tersebut antara lain adalah tomat sayur, cabe merah, kemiri, daging sapi, jeruk, kacang panjang, apel, ikan bandeng, cangkalang, cumi-cumi, kembung, lele dan teri.

Sedangkan inflasi *administered price*, yaitu kenaikan harga barang-barang tertentu yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada triwulan ini penurunannya paling tajam. Dari 31,84% pada triwulan IV-2005 menjadi -1,64% pada triwulan ini. Penurunan harga yang sangat signifikan terjadi pada komoditi minyak tanah, solar, bensin. Komoditi lainnya yang juga mengalami penurunan harga yang cukup tajam adalah angkutan dalam kota, angkutan antar kota, tarif taxi, semen dan beras. Terjaganya pasokan dan ekspektasi masyarakat terhadap komoditi tersebut telah kembali normal menjadi faktor penunjang inflasi pada kelompok *administered price*.

Grafik 2.2



Sumber : data BPS Pusat, diolah

2.3. INFLASI TRIWULANAN (Q-T-Q) KOTA MATARAM

2.3.1. Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram Triwulan I-2006

Inflasi triwulanan (q-t-q) pada akhir triwulan I-2006 tercatat sebesar 1,63%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 11,44%. Penurunan inflasi triwulanan pada triwulan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi seluruh kelompok komoditi dengan kisaran angka dari 0,09% sampai 3,65%. Bahkan pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar terjadi deflasi sebesar -0,51%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang kisarannya mencapai angka di atas 30%, seluruh kelompok komoditi pada triwulan ini hanya mengalami inflasi dibawah 4%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan disusul oleh kelompok bahan makanan dengan angka inflasi yang tidak berbeda jauh, masing-masing sebesar 3,65% dan 3,57%. Kelompok bahan makanan merupakan penyumbang inflasi tertinggi pada triwulan ini yaitu sebesar 1,04% dari total inflasi triwulanan. Sedangkan kelompok makanan jadi menyumbang sebesar 0,65%. Kelompok lainnya hanya mengalami inflasi di bawah 1%, yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,57%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar

0,30%, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,20% dan kelompok sandang sebesar 0,09%. Kelompok-kelompok tersebut hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap total inflasi dengan kisaran angka 0,01 sampai dengan 0,03%. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami deflasi sebesar -0,51%, dengan sumbangan yang juga negatif sebesar -0,13%.

Tabel 2.1

KOMODITI	TRW-04/05		TRW-01/06	
	INFLASI (q-t-q)	Sumbangan	INFLASI (q-t-q)	Sumbangan
	(%)	(%)	(%)	(%)
Bahan Makanan	10.03	2.94	3.57	1.04
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2.90	0.56	3.65	0.65
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	13.43	3.35	-0.51	-0.13
Sandang	1.97	0.10	0.09	0.00
Kesehatan	0.63	0.03	0.57	0.02
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	7.19	0.30	0.30	0.01
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	32.48	4.16	0.20	0.03
	11.44	11.44	1.63	1.63

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Tingginya sumbangan inflasi dari kelompok makanan jadi didorong terutama oleh kenaikan harga nasi, mie dan gula pasir dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,5%, 0,06% dan 0,03%. Faktor *cost push inflation* merupakan penyebab inflasi pada kelompok ini, terkait dengan masih berlangsungnya penyesuaian harga barang-barang hasil olahan sebagai dampak dari *second round inflation effect*. Faktor lain yang juga cukup berpengaruh adalah keterbatasan *supply* listrik dan gas. Keterbatasan *supply* listrik di NTB akhir-akhir ini dipicu oleh kerusakan 3 mesin pembangkit listrik di Tanjung Karang, meskipun saat ini telah tertangani sebagian karena salah satu mesin tersebut telah diperbaiki. Keterbatasan ini terjadi juga karena PT PLN melayani pasokan listrik di 9 kecamatan di Lombok Timur karena KLP Sinar Rinjani di Aikmel, Lombok Timur yang selama ini men-*supply* kebutuhan energi listrik di daerah tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Seringnya terjadi pemadaman listrik tersebut memberikan dampak terhadap industri pengolahan, terutama industri yang memerlukan tenaga listrik, termasuk beberapa industri makanan jadi.

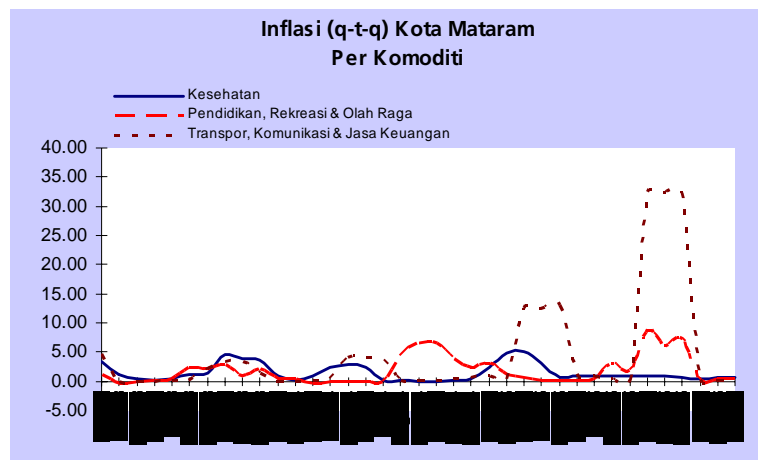
Sementara itu dari kelompok bahan makanan, inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga cabe rawit yang memberikan sumbangan sebesar 1,10%, bawang merah dengan sumbangan sebesar 0,21% dan bawang putih yang berkontribusi sebesar 0,04%. Inflasi yang terjadi di kelompok ini terkait dengan keterbatasan *supply* sehingga tidak sebanding dengan tingkat permintaan yang ada (*supply shortage*). Menurunnya persediaan bahan makanan pada triwulan I-2006 terkait dengan faktor seasonal, mengingat karakteristik wilayah Nusa Tenggara Barat yang sangat dipengaruhi oleh musim, di mana pada triwulan ini masih merupakan musim tanam. Di samping itu, terganggunya *supply* bahan makanan juga dipengaruhi oleh dampak dari bencana banjir (di Kabupaten Lombok

Timur, Sumbawa dan Bima) yang terjadi pada akhir bulan Januari 2006, sehingga mengakibatkan ratusan hektar lahan sawah petani mengalami kerusakan dan terancam gagal panen. Bencana banjir ini kembali terjadi di Kabupaten Sumbawa pada akhir bulan Februari 2006 yang menyebabkan rusaknya ratusan hektar sawah dan ratusan hektar areal tambak udang dan bandeng terendam air. Kerugian yang diderita masyarakat mencapai miliaran rupiah, mengingat masa panen hampir tiba (1 bulan lagi). Terganggunya jalur distribusi juga turut mendorong inflasi pada kelompok ini, karena banyak sarana umum seperti jalan raya yang belum diperbaiki/masih rusak. Sementara itu, dari sisi *demand*, pada triwulan ini permintaan terhadap bahan makanan mengalami peningkatan terkait dengan faktor seasonal, yaitu adanya beberapa perayaan seperti tahun baru Masehi, Hari Raya Idul Adha, peringatan tahun baru Hijriah, tahun baru Imlek, serta Hari Raya Nyepi oleh umat Hindu yang cukup banyak penganutnya di wilayah NTB.

2.3.2. Trend Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram

Grafik 2.2 menggambarkan trend inflasi triwulanan menurut jenis komoditi di Kota Mataram. Sebelum tahun 2005, pergerakan angka inflasi kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan cenderung stabil. Namun pada triwulan I-2005, terjadi *shock*, terkait dengan faktor komponen kelompok ini sebagai kelompok *administered price* yang dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tahap pertama pada awal Maret 2005 dengan kenaikan sekitar 30%. Dipicu oleh penyebab yang sama, namun dengan kenaikan yang jauh lebih tinggi yang berkisar 90%-100%, pada akhir tahun 2005 kembali terjadi fluktuasi dengan lonjakan yang sangat signifikan hingga menyentuh titik tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun dampak tersebut tidak berlangsung lama, terlihat pada triwulan I-2006 yang telah menurun tajam hingga berada di titik yang sangat rendah (1,63%), meskipun angkanya masih positif.

Grafik 2.3

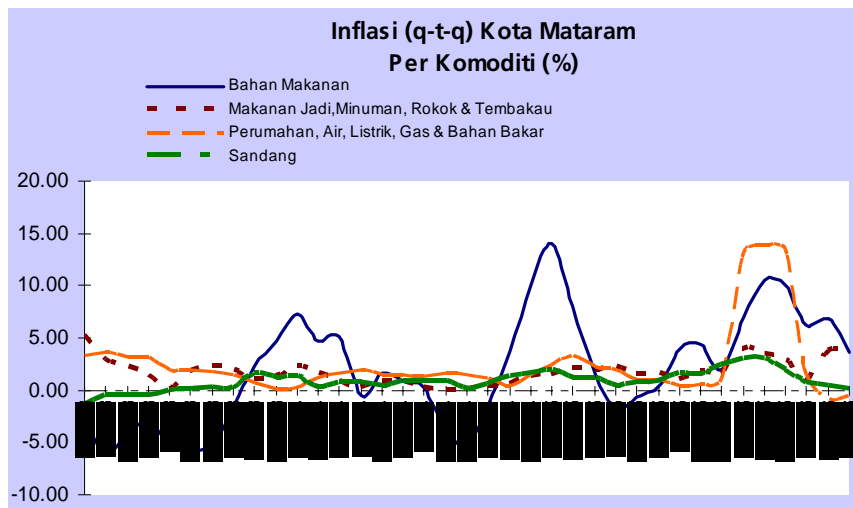


Sumber : data BPS Pusat, diolah

Sementara itu, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dan kesehatan memiliki trend fluktuasi dalam batasan *range* yang rendah (masih dibawah 10%) dan pada triwulan ini, kedua kelompok tersebut telah mencapai angka yang sangat rendah.

Mengamati perkembangan kelompok lainnya pada Grafik 2.3, kelompok yang terlihat paling berfluktuasi adalah kelompok bahan makanan. Kelompok ini memiliki pola yang sama di setiap akhir tahun, mengalami kenaikan yang cukup tajam. Hal ini terkait dengan faktor seasonal dari karakteristik wilayah NTB yang berpengaruh terhadap sisi *supply* bahan makanan (karena faktor cuaca/curah hujan yang berpengaruh terhadap musim tanam/panen produk-produk pertanian dan pengaruh gelombang laut/pasang-surut yang mempengaruhi hasil penangkapan ikan). Di samping itu, terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan makanan sehubungan dengan banyaknya perayaan seperti Natal, bulan puasa dan Idul Fitri. Namun demikian, pada triwulan ini hingga Maret 2006, terlihat penurunan inflasi dari kelompok ini, antara lain karena pada bulan Maret 2006, telah dimulai masa panen raya untuk produk-produk pertanian. Selain itu, kondisi daerah peternakan yang lebih subur di saat musim hujan tiba di sebagian besar wilayah Pulau Sumbawa juga turut mempengaruhi *supply* daging hasil peternakan seperti daging sapi, kerbau dan kambing.

Grafik 2.4



Sumber : data BPS Pusat, diolah

Pergerakan inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tampak stabil pada kisaran angka yang cukup rendah, hingga mengalami peningkatan cukup tinggi pada akhir tahun 2005, sebagai kelompok barang yang dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM, hingga mencapai posisi tertinggi sejak 3 (tiga) tahun terakhir. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Namun sebagaimana yang dialami kelompok lainnya, pada triwulan I-2006 sudah semakin menurun dan bahkan mengalami deflasi pada bulan Februari dan Maret 2006. Demikian pula kecenderungan yang sama terjadi pada kelompok barang sandang dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan

tembakau, meskipun terjadi kenaikan pada triwulan sebelumnya, namun tidak mengalami lonjakan yang berarti.

2.4. INFLASI TAHUNAN (Y-O-Y) KOTA MATARAM

Secara tahunan (y-o-y), angka inflasi pada triwulan I-2006 ini tercatat sebesar 15,92%, menurun secara perlahan dari triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,73%. Kelompok komoditi yang mengalami inflasi tertinggi secara tahunan adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 34,19%. Meskipun cukup tinggi, namun mengalami penurunan dari dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 50,49%.Kelompok ini memberikan sumbangan terbesar kedua sebesar 4,43% setelah kelompok bahan makanan sebesar 4,89%. Kelompok yang mengalami inflasi cukup tinggi setelah kelompok transport adalah kelompok bahan makanan sebesar 16,67%. Berikutnya adalah kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau masing-masing sebesar 15,30% dan 10,20% dengan kontribusi masing-masing sebesar 3,82% dan 1,96%. Sedangkan kelompok lainnya yang mengalami inflasi di bawah 10% adalah pendidikan, rekreasi dan olah raga, kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang masing-masing menyumbang dengan kisaran dibawah angka 0,30%.

Tabel 2.2

KOMODITI	TRW-04/05		TRW-01/06	
	INFLASI (y-o-y)	Sumbangan	INFLASI (y-o-y)	Sumbangan
	(%)	(%)	(%)	(%)
Bahan Makanan	14.45	4.30	16.67	4.89
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8.44	1.64	10.20	1.96
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	18.51	4.67	15.30	3.82
Sandang	6.57	0.32	5.46	0.26
Kesehatan	7.63	0.33	3.00	0.13
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	10.22	0.44	9.85	0.43
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	50.49	6.01	34.19	4.43
	17.73	17.73	15.92	15.92

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Dari kelompok transportasi dan komunikasi, komoditi yang mengalami inflasi tertinggi adalah solar (104,76%), bensin (87,50%) dan angkutan dalam kota (33,33%). Bensin merupakan penyumbang inflasi tertinggi dari kelompok ini dengan kontribusi sebesar 3,67%. Angka inflasi tahunan kelompok komoditi tersebut diperoleh dengan membandingkan inflasi saat ini dengan triwulan I-2005, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan harga komoditi tersebut merupakan efek dari kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Dari bahan makanan, penyumbang inflasi tertinggi adalah beras sebesar 1,70% dari total inflasi tahunan. Pada bulan Januari dan Februari 2006 di NTB harga beras mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Naiknya harga beras di tingkat pedagang ini disebabkan karena harga beli dari distributor beras juga meningkat karena persediaannya yang

semakin menipis. Hal ini merupakan akibat dari terbatasnya persediaan beras di NTB karena masa panen padi yang terlambat. Selain itu, pasokan beras dari luar NTB yang biasanya lancar pengirimannya juga mengalami keterlambatan. Menurunnya *supply* beras juga dipengaruhi oleh faktor cuaca yang buruk dan kegagalan panen petani pasca bencana banjir yang melanda beberapa daerah di NTB di awal triwulan ini. Bahkan di Kota Mataram harga beras standar menembus harga tertinggi hingga mencapai Rp5.500,- per kg dari harga semula sebesar Rp4.200,- per kg. Namun harga beras yang tinggi tersebut dapat mulai diredam pada bulan Maret 2006, saat harga beras sudah mulai menurun karena di beberapa daerah di NTB telah memasuki masa panen raya.

2.5. KOMODITI PENYUMBANG INFLASI DAN DEFLASI TERBESAR

Dari tabel 2.3 dapat dilihat 10 komoditi penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram pada triwulan I-2006 (q-t-q). Sumbangan terbesar berasal dari komoditi cabe rawit yang menyumbang 1,10% terhadap total inflasi, disusul oleh nasi (0,50%), bawang merah (0,21%), pasir (0,10%), mie (0,06%), kayu balokan (0,06%) dan seterusnya.

Tabel 2.3

No.	Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan I-2006	Sumbangan Thd Inflasi
	Sub Komoditi	(%)
1	Cabe Rawit	1.10
2	Nasi	0.50
3	Bawang Merah	0.21
4	Pasir	0.10
5	Mie	0.06
6	Kayu Balokan	0.06
7	Bawang Putih	0.04
8	Batu Bata/Batu Tala	0.04
9	Kontrak Rumah	0.03
10	Tongkol	0.03

Sumber : data BPS Pusat, diolah

Faktor-faktor yang mendorong tingginya sumbangan inflasi secara triwulanan komoditi dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi telah dibahas sebelumnya. Terkait dengan komoditi kayu, sumbangan inflasi dari komoditi ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat permintaan terhadap kayu NTB yang setiap tahun mengalami peningkatan, terutama dari negara-negara Eropa dan Asia Tenggara. Permintaan oleh pasar dalam negeri juga cukup besar, dimana sebagian permintaan tersebut ditujukan untuk diolah lagi menjadi produk kerajinan kayu, seperti patung, relief, lemari dan sebagainya, yang banyak diminati karena tetap menonjolkan ciri khas daerah dan artistik. *Supply* kayu balokan pada triwulan I-2006 ini sedikit terganggu akibat bencana banjir yang terjadi pada akhir Januari 2006. Di wilayah Kabupaten Lombok Timur, ratusan kubik kayu gelondongan dan kayu balokan ikut hanyut terbawa arus.

Tabel 2.4

No.	Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan I-2006	Sumbangan Thd Inflasi
	Sub Komoditi	(%)
1	Minyak Tanah	-0.39
2	Buku Bacaan/Pelajaran	-0.10
3	Jeruk	-0.08
4	Cabe Merah	-0.06
5	Salak	-0.05
6	Jagung Pipilan	-0.05
7	Apel	-0.03
8	Rokok Putih	-0.03
9	Telur Ayam Ras	-0.03
10	Rokok Putih	-0.03
11	Telur Ayam Ras	-0.03
12	Tomat Sayur	-0.03
13	Daging Sapi	-0.03

Sumber Data : BPS Pusat, diolah

Setelah mengalami inflasi yang tinggi pada triwulan sebelumnya, pada triwulan I-2006 angka inflasi seluruh kelompok komoditi cenderung mengalami penurunan dan sebagian dari komoditi-komoditi tersebut mengalami deflasi, dapat dilihat pada tabel 2.4. Komoditi tersebut adalah minyak tanah (0,39%), buku pelajaran (0,10%), jeruk (0,08%), cabe merah (0,06%), dan seterusnya. Deflasi ini lebih dipengaruhi oleh mulai normalnya kembali harga barang-barang tersebut setelah mengalami kenaikan yang tinggi pada triwulan sebelumnya.

2.6. PERBANDINGAN INFLASI KOTA MATARAM DENGAN KOTA TERDEKAT

Tabel 2.4

Perbandingan Inflasi Triwulan I 2006	Inflasi y-o-y (%)
Kediri	16.17
Mataram	15.92
Nasional	15.74
Malang	15.54
Jember	15.52
Kupang	15.31
Surabaya	13.59
Denpasar	10.76

Sumber Data : BPS Pusat, diolah

Pada triwulan I-2006 ini, laju inflasi tahunan di Kota Mataram sebesar 15,92%, masih berada sedikit di atas laju inflasi nasional sebesar 15,74%. Apabila dibandingkan dengan wilayah regional terdekat, inflasi kota Mataram pada triwulan ini adalah yang tertinggi kedua di antara daerah

BOKS 3**SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN/KOTA DI
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Segmentasi PDRB secara sektoral tiap daerah kota/kabupaten terhadap segmentasi PDRB sektoral propinsi digunakan untuk dapat melihat sektor-sektor mana di suatu kota/kabupaten dikatakan sektor unggulan/potensial atau andalan. Ukuran atau angka rasio/indeks tersebut lebih dikenal dengan angka Indeks *Location Quotient* atau disingkat Indeks LQ. Apabila angka indeks sektoral di suatu daerah di kabupaten lebih besar dari 1 (satu), maka dapat dikatakan sektor itu merupakan sektor unggulan di daerah tersebut dalam lingkup propinsi.

Tabel Boks 3.1

INDEKS LQ KAB./KOTA DI PROPINSI NTB TAHUN 2004

NO	SEKTOR	KABUPATEN						KOTA		
		LOBAR	LOTENG	LOTIM	SBW	SBW BRT	DOMPU	BIMA	BIMA	MTR
1	Pertanian	1.27	1.42	1.49	1.76	0.11	1.72	1.92	0.88	0.13
2	Pertambangan & Penggalian	0.13	0.12	0.15	0.09	3.27	0.09	0.12	0.01	0.00
3	Industri Pengolahan	0.95	1.50	1.72	0.98	0.05	0.98	1.04	1.34	2.21
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.44	0.94	1.02	1.44	0.06	0.90	0.71	2.63	2.77
5	Bangunan	1.56	1.65	1.12	1.64	0.13	1.19	1.08	1.12	1.16
6	Perdagangan, Hotel & Rest	1.64	1.31	1.20	1.27	0.11	1.35	1.23	1.47	1.41
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.31	0.70	0.90	0.82	0.13	0.84	0.95	1.84	3.90
8	Keuangan,Persewaan &Jasa Perush.	1.30	1.23	1.14	0.85	0.05	1.44	0.69	1.08	3.30
9	Jasa-jasa	1.22	1.62	1.56	1.11	0.06	1.26	0.97	2.22	1.48
	TOTAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber data : BPS Propinsi NTB

Dari perhitungan yang dilakukan terhadap data sektoral PDRB per kota/kabupaten di propinsi di NTB pada tahun 2004 dan rata-rata selama 5 tahun (2000-2004), diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kabupaten Lombok Barat unggul di hampir seluruh sektor, kecuali sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sektor unggulan dengan indeks LQ tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, tercermin dari berkembangnya sektor pariwisata di daerah tersebut. Dilihat dari rata-rata indeks LQ selama 5 tahun terakhir, sektor ini secara konsisten lebih unggul dibandingkan sektor lainnya, disusul oleh sektor bangunan. Selama kurun waktu tersebut, tidak terjadi perubahan struktur ekonomi yang signifikan di Lombok Barat.
- Terdapat 6 sektor unggulan di Kabupaten Lombok Tengah dengan angka indeks LQ lebih dari 1, yang tertinggi adalah sektor bangunan dan sektor jasa-jasa (terindikasi dari besarnya jasa pengerahan tenaga kerja keluar negeri). Kedua sektor tersebut secara konsisten memiliki indeks LQ tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2000 sampai dengan 2004.

- Di Kabupaten Lombok Timur, industri pengolahan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor unggulan dominan selain 4 sektor lainnya, yaitu sektor pertanian; perdagangan; listrik, gas dan air bersih; bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Secara rata-rata, indeks LQ sektor-sektor unggulan tersebut tidak mengalami perubahan selama 5 tahun terakhir.

Tabel Boks 3.2

INDEKS LQ RATA-RATA KAB./KOTA DI PROPINSI NTB TAHUN 2000-2004

NO	SEKTOR	KABUPATEN						KOTA		
		LOBAR	LOTENG	LOTIM	SBW	SBW BRT	DOMPU	BIMA	BIMA	MTR
1	Pertanian	1.27	1.44	1.50	1.76	0.12	1.79	1.66	0.87	0.13
2	Pertambangan & Penggalian	0.14	0.12	0.15	0.09	3.43	0.09	0.11	0.01	0.00
3	Industri Pengolahan	0.95	1.45	1.72	0.99	0.06	1.00	0.96	1.37	2.30
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.43	0.91	0.99	1.49	0.07	0.89	0.63	2.59	3.01
5	Bangunan	1.57	1.68	1.15	1.65	0.13	1.15	0.97	1.11	1.13
6	Perdagangan, Hotel & Rest	1.66	1.30	1.22	1.28	0.12	1.30	1.13	1.48	1.44
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.19	0.61	0.79	0.75	0.12	0.71	1.43	1.65	3.67
8	Keuangan,Persewaan &Jasa Perush.	1.33	1.19	1.14	0.86	0.05	1.40	0.64	1.11	3.44
9	Jasa-jasa	1.25	1.64	1.54	1.10	0.06	1.25	0.88	2.30	1.50
	TOTAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber data : BPS Propinsi NTB

- Sektor pertanian dan sektor bangunan merupakan sektor unggulan dengan indeks LQ tertinggi di Kabupaten Sumbawa. Tiga sektor unggulan lainnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Seluruh sektor unggulan tersebut tidak mengalami perubahan struktur ekonomi di daerah ini.
- Sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun terakhir hingga kini ini adalah hanya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sementara sektor lainnya belum menjadi sektor unggulan.
- Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Dompu yang diikuti oleh sektor andalan lainnya yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa dan bangunan. Intensitas sektor pertanian dan perdagangan terlihat semakin menguat selama 5 tahun terakhir.
- Begitu pula dengan Kabupaten Bima yang bertumpu pada sektor pertanian sebagai sektor unggulan, diikuti sektor unggulan lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran; bangunan; dan industri pengolahan. Tampak pula pola pembangunan relatif stabil/stagnan yang tercermin dari stabilnya angka indeks LQ dalam kurun 5 tahun terakhir.
- Kota Bima yang termasuk kota termuda di Propinsi NTB terlihat banyak memiliki sektor unggulan yaitu sebanyak 7 sektor dengan indeks LQ tertinggi pada sektor listrik, gas dan air bersih dan jasa-jasa. Hanya 2 sektor yang tidak masuk dalam kategori sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Namun dalam kurun 5 tahun, sektor bangunan dan sektor pengangkutan & komunikasi terlihat perkembangan yang cukup berarti tercermin dari angka indeks LQ yang semakin meningkat.

- Di Kota Mataram, sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor unggulan saat ini. Sektor unggulan selanjutnya adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tercermin dari banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi di kota Mataram. Secara struktural, tidak banyak perubahan yang terjadi, hanya sektor listrik, gas dan air bersih yang terlihat kinerjanya semakin menurun.

lainnya setelah Kediri yang mengalami inflasi sebesar 16,17%. Sementara itu, inflasi yang terjadi di kota lainnya tidak berbeda jauh dengan angka inflasi Kota Mataram dan inflasi nasional, seperti Malang (15,54%), Jember (15,52%), Kupang (15,31%). Sedangkan 2 kota yang terendah inflasinya pada triwulan ini adalah Surabaya (13,59%) dan Denpasar (10,76%). Hal ini lebih dipengaruhi oleh karakteristik wilayah NTB (Lombok dan Sumbawa) yang dikelilingi oleh lautan yang memisahkannya dengan daerah lain di Indonesia, sehingga sebagian besar kebutuhan konsumsi masyarakat diimpor melalui perdagangan antar daerah yang sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya transportasi dan ketersediaan jalur distribusi barang. Pada triwulan ini, distribusi barang terutama yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan daerah lainnya sedikit mengalami gangguan, pasca bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan sarana jalan raya untuk angkutan umum. Di samping itu, sangat tingginya pengaruh faktor musiman di NTB disebabkan oleh karakteristik perekonomian daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja perbankan regional pada triwulan I 2006 masih cukup baik, terlihat dari meningkatnya asset, dana pihak ketiga dan kredit, yang mengindikasikan adanya pergerakan aktivitas ekonomi ke arah yang lebih positif di Nusa Tenggara Barat, meskipun sempat mengalami tekanan pada awal tahun 2006. Disisi lain pertumbuhan penyaluran kredit yang relatif lebih tinggi dari penghimpunan dana turut pula menaikkan angka rasio LDR menjadi sebesar 85,20% yang jauh lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya sebesar 61,14%, namun risiko kredit (NPLs) cenderung menunjukkan trend peningkatan.

Perkembangan sistem pembayaran non tunai melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*) meningkat dari triwulan yang sama tahun sebelumnya, terutama dari *transfer send* (transaksi keluar) yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah aliran uang tunai yang masuk (*inflow*) ke Kantor Bank Indonesia Mataram akibat masuknya kembali uang kartal dari kegiatan *seasonal* yang terjadi pada akhir 2005 sehingga terjadi *net inflow* sebesar Rp160 miliar pada posisi triwulan I 2006, sedangkan peningkatan *transfer received* (transaksi masuk) diperkirakan dari masuknya dana-dana perimbangan dan yang digunakan untuk pembayaran lanjutan kompensasi BBM.

Sementara itu, perbandingan jumlah uang yang tidak layak edar terhadap aliran uang yang masuk (*inflow*) terjadi peningkatan dari sebesar 24,11% pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 24,58% pada triwulan berjalan. Sedangkan jumlah uang palsu yang tercatat di BI Mataram dalam 2 tahun terakhir ini, meningkat cukup signifikan, khususnya terhadap uang pecahan besar (Rp100.000,- dan Rp50.000,-).

3.1. Kinerja Perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Kinerja perbankan Nusa Tenggara Barat pada posisi triwulan I 2005 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q) ataupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) cukup baik, terlihat dari beberapa indikator utama perbankan seperti asset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang mengalami peningkatan.

Disisi lain, tingkat penyerapan dana bagi sektor riil terhadap penghimpunan dana masyarakat yang dikenal dengan istilah LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang sempat mengalami tekanan pada akhir 2005 kembali menunjukkan peningkatan pada posisi triwulan laporan yang tercatat sebesar 85,20% (LDR nasional 61,14%), hal ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan kembali normal sejalan meningkatnya aktivitas ekonomi.

Rasio NPLs (*gross*) perbankan pada triwulan I 2006 sebesar 2,81%, meskipun masih relatif jauh dari NPLs (*gross*) nasional yang tercatat sebesar 8,19%, namun cenderung menunjukkan trend peningkatan yang lebih disebabkan karena kualitas usaha yang menurun.

Tabel 3.1 - Indikator utama perbankan Nusa Tenggara Barat

KETERANGAN *)	Dec-02	Dec-03	Dec-04	Mar-05	Dec-05	Mar-06	q-t-q	y-o-y
I. Asset	3.30	3.76	4.66	4.54	5.50	5.68	3.39	25.18
1. Bank Umum	3.16	3.58	4.43	4.31	5.23	5.41	3.40	25.43
2. BPR	0.14	0.18	0.23	0.23	0.27	0.28	3.34	20.48
II. DPK	2.55	2.90	3.46	3.27	4.07	4.20	3.37	28.41
1. Bank Umum	2.48	2.81	3.34	3.15	3.92	4.06	3.37	28.62
2. BPR	0.07	0.09	0.12	0.12	0.14	0.15	3.38	23.01
III. Kredit	1.58	1.94	2.64	2.84	3.35	3.58	6.85	26.07
1. Bank Umum	1.48	1.81	2.48	2.67	3.15	3.37	6.82	26.22
2. BPR	0.10	0.13	0.16	0.17	0.20	0.22	7.30	23.71
IV. LDR	61.72	66.70	76.25	86.78	82.43	85.20	2.77	(1.58)
1. Bank Umum	59.37	64.25	74.23	84.60	80.34	83.03	2.68	(1.58)
2. BPR	148.47	141.78	131.67	143.48	139.41	144.69	5.28	1.21
V. NPLs (<i>gross</i>)	3.00	3.52	2.51	2.60	2.66	2.81	0.15	0.21
1. Bank Umum	2.19	2.65	1.89	1.90	2.05	2.21	0.16	0.31
2. BPR	14.91	15.59	12.15	13.37	12.30	12.30	0.00	(1.07)

*) kecuali LDR & NPL (%), triliun Rp.

3.2. Bank Umum

Perkembangan Bank Umum pada triwulan I 2006 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q) ataupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) menunjukkan *performance* (kinerja) yang cukup baik, terlihat dari peningkatan beberapa indikator utamanya yaitu total asset, penghimpunan dana pihak ketiga maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit, meskipun *Non Performing Loans* (NPL) sedikit memburuk yang disebabkan karena kondisi usaha debitur yang menurun. Meningkatnya biaya produksi dan turunnya permintaan masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya rasio NPLs tersebut.

3.2.1. Kelembagaan

Secara kelembagaan, jumlah institusi bank umum yang beroperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 15 (lima belas) bank yang terdiri dari 5 bank pemerintah & 10 bank swasta, dengan 1 (satu) kantor pusat (PT. Bank NTB) dan 32 kantor cabang lainnya yang juga disebut dengan kategori sebagai bank pelapor. Sedangkan berdasarkan kegiatan usahanya terbagi menjadi 28 kantor cabang konvensional dan 4 kantor cabang syariah.

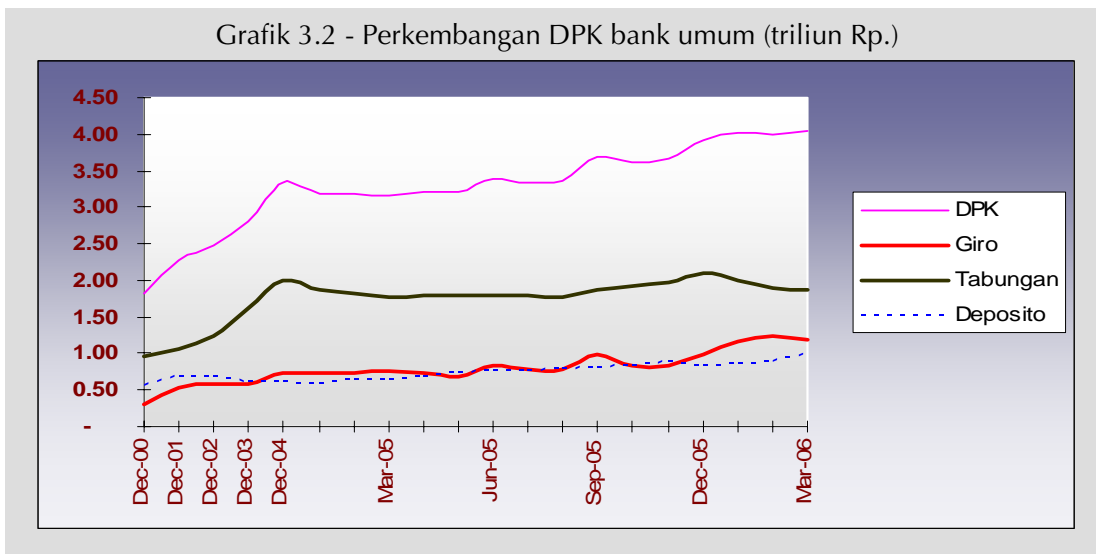
Jumlah kantor cabang pembantu (KCP) mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kantor akibat penutupan KCP) PT. Bank Danamon di Kota Bima sebagai dampak dari *redesign* dan faktor efisiensi, sehingga jumlah KCP bank umum menjadi sebanyak 35 kantor. Sementara itu, jumlah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dioperasikan oleh kantor bank umum yang ada di NTB guna menunjang kelancaran arus perputaran uang di masyarakat, jumlahnya relatif sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu sebanyak 101 buah mesin ATM. Pada umumnya, bank-bank tersebut menggunakan fasilitas ATM bersama, sehingga nasabah bank tertentu dapat bertransaksi melalui ATM di bank lainnya yang sama-sama menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu layanan bank terutama yang tidak memiliki banyak jaringan kantor di daerah yang sekaligus upaya efisiensi.

3.2.2. Asset

Total asset bank umum sampai dengan posisi triwulan I 2006 bertambah sebanyak 3,40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q) yaitu menjadi sebesar Rp5,41 triliun atau meningkat sebesar 25,43% dibandingkan dengan posisi triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga dari sisi aktiva dan penyaluran kredit pada sisi pasiva. Komposisi total asset juga turut dipengaruhi oleh penempatan dana antar kantor baik aktiva maupun pasiva.

Komposisi asset Bank Umum berdasarkan lokasi kantor bank, masih terkonsentrasi di ibukota Propinsi NTB yaitu di Kota Mataram (termasuk Kabupaten Lombok Barat) sebesar 61,10%, disusul Kabupaten Sumbawa (termasuk Sumbawa Barat) sebesar 10,91%, Kabupaten Bima (termasuk Kota Bima) sebesar 10,41%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 6,97%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 6,59% dan terkecil di Kabupaten Dompu yang hanya sebesar 4,03%.

3.2.3. Dana Pihak Ketiga

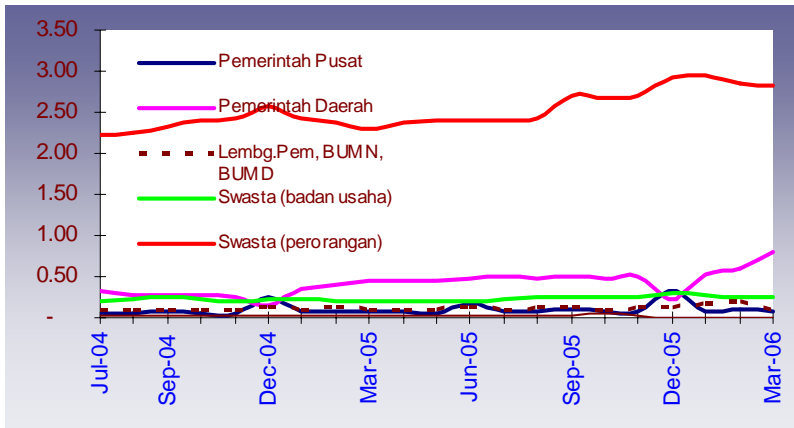


Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank umum menunjukkan trend peningkatan, dimana pada posisi triwulan I 2006 tercatat sebesar Rp4,06 triliun, dengan komposisi terbesar yang dihimpun dalam bentuk tabungan sebesar 46,27%, disusul deposito sebesar 24,14% (menggeser posisi giro pada triwulan sebelumnya) dan terkecil dalam bentuk giro sebesar 18,02%.

Peningkatan sumber dana pihak ketiga tersebut lebih didorong oleh meningkatnya giro yang diperkirakan berasal dari dana perimbangan (dana alokasi umum/DAU dan dana alokasi khusus/DAK) yang digunakan untuk pembiayaan APBD regional (Propinsi, Kota/Kabupaten), sedangkan deposito meskipun terlihat terjadi peningkatan namun lebih disebabkan karena adanya pergeseran dana dari tabungan (trend menurun) karena pergerakan suku bunga deposito yang masih tertahan pada posisi tinggi karena pengaruh BI Rate yang masih ketat (12,75%), namun pergeseran ini memungkinkan bagi bank umum untuk lebih leluasa dalam mengelola sumber dananya dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari tabungan yang sifatnya lebih *volatile*.

Perkembangan golongan pemilik DPK dalam 6 bulan terakhir, menunjukkan bahwa

Grafik 3.3 - Perkembangan golongan pemilik DPK BU (miliar Rp.)



kepemilikan perseorangan meskipun sempat terjadi peningkatan sampai akhir 2005 karena pengaruh kenaikan suku bunga, namun pada triwulan I 2006 menunjukkan trend penurunan yang diperkirakan untuk membiayai kegiatan usaha, daripada menggunakan sumber dana

yang berasal dari pinjaman, karena suku bunganya relatif masih belum normal. Sedangkan menurunnya golongan pemilik dana yang berasal dari pemerintah daerah pada akhir 2005 lebih disebabkan karena realisasi atas pembayaran proyek-proyek pemda, namun kembali meningkat karena adanya dislokasi DAU ataupun DAK dari pemerintah pusat.

Sementara itu, dominasi sektor pemerintah pada sumber

dana yang berasal dari giro yaitu mencapai sebesar 68,71% dimana sebagian besarnya (56,45%)

Tabel 3.2 - Komposisi golongan pemilik dana (%)

Keterangan	DPK	Giro	Tab.	Dep.
I. Penduduk	99.72	99.73	99.68	99.77
A. Sektor Pemerintah	23.95	68.71	0.02	14.97
1. Pemerintah Pusat	1.96	6.42	-	0.25
2. Pemerintah Daerah	19.44	56.45	0.00	11.34
(i) Pemda Tk.I	5.24	9.37	-	10.21
(ii) Pemda Tk.II	14.20	47.08	0.00	1.12
3. Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD.	2.56	5.84	0.02	3.39
B. Sektor Swasta	75.76	31.01	99.66	84.80
1. Perusahaan, yayasan, koperasi	5.58	9.08	2.24	7.70
2. Perseorangan	69.77	20.80	97.39	76.85
3. Lainnya	0.41	1.13	0.03	0.25
II. Bukan Penduduk	0.28	0.27	0.32	0.23

berasal dari pemerintah daerah. Hal ini merupakan cerminan bahwa aktivitas perekonomian di NTB masih relatif bergantung dari dana-dana yang berasal dari APBD, mengingat kegiatan transaksi bisnis pada umumnya menggunakan media cek/bilyet giro. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan dan deposito lebih didominasi oleh sektor swasta terutama dari perseorangan.

Bank Pemerintah lebih dominan dalam menghimpun sumber dana pihak ketiga baik dari sisi deposito, tabungan apalagi giro. Hal ini mencerminkan bahwa eksistensi bank yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah masih mendapat tempat di hati masyarakat. Sedangkan penghimpunan dana melalui bank pemerintah menunjukkan trend penurunan yang bergeser ke arah bank pemerintah.

Sebaran penghimpunan dana berdasarkan lokasi kantor bank pelapor, seperti pada triwulan sebelumnya yang masih terkonsentrasi di Kota Mataram/Kab.Lombok Barat yang mencapai lebih dari 50% dari jumlah dana yang masuk ke bank umum, menandakan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi masih terpusat di Ibukota Propinsi.

Tabel 3.3 - Komposisi penghimpunan dan sebaran dana pihak ketiga (%)

Keterangan	DPK	Giro	Tabungan	Deposito
Penghimpunan dana				
Bank Pemerintah (termasuk BPD)	78.61	94.01	76.89	63.02
Bank Swasta Nasional	21.39	5.99	23.11	36.98
Sebaran dana (%)				
1) Kodya Mataram/Lombok Barat	63.41	53.04	58.06	86.38
4) Kab. Sumbawa/Sumbawa Barat	12.65	16.11	14.21	5.41
3) Kab/Kota Bima	8.65	9.54	10.43	4.16
5) Kab. Lombok Timur	7.62	10.13	9.18	1.54
6) Kab. Lombok Tengah	4.97	7.67	5.40	0.83
2) Kab. Dompu	2.70	3.52	2.72	1.67

Perkembangan kesadaran menabung di Nusa Tenggara Barat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan, terlihat dari rasio jumlah penabung dengan pendekatan jumlah rekening tabungan di bank umum terhadap jumlah penduduk yaitu sebesar 22,37% pada triwulan I 2006. Namun apabila beranggapan (asumsi) satu keluarga berjumlah 4 orang penduduk, maka rasio kesadaran menabung per keluarga tercatat sebesar 89,48% pada triwulan I 2006, artinya hampir seluruh keluarga di NTB (89,48%) sudah terlayani oleh jaringan kantor bank umum termasuk juga kantor BRI Unit.

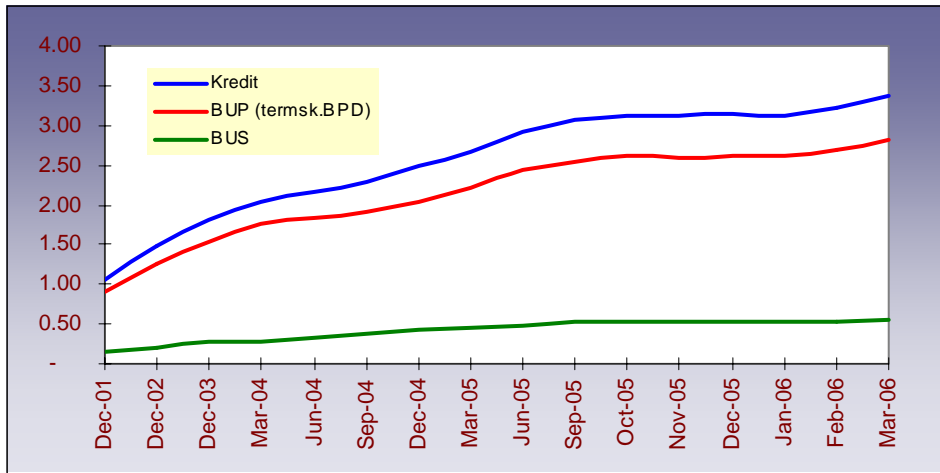
Tabel 3.4 - Perkembangan jumlah rekening DPK Bank Umum

Keterangan	Dec-01	Dec-02	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Mar-06
Giro	12,885	13,243	13,620	13,452	12,955	13,941
Tabungan	757,884	824,590	920,700	891,814	921,358	927,701
Deposito	13,798	12,325	9,859	8,560	8,765	9,183
Jumlah Penduduk &)	3,862,854	3,929,774	4,005,360	4,076,040	4,147,102	4,147,102
Rasio Kesadaran menabung *)	19.62	20.98	22.99	21.88	22.22	22.37

*) *Jml rek.tab./jml penduduk*
&) 2005 & 2006 angka proxy

3.2.4. Kredit

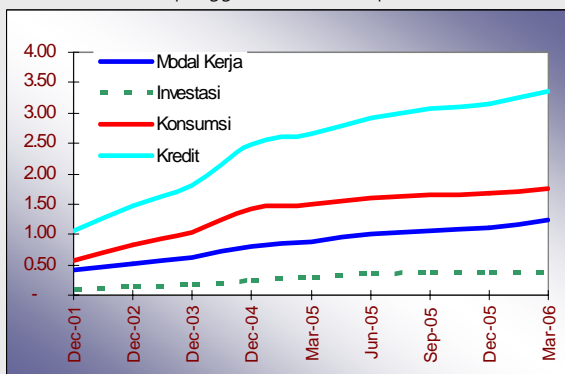
Grafik 3.4 - Perkembangan kredit di NTB (triliun Rp.)



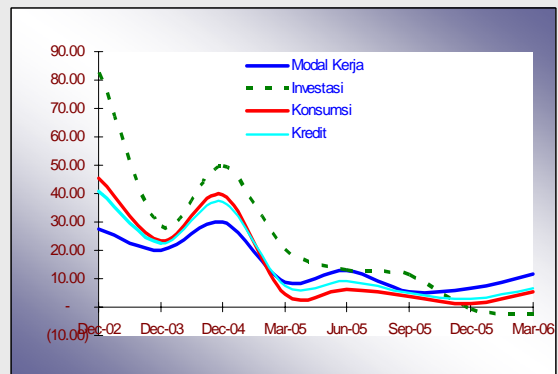
Pertumbuhan kredit di Nusa Tenggara Barat masih cukup baik, meskipun sempat mengalami perlambatan pada akhir 2005 dan sedikit terjadi kontraksi pada awal triwulan I 2006, namun kembali normal pada akhir triwulan I 2006. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas sektor riil telah berjalan meskipun sempat terjadi *shock* akibat imbasan kenaikan harga BBM pada akhir triwulan III 2005 yang lalu.

Bank umum yang dimiliki pemerintah (BUP) masih menjadi *market leader* dan terus menunjukkan trend yang meningkat, sedangkan bank umum milik swasta (BUS) cenderung lebih konservatif dalam penyaluran dananya, terlihat dari pertumbuhannya yang cenderung melambat dan relatif tidak lebih ekspansif daripada bank milik pemerintah. Hal ini merupakan karakteristik bank umum di Nusa Tenggara Barat, dimana penyaluran kredit lebih didominasi ke sektor konsumtif yang terkonsentrasi terutama pada debitur yang berpenghasilan tetap, sehingga kurang begitu memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi karena efek multipliernya yang relatif tidak begitu besar. Namun demikian, mulai terjadi pergeseran pertumbuhan penyaluran kredit dari sektor konsumtif ke sektor

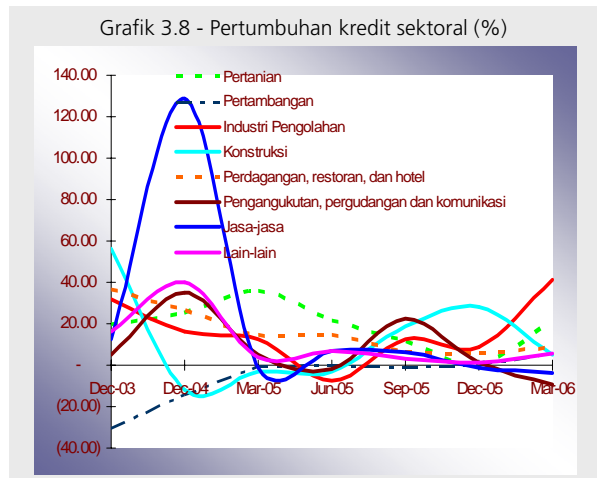
Grafik 3.5 - Perkembangan outstanding kredit jenis penggunaan (triliun Rp.)



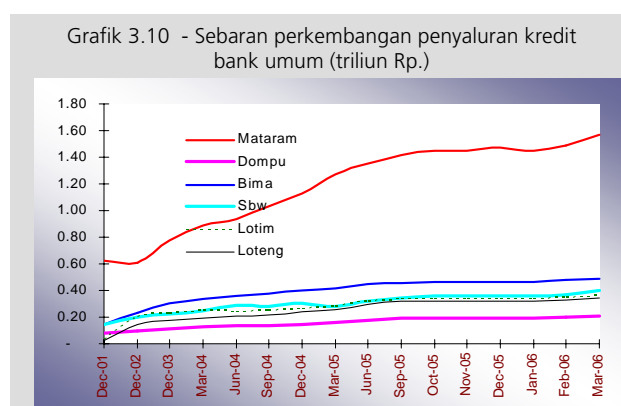
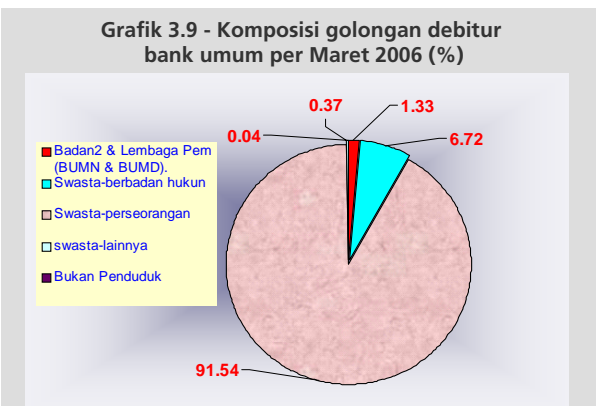
Grafik 3.6 - Pertumbuhan kredit menurut jenis penggunaan (%)



yang lebih produktif terutama modal kerja, terlihat dari data 12 bulan terakhir dimana penyaluran kredit ke sektor konsumsi mulai melambat dan trendnya menunjukkan penurunan. Pergeseran akan menjadi lebih cepat lagi, apabila terdapat sektor usaha besar (industri berskala besar) di NTB yang saat ini cenderung lebih didominasi ke sektor UMKM.



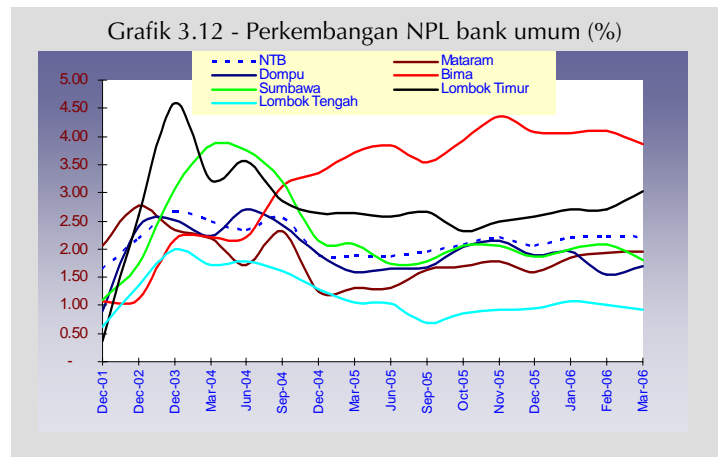
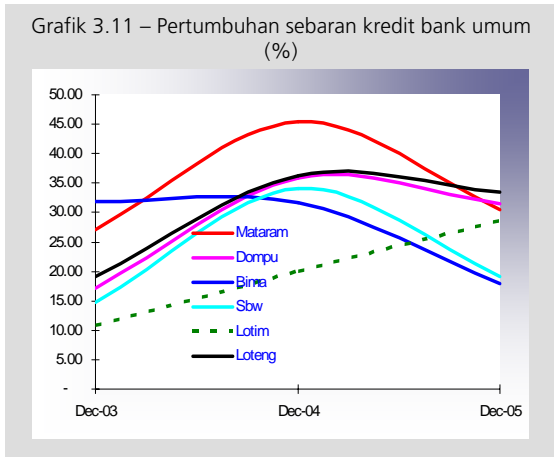
Secara sektoral, tidak berbeda dengan penyaluran kredit menurut jenis penggunaannya yang lebih terkonsentrasi di sektor lain-lain (konsumsi), meskipun secara nominal terjadi peningkatan namun perkembangannya cenderung mulai menurun ke arah yang lebih produktif seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tampak menunjukkan laju pertumbuhan secara signifikan dan sektor pertanian. Sedangkan pertumbuhan kredit sektoral pada triwulan I 2006 (grafik 3.8) dibandingkan triwulan sebelumnya, tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian yang masing-masing tumbuh lebih dari 20%, sedangkan sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi terjadi kontraksi (pertumbuhan negatif).



Sementara itu, golongan penerima kredit bank umum sebanyak 91,54% dinikmati oleh perseorangan, disusul kelompok swasta yang berbadan hukum sebanyak 6,72% dan sisanya terbagi oleh kelompok swasta lainnya dan golongan bukan penduduk.

Sedangkan perkembangan sebaran penyaluran kredit bank umum berdasarkan lokasi kantor bank pelapor, hampir separuhnya (46,50% per Maret 2006) masih terkonsentrasi di Kota Mataram/Kabupaten Lombok Barat yang merupakan pusat kegiatan bisnis di Nusa Tenggara Barat,

meskipun secara nominal pada triwulan I 2006 (Maret 2006) terlihat mulai meningkat setelah sedikit tertekan pada akhir 2005 dan awal tahun 2006, namun pertumbuhannya bersama dengan daerah tingkat II lainnya menunjukkan trend perlambatan bahkan cenderung menurun kecuali daerah Lombok Timur, sebagaimana tercermin pada grafik 3.11, hal ini diperkirakan berpengaruh positif terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2005 dibandingkan tahun sebelumnya.



Sementara itu, risiko kredit bank umum yang diukur dari rasio *Non Performing Loans* (NPLs) yaitu perbandingan antara jumlah kredit non lancar dengan total kredit yang disalurkan, dalam 2

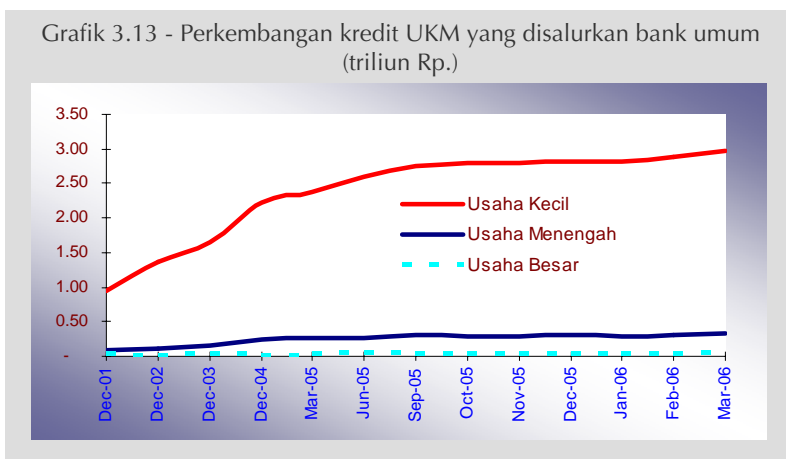
Tabel 3.5 - Penyaluran kredit berdasarkan lokasi kantor bank umum

Keterangan	NTB	Mataram	Dompu	Bima	Sbw	Lotim	Loteng
Kredit	3,367	1,566	206	491	400	364	341
Pangsa	100.00	46.50	6.11	14.59	11.87	10.80	10.13
NPL	2.21	1.95	1.70	3.86	1.80	3.03	0.93
Jenis Penggunaan							
Modal kerja	1,250	601	83	193	138	141	94
NPL	3.11	2.53	1.46	5.07	2.81	5.07	1.52
Investasi	352	152	41	37	79	3	39
NPL	2.80	3.91	1.24	5.14	1.24	4.27	0.94
Konsumsi	1,766	813	81	262	182	220	208
NPL	1.31	1.16	1.30	2.19	1.28	1.56	0.54
Sektor Ekonomi							
Pertanian	173	42	73	22	7	17	12
NPL	2.55	2.10	1.44	4.09	5.51	4.82	3.13
Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0
NPL	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	46	35	1	8	1	0	1
NPL	1.58	1.68	-	1.08	0.72	34.25	0.70
Listrik, gas & air	2	2	0	0	0	0	0
NPL	-	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	51	48	0	0	2	0	1
NPL	4.76	4.39	-	-	0.24	-	-
Perdagangan, restoran, dan hotel	1,128	496	45	196	204	106	82
NPL	3.32	2.51	2.33	6.01	2.12	6.01	1.89
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	26	21	1	1	3	0	0
NPL	1.64	0.71	11.62	0.66	3.76	-	46.67
Jasa-jasa dunia usaha	126	101	1	2	0	21	1
NPL	4.01	4.41	-	9.66	5.49	1.80	3.69
Jasa-jasa sosial/masyarakat	44	7	0	0	0	0	36
NPL	0.70	3.32	-	-	-	-	0.20
Lain-lain	1,770	814	84	262	182	220	208
NPL	1.33	1.18	1.49	2.19	1.28	1.56	0.54
<i>Nominal (miliaran Rp.)</i>							
<i>Pangsa & NPL (%)</i>							

tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan (memburuk), dimana pada posisi Desember 2004 baru mencapai sebesar 1,89% meningkat menjadi sebesar 2,05% pada akhir 2005 dan kembali meningkat pada posisi triwulan I 2006 menjadi sebesar 2,21% (NPLs nasional 8,19%). Peningkatan ini menandakan bahwa kualitas kredit debitur (sektor riil) cenderung memburuk yang lebih disebabkan akan meningkatnya risiko bisnis karena menurunnya kondisi usaha debitur. Secara regional NTB, pada posisi triwulan I 2006 NPLs tertinggi terjadi pada bank umum yang berlokasi di daerah Bima yaitu mencapai sebesar 3,86%, artinya risiko bisnis di Kota/Kabupaten Bima cenderung lebih tinggi dari daerah lainnya di regional NTB, sedangkan NPLs terendah terjadi pada bank umum di daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Dari sisi jenis penggunaannya, risiko kredit non lancar yang disalurkan dalam bentuk modal kerja, relatif paling besar tercermin dari posisi angka rasio NPLs saat ini, disusul kredit investasi dan terkecil pada kredit konsumsi. Secara sektoral, rasio kredit non lancar terbesar ditempati sektor konstruksi, disusul sektor jasa-jasa dunia usaha dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara regional, kredit bermasalah secara sektoral tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu yang mencapai angka masing-masing sebesar 46,67% dan 11,62%, disusul sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai angka 34,25% dan sektor jasa-jasa dunia usaha yang terjadi di Kabupaten/Kota Bima sebesar 9,66%. Hal ini mengindikasikan bahwa di beberapa daerah untuk sektor-sektor dimaksud mengharuskan perbankan khususnya bank umum untuk lebih hati-hati (*prudent*) dalam menyalurkan kreditnya.

Sementara itu, perkembangan kredit yang disalurkan oleh Bank Umum pada Sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dengan pendekatan plafon kredit yang disalurkan per debitur sampai



dengan Rp500 juta untuk kredit usaha kecil dan plafon kredit antara Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar untuk kredit usaha menengah, menunjukkan trend yang meningkat terutama pada akhir triwulan I 2006, meskipun agak melambat pada akhir 2005 dan awal tahun 2006 untuk kredit usaha kecil, sedangkan

kredit pada sektor usaha menengah dan usaha besar cenderung stabil. Dari sebesar Rp3,37 triliun (sebanyak 159.174 rekening/debitur) kredit yang disalurkan bank umum di NTB pada posisi triwulan I 2006, sebanyak 88,45% disalurkan ke sektor usaha kecil (termasuk konsumsi), disusul 9,78% ke sektor usaha menengah (termasuk konsumsi) dan sisanya sebesar 1,77% ke sektor usaha besar

BOKS-2**KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)
DAN LINKAGE PROGRAM****Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)**

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Pusat bersama Gubernur Bank Indonesia melakukan kesepakatan bersama pada tanggal 22 April 2002 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama berikutnya antara Sekretaris KPK Pusat dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 Februari 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank, dengan penekanan perlunya pembentukan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank (KKMB) yang dapat berperan :

1. sebagai *penghubung* UMKM untuk lebih mudah mengakses perbankan.
2. Memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada UMKM tentang pentingnya berhubungan dengan perbankan.
3. Memberikan ruang konsultasi dan Informasi tentang Perbankan.
4. Membantu calon nasabah dalam membuat proposal sebagai syarat pengajuan kredit ke perbankan.
5. Membantu Perbankan dalam menyeleksi calon nasabah yang akan dihubungkan dengan perbankan.
6. Memberikan informasi kepada Perbankan tentang Calon Nasabah yang akan diajak bermitra dengan bank.

KKMB yang terbentuk sejak awal tahun 2005 di Nusa Tenggara Barat masih dirasa perlu untuk ditingkatkan perannya, mengingat dari 16 orang konsultan yang mendapatkan pelatihan hanya 3 orang yang aktif menjalankan tugas dan peranannya selaku KKMB. Hasil yang dicapai sampai dengan posisi Maret 2006 telah menghubungkan sebanyak 25 UMKM ke bank dengan jumlah realisasi kredit sebesar Rp1,92 miliar.

Perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah Propinsi untuk menunjang kegiatan operasional KKMB yang dituangkan dalam APBD Propinsi, guna mendukung keberhasilan peran KKMB bagi sektor UMKM, mengingat masih relatif banyaknya sektor tersebut yang diperkirakan masih belum memperoleh layanan kredit perbankan.

Linkage Program

Linkage program yang dicanangkan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit Bank Umum kepada sektor UMKM melalui BPR, mengingat peran BPR sangat dominan dalam menyalurkan kreditnya pada usaha mikro dan kecil.

Di Nusa Tenggara Barat sendiri, pelaksanaan *linkage program* telah dimulai sejak Juni 2003 dengan Bank Danamon sebagai bank *pioneer* dengan menyalurkan dananya kepada 10 BPR dengan jumlah realisasi kredit sebesar Rp2,85 miliar, disusul BCA kepada 2 BPR dengan nominal Rp1 miliar dan BII sebanyak 1 BPR dengan nominal Rp0,5 miliar.

Peran tersebut diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2006, mengingat telah terjadi kesepakatan antara 25 kantor cabang Bank Umum dari 32 kantor cabang dengan 46 BPR dari 65 BPR di Nusa Tenggara Barat pada pertengahan Februari 2006 yang lalu.

Data sementara menunjukkan sampai dengan posisi akhir Maret 2006 telah terealisasi sejumlah Rp1,3 miliar rupiah kepada 4 BPR milik pemerintah daerah, sedangkan yang lainnya masih dalam proses persetujuan kredit.

Pencanangan *linkage program* disambut sangat positif oleh BPR, karena mayoritas BPR (71%) sangat memerlukan tambahan dana dengan tujuan untuk melakukan ekspansi kredit dan menjaga stabilitas likuiditas keuangan BPR. Namun demikian pelaksanaan *linkage program* ini masih dihadapkan pada kendala antara lain :

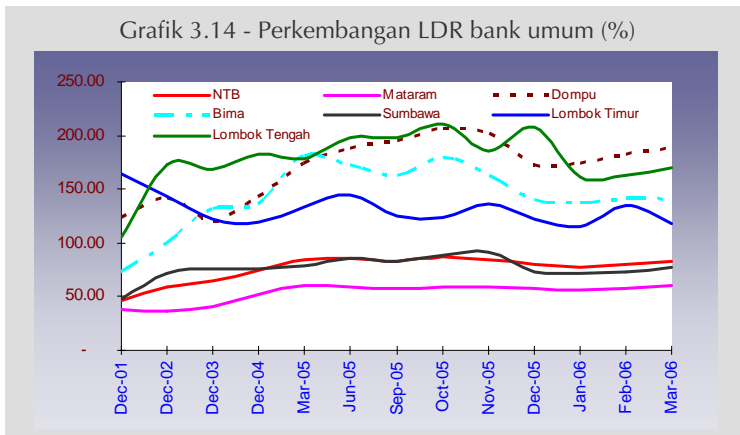
- (1) NPLs mayoritas BPR masih di atas 5 %, sedangkan Bank Umum mensyaratkan angka NPL maksimal sebesar 5 %.
- (2) Suku bunga kredit Bank Umum masih dirasakan cukup tinggi oleh BPR yang rata-rata sebesar 19 s.d. 20% efektif, sedangkan suku bunga kredit yang diharapkan oleh BPR berkisar 12 s.d. 15%. Akibatnya terdapat sejumlah BPR yang menunda pengajuan kreditnya ke Bank Umum.

Untuk itu, agar *linkage program* dapat berhasil secara optimal, disarankan agar :

- (1) Bank Umum tidak memprioritaskan penilaian BPR hanya semata-mata dari sisi rasio angka NPL tetapi juga dinilai Tingkat Kesehatan BPR secara umum, adanya jaminan kredit dan *cash flow* BPR selama beberapa periode.
- (2) Bank Umum diharapkan juga dapat memberikan insentif suku bunga kredit secara khusus kepada BPR dibawah tingkat bunga pasar/komersial, sehingga BPR penerima dana dapat lebih kompetitif dalam penyalurannya
- (3) BPR diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya, guna memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Umum.

(plafon lebih dari Rp5 miliar). Namun apabila total kredit yang disalurkan untuk usaha kecil dengan pendekatan murni ke sektor usaha yang lebih produktif (modal kerja dan investasi) dalam kurun waktu seperti pada grafik 3.13, rata-rata kurang dari 40%, sedangkan ke sektor usaha menengah hampir seluruhnya (rata-rata 96,41%) disalurkan ke sekor produktif. Hal ini menggambarkan pula bahwa karakteristik sektor riil di NTB, lebih didominasi oleh sektor usaha kecil (termasuk usaha mikro) dengan penyaluran kreditnya lebih fokus ke konsumsi, sehingga diperkirakan kurang menimbulkan efek multiplier. Untuk itu, perlu memperbanyak pendirian sektor usaha dengan skala menengah yang diharapkan dapat menciptakan sinergi dengan usaha kecil guna mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, mengingat sektor usaha besar yang didukung dengan berdirinya industri berskala besar relatif sulit.

3.2.5. Loan to Deposit Ratio (LDR)



Tabel 3.6 - Rasio LDR bank umum per Maret 2006

Daerah	LDR
Dompu	187.60
Lombok Tengah	169.39
Bima	139.98
Lombok Timur	117.74
Sumbawa	77.91
Mataram	60.88
NTB	83.03

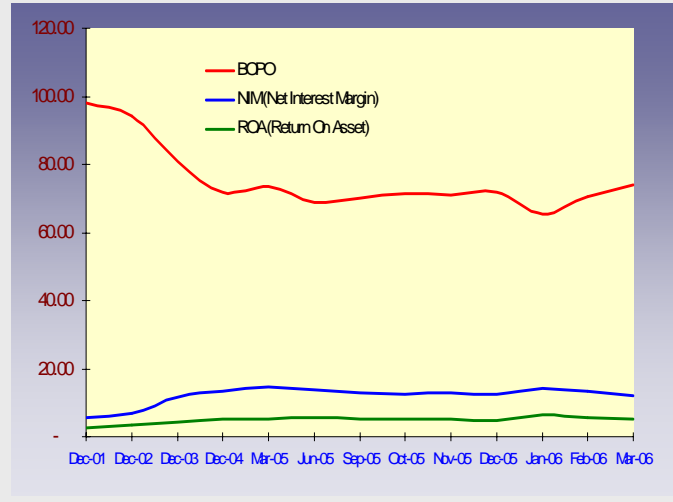
Perkembangan rasio perbandingan antara kredit yang diberikan oleh Bank Umum terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga atau *Loan to Deposito Ratio (LDR)* di Nusa Tenggara Barat, dalam 3 tahun terakhir menunjukkan arah yang cukup baik (meningkat) dimana pada posisi akhir triwulan I 2006 tercatat sebesar 83,03% (LDR nasional 61,14%) meskipun pada akhir 2005 (80,34%) dan awal 2006 masih terlihat agak menurun, namun kembali meningkat pada akhir triwulan I 2006. Trend yang positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran kredit lebih besar dibandingkan dengan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga. Disisi lain, hal tersebut menandakan sektor riil terlihat mulai bergerak dan mampu menyerap penyaluran kredit bank umum yang dapat membawa arah cukup baik bagi kinerja perekonomian di NTB.

Secara regional, penyaluran kredit berdasarkan lokasi kantor bank sampai dengan posisi triwulan I 2006 memperlihatkan bahwa 4 daerah kabupaten/kota di NTB rasio LDRnya melampaui angka 100% yaitu Kabupaten Dompu (tertinggi), Lombok Tengah, Kabupaten/Kota Bima dan Lombok Timur. Hal ini menandakan bahwa di keempat daerah tersebut lebih banyak penyaluran dana dibandingkan dengan penghimpunan dana. Sedangkan di 2 daerah lainnya yaitu Kota Mataram/Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa/Sumbawa Barat terjadi sebaliknya,

sehingga dalam 5 tahun terakhir, kedua daerah ini diindikasikan merupakan penyangga sumber dana bagi keempat daerah lainnya tersebut, disamping belum begitu berkembangnya ekonomi secara relatif di keempat daerah tersebut sehingga terjadi *economic concentration* di Kota Mataram yang juga sebagai ibukota Propinsi NTB.

3.2.6. Profitabilitas & Efisiensi Bank Umum

Grafik 3.15 - Perkembangan profitabilitas bank umum



Secara umum tingkat profitabilitas bank umum yang diukur berdasarkan rasio ROA (*Return On Asset*) dan NIM (*Net Interest Margin*) terlihat stabil namun sedikit menurun untuk rasio NIM. Hal ini disebabkan rasio BOPO yang mengukur efisiensi bank umum dalam aktivitasnya pada awal triwulan I 2006 menunjukkan kecenderungan sedikit meningkat dari sebesar 71,94% menjadi sebesar 74,07%. Meningkatnya biaya operasional yang tidak diimbangi

dengan meningkatnya pendapatan operasional menjadi penyebab utamanya.

Sementara itu, menurunnya rasio NIM dari 12,45% pada akhir 2005 menjadi 12,17% pada posisi triwulan I 2006, disebabkan oleh meningkatnya *cost of fund* karena penabung cenderung memindahkan dananya ke dalam bentuk deposito meski dalam jumlah yang relatif kecil. Namun dalam 3 tahun terakhir, rasio NIM relatif stabil pada kisaran angka 12-14%.

Peningkatan rasio ROA dari 4,90% menjadi 5,18% pada posisi triwulan I 2006, disebabkan oleh meningkatnya pendapatan non operasional terutama dari bunga antar kantor.

3.3. Bank Umum Syariah

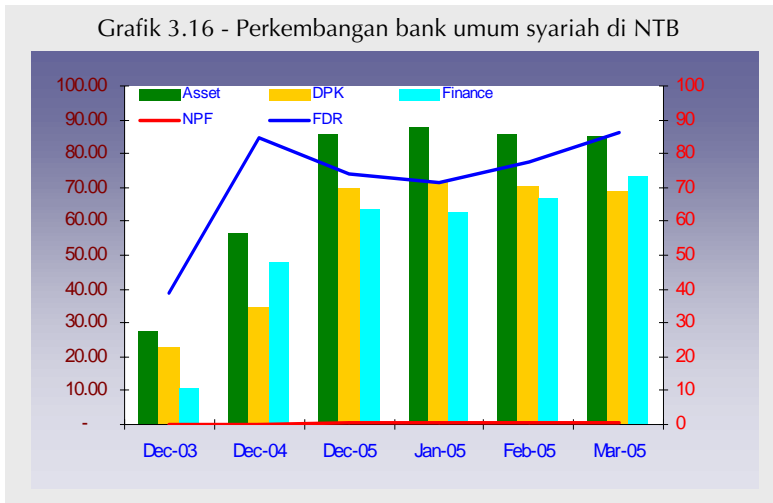
Tabel 3.7 - Indikator utama bank umum syariah di NTB

Keterangan	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Jan-05	Feb-05	Mar-05
Asset *)	27.60	56.61	85.84	87.76	85.66	84.97
DPK *)	22.71	34.85	70.15	72.15	70.21	68.99
Finance *)	10.67	48.08	63.67	62.66	66.64	73.37
NPF (%)	-	0.09	0.44	0.28	0.26	0.52
FDR (%)	38.66	84.92	74.17	71.40	77.80	86.35

*) miliar Rp.

Perkembangan bank umum syariah di Nusa Tenggara Barat pada posisi triwulan I 2006 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya masih relatif baik, khususnya dari sisi pembiayaan (*finance*). Sebaliknya, dana pihak ketiga dan asset sedikit menurun. Besarnya suku bunga di bank komersial saat ini juga menyebabkan adanya sedikit peralihan dana dari bank syariah. Sedangkan trend pembiayaan yang meningkat

sebesar 15,23% pada triwulan ini merupakan cerminan bahwa perbankan syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan usaha yang diminati oleh debitur. Namun yang patut dicermati adalah jumlah pembiayaan non lancar secara nominal mulai bergerak naik yang berpengaruh pula terhadap peningkatan angka rasio *Non*



Performing Financing (NPF) yaitu perbandingan antara jumlah pembiayaan (*finance*) yang non lancar dengan total *finance*, meskipun rasionya masih relatif kecil yaitu sebesar 0,52% pada triwulan berjalan, sehingga sikap kehati-hatian (*prudent*) dan selektif dalam penyaluran dananya perlu menjadi perhatian.

Sedangkan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan dana masyarakat yang berhasil dihimpun, menunjukkan arah yang positif, hal ini lebih disebabkan meningkatnya jumlah angka pembiayaan sedangkan penghimpunan dana cenderung menurun.

3.4. Perkembangan BPR

Tabel 3.8 - Indikator utama BPR di NTB

Keterangan	Dec-01	Dec-02	Dec-03	Dec-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06
Asset	105	135	178	228	229	245	258	267	276
DPK	50	67	92	122	121	131	136	144	149
Kredit	75	100	130	160	174	185	196	200	215
LDR (%)	150.91	148.47	141.78	131.67	143.48	141.73	143.96	139.27	144.69
NPL (%)	16.02	14.91	15.59	12.15	13.37	13.54	12.78	12.30	12.30

Selain LDR & NPL, miliar Rp.

Indikator kinerja utama BPR pada triwulan I 2006 relatif masih cukup baik, terlihat dari adanya peningkatan asset, penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk kredit. Disamping itu, meskipun angka rasio LDR sedikit meningkat, namun angka NPLs BPR cenderung tetap.

3.4.1. Kelembagaan

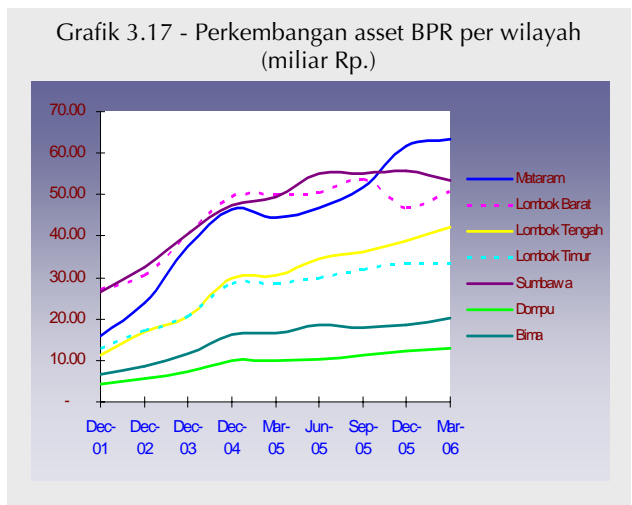
Dari sisi kelembagaan, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat relatif tidak berbeda dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, dimana terdapat 65 (enam puluh lima) kantor pusat dengan komposisi 46 BPR dimiliki Pemerintah daerah sedangkan sisanya sebanyak 19 BPR dimiliki swasta dengan jumlah kantor cabangnya sebanyak 3 kantor.

Sebaran operasional BPR meliputi wilayah kota Mataram sebanyak 5 kantor (4 KP dan 1 KC), Kabupaten Lombok Barat sebanyak 15 kantor (14 KP dan 1 KC), Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 11 kantor (11 KP), Kabupaten Lombok Timur sebanyak 11 kantor (11 KP), Kabupaten Sumbawa sebanyak 14 kantor (14 KP), Kabupaten Dompu sebanyak 4 kantor (4 KP) dan di Kabupaten Bima sebanyak 8 kantor (7 KP dan 1 KC).

Berdasarkan kegiatan usahanya, sebanyak 63 kantor pusat dan 3 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan 2 kantor pusat BPR lainnya dengan kegiatan usaha berdasarkan syariah.

3.4.2. Asset

Total Asset Bank Perkreditan Rakyat menunjukkan trend peningkatan, dimana sampai dengan triwulan I 2006 tercatat sebesar Rp276 miliar atau meningkat sebesar 3,34% dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya sumber dan penyaluran dana. Dominasi BPR yang dimiliki pemerintah daerah relatif tinggi dengan komposisi sebesar 51,80% dan sisanya sebesar 48,20% dimiliki bank swasta.

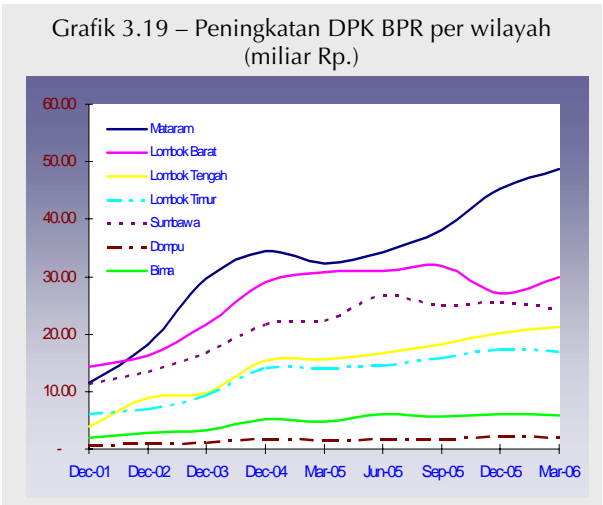
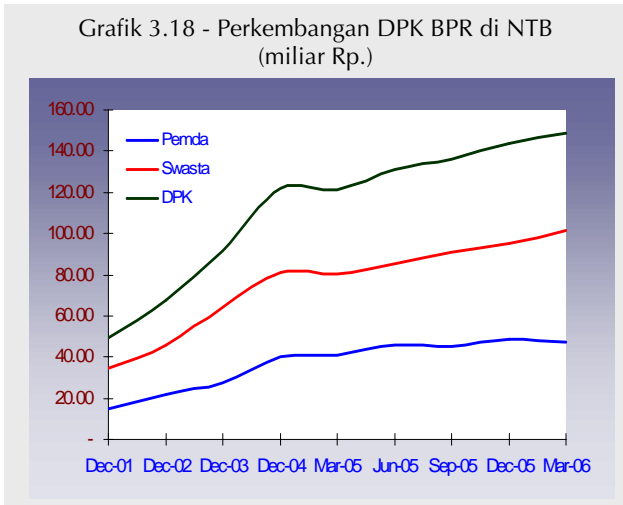


Hampir semua BPR di wilayah kabupaten/kota yang menunjukkan trend peningkatan asset, kecuali Kabupaten Sumbawa yang arahnya sedikit menurun diawal triwulan I 2006 dan BPR di kabupaten Lombok Barat yang arahnya cenderung fluktuatif.

3.4.3. Dana Pihak Ketiga

Secara umum, penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh BPR di NTB cenderung menunjukkan trend peningkatan, dimana pada posisi triwulan I 2006 tercatat sebesar Rp149 miliar, namun penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank milik pemda cenderung melambat dan bahkan menunjukkan arah penurunan dimana komposisinya hanya sebesar 31,54%

dari total dana yang berhasil dihimpun BPR secara keseluruhan, sedangkan sisanya sebesar 68,46%



dikuasai oleh BPR milik swasta. Tampak bahwa upaya penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh BPR swasta cukup proaktif dibandingkan dengan BPR milik pemda yang cenderung menunggu sumber dana dari pemilik yang berasal dari dana APBD.

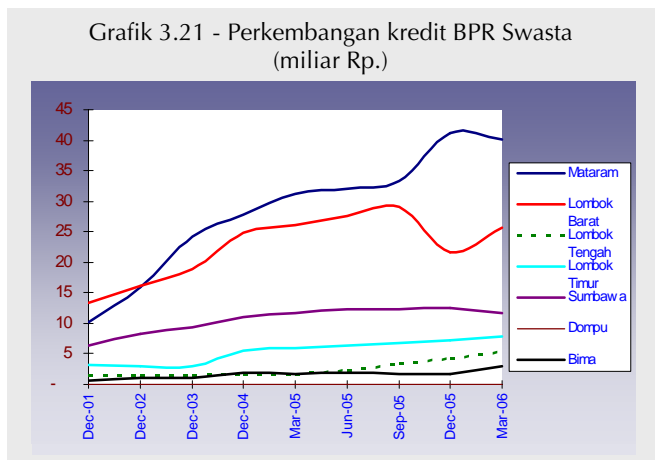
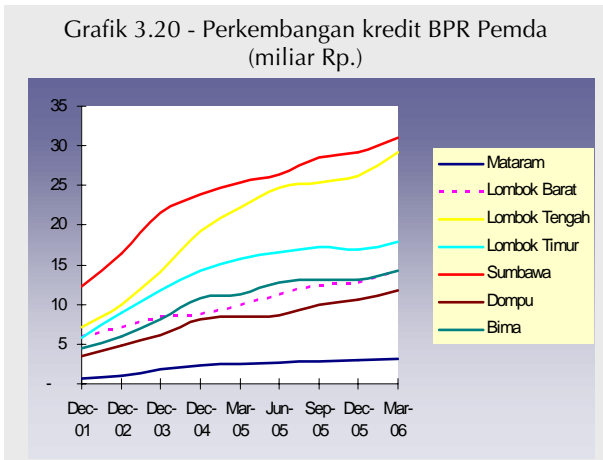
Dari sisi regional per wilayah, Kota Mataram dan kabupaten Lombok Tengah cenderung meningkat, sedangkan daerah lainnya menunjukkan arah yang melambat dan cenderung menurun.

3.4.4. Perkembangan Kredit yang diberikan

Tabel 3.9 - Perkembangan Kredit dan NPL BPR di NTB

Keterangan	Dec-01	Dec-02	Dec-03	Dec-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06
Pemda	40	54	72	88	95	103	109	112	121
Swasta	35	46	58	73	78	83	87	89	94
Kredit-BPR	75	100	130	160	174	185	196	200	215
NPL									
Pemda	13.96	14.16	14.87	13.66	13.42	13.58	14.01	13.33	14.21
Swasta	18.36	15.81	16.48	10.33	13.31	13.49	11.23	11.00	9.83
NPL-BPR	16.02	14.91	15.59	12.15	13.37	13.54	12.78	12.30	12.30

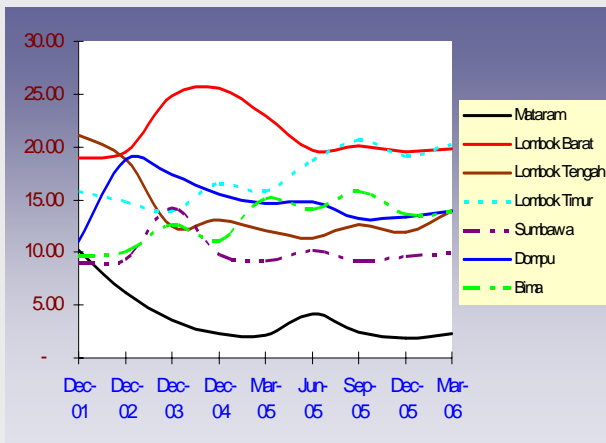
Pertumbuhan penyaluran kredit sampai dengan triwulan I 2006 masih cukup prospektif, dimana terjadi peningkatan sebesar 7,5% menjadi sebesar Rp215 miliar dibandingkan dengan



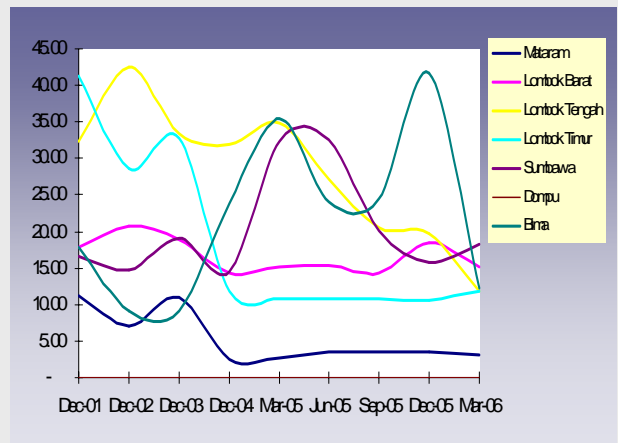
triwulan sebelumnya. BPR milik Pemda masih menjadi *leader* dalam penyaluran kredit yang menguasai pasar sebesar 56,28% sisanya disalurkan melalui BPR yang dimiliki oleh swasta. Namun demikian, potensi risiko kredit oleh bank yang dimiliki Pemda cukup tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh swasta.

Secara regional, BPR yang dimiliki oleh Pemda hampir di semua wilayah kabupaten/kota mengalami pertumbuhan peningkatan penyaluran kredit, kecuali di Kota Mataram yang cenderung melambat. Sedangkan BPR milik swasta di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten/Kota Bima menunjukkan trend yang meningkat, sementara daerah lainnya menunjukkan trend penurunan.

Grafik 3.22 - Perkembangan NPL kredit BPR Pemda (%)



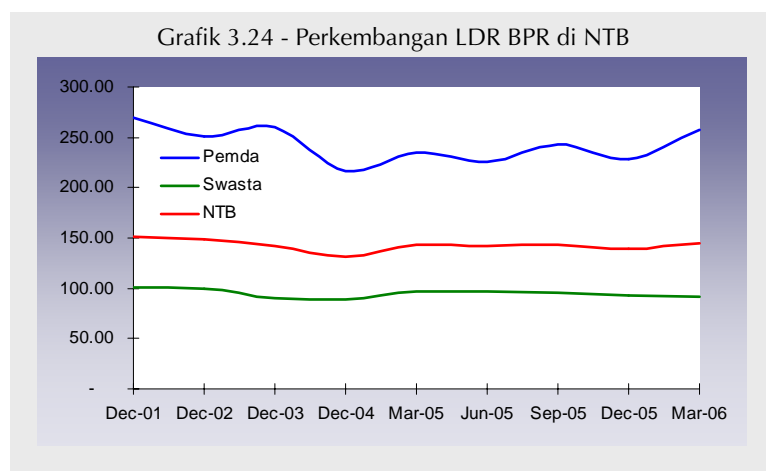
Grafik 3.23 - Perkembangan NPL kredit BPR Swasta (%)



Perkembangan NPL BPR yang dimiliki Pemda hampir di semua wilayah menunjukkan trend peningkatan, sedangkan BPR yang dimiliki oleh swasta cenderung menunjukkan trend yang menurun kecuali yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur.

3.4.5. Loan to Deposit Ratio

Perkembangan rasio perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat

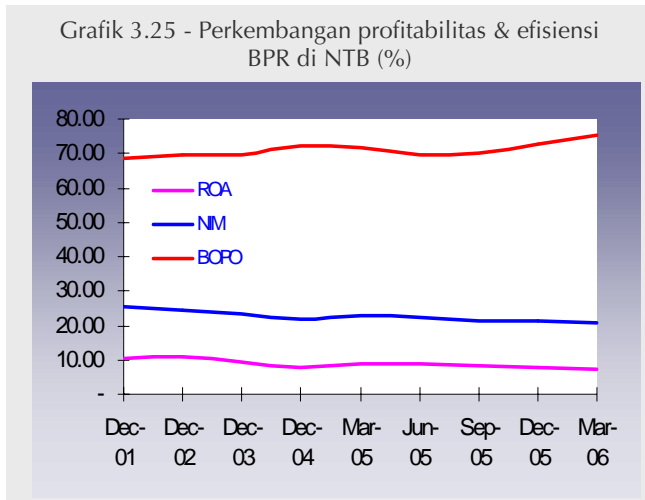


yang berhasil dihimpun atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) masih cukup tinggi yaitu mencapai angka sebesar 144,69% pada posisi akhir triwulan I 2006, tingginya rasio tersebut terutama disumbang oleh LDR BPR yang dimiliki pemerintah daerah yang trendnya cenderung meningkat dimana pada posisi

terakhir telah mencapai angka 258,15%, sedangkan BPR milik swasta yang relatif stabil pada kisaran 90% dimana pada posisi triwulan I 2006 tercatat sebesar 92,13%.

Tingginya rasio LDR BPR milik pemerintah dengan kondisi DPK yang relatif tetap tersebut mengindikasikan bahwa BPR milik pemerintah tersebut cenderung hanya mengandalkan sumber dana pemilik yang berasal dari dana APBD maupun pinjaman.

3.4.6. Profitabilitas & Efisiensi BPR



Perkembangan profitabilitas BPR yang diukur berdasarkan rasio NIM (*Net Interest Margin*) dan ROA (*Return On Asset*) cenderung menunjukkan arah yang menurun sejalan dengan penurunan efisiensi BPR yang diukur dari meningkatnya rasio BOPO (perbandingan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), meskipun secara umum masih cukup baik.

Menurunnya rasio ROA yang pada posisi triwulan I 2006 tercatat sebesar 7,05% disebabkan meningkatnya beban operasional antara lain dari biaya PPAP yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan operasionalnya. Sedangkan menurunnya rasio NIM yang tercatat sebesar 20,82% pada triwulan berjalan, disebabkan peningkatan biaya bunga kurang diimbangi dengan peningkatan pendapatan bunga sejalan dengan kecenderungan peningkatan angka NPLs-nya, disamping adanya kebijakan yang dilakukan beberapa BPR untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjamannya.

3.5. Perkembangan Sistem Pembayaran

Perkembangan sistem pembayaran non tunai melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*) meningkat dari triwulan yang sama tahun sebelumnya, terutama dari *transfer send* (transaksi keluar) yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah aliran uang tunai yang masuk (*inflow*) ke Kantor Bank Indonesia Mataram akibat masuknya kembali uang kartal dari kegiatan *seasonal* yang terjadi pada akhir 2005 sehingga terjadi *net inflow* sebesar Rp160 miliar pada posisi triwulan I 2006, sedangkan peningkatan *transfer received* (transaksi masuk) diperkirakan dari masuknya dana-dana perimbangan dan yang digunakan untuk pembayaran lanjutan kompensasi BBM.

Sementara itu, perbandingan jumlah uang yang tidak layak edar terhadap aliran uang yang masuk (*inflow*) terjadi peningkatan dari sebesar 24,11% pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 24,58% pada triwulan berjalan. Sedangkan jumlah uang palsu yang tercatat di BI Mataram dalam 2

tahun terakhir ini, meningkat cukup signifikan, khususnya terhadap uang pecahan besar (Rp100.000,- dan Rp50.000,-).

3.5.1. Transaksi Keuangan Secara Tunai

3.5.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

Tabel 3.10 - Perkembangan aliran uang di KBI Mataram
Miliar Rp.

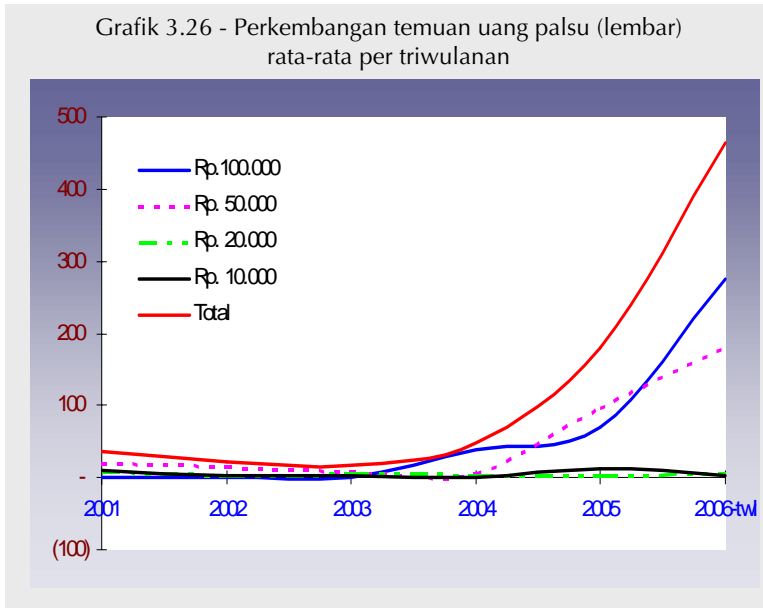
Posisi	Inflow	Outflow	Net Inflow	PTTB	% PTTB thd inflow
2001	2,453	2,181	272	398	16.24
2002	2,622	2,379	244	601	22.91
2003	2,834	3,022	(188)	674	23.78
2004	3,248	3,341	(93)	690	21.25
2005	3,600	3,835	(236)	1,018	28.29
Tw.I	814	698	115	188	23.13
Tw.II	818	937	(119)	244	29.83
Tw.III	840	1,107	(267)	314	37.38
Tw.IV	1,128	1,093	35	272	24.11
2006					
Tw.I	1,082	922	160	266	24.58
Jan	422	290	132	70	
Feb	338	264	74	106	
Mar	322	368	-46	90	
y-o-y	32.99	32.03	38.83	41.33	
q-t-q	(4.08)	(15.65)	357.14	(2.21)	

Aliran uang yang masuk (*inflow*) ke Kantor Bank Indonesia Mataram pada posisi triwulan I 2006 lebih besar daripada yang dikeluarkan (*outflow*), sehingga terjadi *net inflow* sebesar Rp160 miliar. Peningkatan jumlah uang yang masuk ke Bank Indonesia Mataram tersebut merupakan penerusan dari lembaga perbankan khususnya bank umum sebagai dampak dari kelebihan likuiditas di masyarakat setelah berakhirnya kegiatan musiman di penghujung tahun 2005 (natal dan tahun baru), disisi lain juga diperkirakan sebagai dampak dari kontraksi kredit perbankan yang sedikit ketat di awal triwulan I 2006. Namun pada akhir triwulan I 2006, tampak mulai terjadi outflow karena perbankan telah mulai melakukan ekspansi kreditnya.

Sementara itu, dalam rangka memelihara kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat yang dikenal dengan kebijakan *Clean Money Policy*, uang yang tidak layak edar akan dilakukan pemusnahan atau disebut Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB). Pada posisi triwulan I 2006, jumlah uang yang tidak layak edar tercatat sebesar Rp266 miliar atau sebesar 24,58% dari jumlah uang yang masuk (*inflow*) dan dalam 5 tahun terakhir angkanya di atas 20% yang puncaknya di tahun 2005 sebesar 28,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah uang tidak layak edar di Nusa Tenggara Barat relatif cukup tinggi, sehingga perlu berbagai upaya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat bagaimana cara memegang uang kertas yang baik dan benar, disamping itu diperlukan

upaya untuk mendorong peningkatan bertransaksi secara non tunai seperti membayar gaji pegawai secara non tunai.

3.5.1.2. Uang Palsu



Perkembangan terhadap temuan uang palsu khususnya yang tercatat di Kantor Bank Indonesia Mataram dilihat dari rata-rata per triwulannya dalam 2 tahun terakhir, menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan, terutama untuk pecahan uang Rp100.000 dan Rp50.000.

Indikasi peredaran uang palsu tersebut, pada umumnya dilakukan melalui pasar-pasar tradisional, intensitas transaksi yang

cukup tinggi seperti SPBU dan daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya relatif kurang memperoleh informasi yang cukup.

Hingga triwulan I 2006, jumlah temuan uang palsu telah mencapai angka sebesar Rp36.680.000,- dengan jumlah lembar sebanyak 463. Angka ini diperkirakan akan lebih besar lagi apabila digabung dengan temuan uang palsu dari aparat berwajib.

Tingginya peredaran uang palsu, perlu ditangani secara serius oleh berbagai pihak terutama dari aparat penegak hukum, Bank Indonesia Mataram sendiri telah meningkatkan program penyuluhan keaslian uang rupiah baik secara langsung terjun ke masyarakat ataupun melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Tabel berikut menggambarkan jumlah temuan uang palsu yang tercatat di bank indonesia Mataram dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.11 - Uang palsu yang ditemukan di Kantor Bank Indonesia Mataram

THN	PECAHAN								JUMLAH	
	Rp.100.000		Rp. 50.000		Rp. 20.000		Rp. 10.000			
	Nominal	lbr	Nominal	Lbr	Nominal	lbr	Nominal	Lbr	Nominal	Lbr
2001	-	-	3,700,000	74	600,000	30	370,000	37	4,670,000	141
2002	300,000	3	3,100,000	62	260,000	13	110,000	11	3,770,000	89
2003	200,000	2	1,400,000	28	500,000	25	90,000	9	2,190,000	64
2004	15,900,000	159	900,000	18	180,000	9	30,000	3	17,010,000	189
2005	28,100,000	281	19,300,000	386	160,000	8	470,000	47	48,030,000	722
2006										
Tw-I	27,600,000	276	8,950,000	179	100,000	5	30,000	3	36,680,000	463

3.5.2. Transaksi Keuangan Secara Non Tunai

3.5.2.1. Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jumlah nominal transaksi non tunai melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang bersifat seketika (masuk maupun keluar) dengan nominal minimal Rp100 juta per transaksi, sampai dengan posisi triwulan I 2006 yang tercatat

Tabel 3.12 - Transaksi RTGS di Kantor Bank Indonesia Mataram

Posisi	Transfer Send		Transfer Received		Total	
	Lbr.	Nom.	Lbr.	Nom.	Lbr.	Nom.
2004	4,208	4,825	2,168	3,752	6,376	8,577
2005	4,572	4,648	2,202	4,174	6,774	8,821
<i>Tw. I</i>	1,027	858	551	818	1,578	1,675
<i>Tw. II</i>	1,110	1,061	559	1,049	1,669	2,110
<i>Tw. III</i>	1,228	1,100	544	1,139	1,772	2,239
<i>Tw. IV</i>	1,207	1,629	548	1,168	1,755	2,797
2006	1,303	1,519	568	963	1,871	2,482
<i>Tw. I</i>	1,303	1,519	568	963	1,871	2,482
y-o-y (%)	26.87	77.14	3.09	17.73	18.57	48.14
q-t-q (%)	7.95	(6.75)	3.65	(17.55)	6.61	(11.26)

Nom. (milyar rp.)

melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) Mataram secara total sebesar Rp2,48 triliun atau meningkat sebanyak 48,14% dengan jumlah lembar meningkat sebanyak 18,57% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kecenderungan menggunakan sarana RTGS dalam aktivitas transaksi bisnis yang bernilai nominal besar cukup meningkat. Disamping itu, peningkatan transaksi secara nominal (y-o-y) dari *transfer send* sebagai dampak dari meningkatnya jumlah aliran uang masuk (*inflow*), sedangkan peningkatan *transfer received* diperkirakan adanya transfer masuk dana perimbangan maupun dana yang akan digunakan untuk membayar kelanjutan dari kompensasi BBM (bantuan langsung tunai).

3.5.2.2. Transaksi Kliring

Transaksi non tunai lainnya yang melalui kegiatan kliring selama triwulan I 2006 tercatat sebesar Rp698 miliar atau meningkat sebesar 3,71% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) dan jumlah transaksi (lembar) yang meningkat sebesar 4,28%. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan transaksi non tunai secara giralisasi sekaligus pertanda pergerakan aktivitas ekonomi ke arah yang positif.

Secara triwulan, meskipun terjadi penurunan baik nominal maupun jumlah transaksi, semata-mata karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi akibat faktor musiman terutama terjadi pada penghujung triwulan sebelumnya.

Tabel 3.13 -

Data Perputaran Kliring di KBI Mataram

Posisi	Perputaran Kliring	
	Lbr.	Nominal *)
2001	139,081	5,150
2002	148,047	4,639
2003	150,099	2,441
2004	171,127	2,586
2005	171,316	3,064
<i>Tw. I</i>	39,226	673
<i>Tw. II</i>	40,940	723
<i>Tw. III</i>	45,077	785
<i>Tw. IV</i>	46,073	883
2006		
<i>Tw. I</i>	40,904	698
q-t-q	(11.22)	(20.95)
y-o-y	4.28	3.71

*) miliar rupiah

3.6. Rekomendasi

1. Kantor Pusat Bank Indonesia

Perlu ada perubahan kebijakan pelaporan khususnya bagi Bank Umum yang telah menyalurkan kreditnya kepada BPR agar dicatat sebagai variabel pinjaman (loan).

2. Kantor Bank Indonesia Mataram

Perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara-cara memegang atau menyimpan uang yang baik dan benar, untuk mengurangi meningkatnya jumlah uang tidak layak edar di Nusa Tenggara Barat.

3. Perbankan di Nusa Tenggara Barat

- Bagi perbankan di daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu relatif lebih berhati-hati (*prudent*) dalam menyalurkan kreditnya ke sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, mengingat tingginya rasio kredit non lancar di kedua daerah tersebut.
- Bagi perbankan di daerah Bima perlu lebih selektif dan hati-hati dalam menyalurkan kreditnya ke sektor jasa-jasa dunia usaha.

4. Pihak-pihak lainnya

- Perlunya mendorong peningkatan kegiatan transaksi pembayaran secara non tunai di masyarakat guna mengeliminir terjadinya risiko, antara lain dengan melakukan pembayaran gaji karyawan secara non tunai (transfer ke rekening tabungan) yang penarikannya melalui kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

5. Pemerintah Daerah

- Perlunya mendorong terciptanya sektor usaha berskala menengah ataupun usaha besar di NTB, disamping dapat menambah penyediaan lapangan kerja juga dapat mempercepat pergerakan aktivitas ekonomi ke arah yang lebih positif, mengingat saat ini aktivitas ekonomi lebih didominasi oleh sektor usaha kecil.
- Perlunya peningkatan peran Pemerintah Propinsi dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB, guna mengurangi terjadinya *economic concentration* di Kota Mataram.

BAB IV PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT

REALISASI APBD 2005

Tabel 4.1 Realisasi APBD 2005 Propinsi, Kota Mataram & Kab.Sumbawa Barat (miliar rp.)

No.	URAIAN	PROPINSI NTB *)			KOTA MATARAM			KAB. SUMBAWA BARAT			Rata2 Realisasi %
		APBD	Realisasi		APBD	Realisasi		APBD	Realisasi		
			2005	%		2005	%		2005	%	
I	PENDAPATAN	520.11	529.02	101.71	236.30	244.79	103.59	108.07	139.77	129.33	111.55
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.26	196.16	100.46	18.99	21.34	112.37	2.58	2.58	100.08	104.30
	2. DANA PERIMBANGAN	317.95	325.96	102.52	209.23	214.70	102.61	100.21	131.86	131.59	112.24
	a. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	68.07	76.07	111.76	22.59	27.18	120.32	52.71	84.00	159.34	130.47
	b. Dana Alokasi Umum	249.89	249.89	100.00	167.66	167.66	100.00	40.27	40.27	100.00	100.00
	c. Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	100.00	4.00	4.00	100.00	66.67
	d. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keu.dari Prop.	0.00	0.00	0.00	11.08	11.95	107.88	3.23	3.60	111.53	73.14
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.90	6.90	99.99	8.08	8.76	108.43	5.28	5.32	100.81	103.08
II	BELANJA	581.79	517.84	89.01	253.55	237.02	93.48	111.86	87.27	78.01	86.83
	1. APARATUR DAERAH	265.02	243.03	91.70	93.24	84.30	90.41	62.85	45.02	71.63	84.58
	a. Belanja Administrasi Umum	205.48	189.50	92.22	56.45	51.40	91.04	50.37	36.28	72.04	85.10
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	45.32	40.34	89.01	14.95	13.02	87.10	5.01	4.04	80.53	85.55
	c. Belanja Modal	14.23	13.20	92.79	21.83	19.88	91.05	7.47	4.70	62.89	82.24
	2. PELAYANAN PUBLIK	183.92	160.90	87.48	138.41	132.03	95.39	32.66	30.11	92.20	91.69
	a. Belanja Administrasi Umum	7.74	6.38	82.36	84.08	81.24	96.63	4.22	3.51	83.36	87.45
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	106.28	95.23	89.60	15.84	14.06	88.75	13.73	12.50	91.02	89.79
	c. Belanja Modal	69.90	59.30	84.83	38.49	36.73	95.41	14.71	14.10	95.83	92.03
	3. BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	122.54	113.56	92.67	20.69	20.69	100.00	11.13	8.84	79.43	90.70
	4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	10.31	0.35	3.37	1.20	0.00	0.00	5.22	3.30	63.15	22.17
	SURPLUS (DEFISIT)	(61.68)	11.18	(18.12)	(17.25)	7.77	(45.04)	(3.79)	52.50	(1,385.55)	(482.90)
III	PEMBIAYAAN	61.68	61.76	100.13	17.25	17.24	99.97	3.79	3.79	100.00	100.03
	1. PENERIMAAN DAERAH	76.69	73.57	95.94	18.25	18.24	99.97	4.54	4.54	100.00	98.63
	2. PENGELUARAN DAERAH	15.01	11.81	78.68	1.00	1.00	100.00	0.75	0.75	100.00	92.89
IV	NON ANGGARAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	1. PENERIMAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2. PENGELUARAN	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Sumber : Biro keuangan Propinsi & Bagian Keuangan Kabupaten/Kota

*) unaudit BPK

Dari 3 realisasi APBD yang berhasil dihimpun yaitu APBD Propinsi NTB, Kota Mataram dan kabupaten Sumbawa Barat, sampai dengan triwulan IV 2005 (realisasi APBD Kab.Sumbawa telah diulas pada KER triwulan IV 2005), anggaran pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lainnya yang dianggap sah, secara umum dapat terealisasi lebih dari 100% dengan rata-rata sebesar 111,55%. Sedangkan realisasi anggaran belanja dapat tercapai antara 78% s.d 94% dengan rata-rata sebesar 86,83%. Hal ini mencerminkan bahwa terjadi surplus anggaran pada ketiga daerah tersebut yang semula dianggarkan terjadi defisit yang akan ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Angka surplus tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai sebesar Rp52,5 miliar dari semula dianggarkan defisit sebesar Rp3,79 miliar, surplus tersebut berasal dari dana

perimbangan pada pos bagi hasil pajak dan bukan pajak yang dapat terealisasi sebesar 159,34% yang diperkirakan berasal dari PT.Newmont Nusa Tenggara, lokasi tambangnya di kabupaten tersebut.

Sedangkan realisasi anggaran belanja Propinsi yang rata-rata mencapai angka 89,01% menandakan masih belum optimumnya penggunaan anggaran yang telah direncanakan sehingga relatif lebih terkesan terjadinya efisiensi, meskipun realisasi belanja aparatur daerah telah mencapai angka sebesar 91,70% namun untuk belanja pelayanan publik baru terealisasi 87,48%. Apabila optimasi belanja publik dapat dilakukan seperti pada pos belanja modal diperkirakan dapat menstimulan pergerakan ekonomi ke arah yang lebih positif.

Terjadinya surplus anggaran di ketiga daerah tersebut, diharapkan akan lebih dialokasikan untuk sektor pelayanan publik (terutama belanja modal) pada periode anggaran berikutnya seperti perbaikan infrastruktur guna memperlancar arus distribusi barang dan jasa ataupun peningkatan sarana dan prasarana baik kesehatan maupun pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Nusa Tenggara Barat.

APBD 2006

APBD 2006 yang berhasil diperoleh adalah APBD Propinsi, Kota Mataram, Kabupaten Dompu dan Kota Mataram, dimana rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan mencapai angka 44,95% dan pertumbuhan anggaran belanja sebesar 32,15% (tabel 4.3). Pertumbuhan anggaran

Tabel 4.2 - APBD 2006 Propinsi, Kota Mataram, Kab.Dompu & Kota Bima (miliar rp.)

NO.	KETERANGAN	PROPINSI	MTR	DOMPU	KOTA BIMA
I	PENDAPATAN	715.03	345.11	292.97	242.72
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	237.90	22.54	9.00	6.17
	a. Pajak Daerah	179.49	10.01	1.80	1.89
	b. Retribusi Daerah	25.65	8.78	2.40	2.10
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	15.85	0.88	2.97	0.11
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	16.90	2.87	1.82	2.06
	2. DANA PERIMBANGAN	477.13	322.57	277.07	233.80
	a. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	73.00	24.43	14.96	16.19
	b. Dana Alokasi Umum	404.13	247.25	231.61	183.58
	c. Dana Alokasi Khusus	-	37.85	25.63	28.84
	d. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keu.dari Propinsi	-	13.05	4.87	5.18
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	6.91	2.75
II	BELANJA	750.03	352.08	294.73	243.71
	1. APARATUR DAERAH	310.95	118.37	188.85	127.39
	a. Belanja Administrasi Umum	256.45	72.82	146.16	107.21
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	45.86	18.87	39.01	13.63
	c. Belanja Modal	8.65	26.68	3.68	6.55
	2. PELAYANAN PUBLIK	289.11	209.07	73.39	101.83
	a. Belanja Administrasi Umum	44.20	101.84	0.14	6.36
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	154.81	19.30	35.54	53.94
	c. Belanja Modal	90.10	87.93	37.70	41.52
	3. BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	139.88	22.14	21.07	12.99
	4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	10.09	2.50	11.42	1.50
	SURPLUS (DEFISIT)	(35.00)	(6.98)	(1.76)	(0.99)
III	PEMBIAYAAN	35.00	7.25	3.76	1.27
	1. PENERIMAAN DAERAH	46.50	11.51	17.83	28.82
	2. PENGELUARAN DAERAH	11.50	4.26	14.07	27.55
IV	NON ANGGARAN	-	-	-	-
	1. PENERIMAAN	-	-	-	-
	2. PENGELUARAN	-	-	-	-

Sumber : Biro keuangan Propinsi & Bagian Keuangan Kabupaten/Kota

pendapatan dan belanja tersebut diperkirakan juga terjadi di daerah lainnya. Secara umum keempat

daerah tersebut masih menganggarkan difisit anggaran yang nantinya tertutupi dari sisa anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 - Pertumbuhan APBD 2006 Propinsi, Kota Mataram, Dompu, Kota Bima (%)

NO	KETERANGAN	PROP	MTR	DOMPU	KOTA BIMA *)	RATA2
I	PENDAPATAN	37.48	46.05	51.34	44.94	44.95
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.84	18.69	0.64	59.38	25.14
	a. Pajak Daerah	26.05	18.60	4.87	15.72	16.31
	b. Retribusi Daerah	13.56	11.29	(28.67)	119.06	28.81
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	13.13	17.81	49.23	316.22	99.09
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3.92	50.00	(2.15)	65.14	29.23
	2. DANA PERIMBANGAN	50.06	54.17	63.59	65.20	58.25
	a. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	7.25	8.15	(0.51)	110.69	31.39
	b. Dana Alokasi Umum	61.73	47.47	66.09	55.35	57.66
	c. Dana Alokasi Khusus	-	378.45	104.72	143.99	156.79
	d. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keu.dari Propinsi	-	17.81	105.43	34.81	39.51
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	(100.00)	(100.00)	(54.78)	(87.55)	(85.58)
II	BELANJA	28.92	38.86	44.85	15.97	32.15
	1. APARATUR DAERAH	17.33	26.96	37.08	(7.09)	18.57
	a. Belanja Administrasi Umum	24.81	29.00	29.98	(11.42)	18.09
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	1.20	26.21	78.43	46.85	38.17
	c. Belanja Modal	(39.24)	22.19	6.76	(3.68)	(3.49)
	2. PELAYANAN PUBLIK	57.19	51.04	58.46	53.71	55.10
	a. Belanja Administrasi Umum	470.83	21.12	100.00	165.91	189.47
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	45.66	21.83	132.35	77.20	69.26
	c. Belanja Modal	28.90	128.42	21.54	24.28	50.79
	3. BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	14.15	7.01	44.69	106.94	43.20
	4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	(2.18)	107.98	136.29	200.00	110.52
	SURPLUS (DEFISIT)	(43.25)	(59.55)	(82.25)	(97.69)	(70.69)
III	PEMBIAYAAN	(43.25)	(57.99)	(62.03)	(89.29)	(63.14)
	1. PENERIMAAN DAERAH	(39.37)	(36.93)	34.02	88.55	11.57
	2. PENGELUARAN DAERAH	(23.39)	326.32	312.62	692.75	327.08
IV	NON ANGGARAN	-	-	-	-	-
	1. PENERIMAAN	-	-	-	-	-
	2. PENGELUARAN	-	-	-	-	-

Peningkatan anggaran penerimaan dari keempat daerah tersebut dan daerah lainnya lebih disebabkan dari meningkatnya sumber penerimaan yang berasal dari dana perimbangan (DAU & DAK), dimana peningkatan dana alokasi umum (DAU) rata-rata sebesar 56,84% dengan peningkatan tertinggi terjadi pada daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai angka 157,66% dan

Tabel 4.4- Dana Alokasi Umum (DAU) 2006 di Nusa Tenggara Barat (miliar rp.)

NO	DAERAH	DAU		
		2005 **)	2006 *)	Peningkatan%
1	Propinsi Nusa Tenggara Barat	249.89	404.15	61.73
2	Kab. Bima	203.51	330.94	62.62
3	Kab. Dompu	139.45	231.81	66.24
4	Kab. Lombok Barat	243.89	372.24	52.62
5	Kab. Lombok Tengah	260.80	387.04	48.41
6	Kab. Lombok Timur	308.86	465.49	50.71
7	Kab. Sumbawa	179.55	272.56	51.80
8	Kota Mataram	167.66	247.25	47.47
9	Kota Bima	118.17	183.58	55.35
10	Kab. Sumbawa Barat	40.27	103.76	157.66
	TOTAL	1,912.05	2,998.81	56.84

*) sumber: www.djpk.dpk.go.id
 **) sumber: APBD per daerah

terendah terjadi di Kota Mataram sebesar 47,47% (tabel 4.4). Sedangkan peningkatan dana alokasi khusus (DAK) rata-rata sebesar 181,77% dengan peningkatan tertinggi terjadi di daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan terendah di Kabupaten Lombok Timur (tabel 4.5). DAK yang dialokasikan menurut bidang infrastruktur dan non infrastruktur yang ditambah bidang lingkungan hidup, rata-rata meningkat lebih dari 100% kecuali bidang infrastruktur sub bidang irigasi yang hanya meningkat sebesar 39,43%. Peningkatan tertinggi terjadi pada bidang pertanian dan bidang kesehatan, yang menandakan adanya keseriusan

pemerintah pusat untuk mengembangkan bidang pertanian karena NTB merupakan salah satu daerah agraris yang terkenal dengan sebutan “BUMI GORAnya” termasuk pula peningkatan bidang kesehatan guna menunjang meningkatnya angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan angka terendah dari seluruh daerah di Indonesia.

Sementara itu, peningkatan anggaran belanja aparatur daerah disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) baru di lingkungan jajaran pemerintah daerah yang berpengaruh pula terhadap peningkatan anggaran pelayanan publik khususnya pada pos belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan, namun belum diimbangi dengan peningkatan belanja modal pelayanan publik yang masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan belanja administrasi umum ataupun belanja operasional dan pemeliharaan. Apabila belanja modal lebih mendapat prioritas, diperkirakan akan membawa dampak *multiplier* terhadap aktivitas perekonomian di regional yang pada akhirnya dapat menstimulan terjadinya pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 4.5 - Dana Alokasi Khusus (DAK) 2006 di Nusa Tenggara Barat (miliar rp.)

No.	Daerah	ALOKASI PER BIDANG									Total
		Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang Infrastruktur			Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Pertanian	Bidang Praspem	Bidang Lingkungan Hidup	
				Jalan	Irigasi	Air Bersih					
1	Kab. Bima	7.73	5.96	6.75	2.08	1.39	3.24	5.91	3.00	0.30	36.36
2	Kab. Dompu	6.25	5.31	5.04	1.77	1.17	2.87	2.92	-	0.30	25.63
3	Kab. Lombok Barat	8.51	7.79	7.49	1.59	2.35	2.73	3.53	-	0.80	34.79
4	Kab. Lombok Tengah	7.55	6.15	6.39	4.33	1.37	3.08	5.65	-	1.70	36.22
5	Kab. Lombok Timur	9.39	5.97	5.46	1.56	1.20	3.08	3.51	-	-	30.17
6	Kab. Sumbawa	8.54	7.42	6.26	2.18	1.33	3.11	3.27	-	0.30	32.41
7	Kota Mataram	8.92	8.62	6.29	1.02	3.44	3.22	2.06	2.00	2.28	37.85
8	Kota Bima	7.44	5.45	6.02	1.52	2.07	1.44	1.60	3.00	0.30	28.84
9	Kab. Sumbawa Barat	5.51	4.66	6.04	1.10	1.08	1.76	3.30	3.00	2.30	28.75
	TOTAL	69.84	57.33	55.74	17.15	15.40	24.53	31.75	11.00	8.28	291.01
	Penambahan DAK dari 2005 (%)										
1	Kab. Bima	103.42	199.50	152.81	20.23	107.46	155.12	418.42	100.00	100.00	174.00
2	Kab. Dompu	82.22	196.65	93.10	27.34	95.00	147.41	158.41	100.00	100.00	111.64
3	Kab. Lombok Barat	126.20	303.63	165.60	27.20	298.31	145.95	212.39	100.00	100.00	176.29
4	Kab. Lombok Tengah	73.17	202.96	118.84	99.54	110.77	154.55	400.00	100.00	100.00	150.31
5	Kab. Lombok Timur	105.02	203.05	89.58	(27.44)	114.29	154.55	350.00	100.00	100.00	113.52
6	Kab. Sumbawa	147.54	271.00	121.20	14.14	125.42	119.01	319.23	100.00	100.00	149.69
7	Kota Mataram	168.67	425.61	205.34	100.00	100.00	261.80	100.00	100.00	100.00	378.45
8	Kota Bima	91.26	159.52	90.51	(10.59)	100.00	48.45	100.00	100.00	100.00	143.99
9	Kab. Sumbawa Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	(25.00)	100.00	618.75
	Total	128.29	271.07	153.94	39.43	320.77	165.48	421.35	175.00	100.00	181.77

sumber : www.djapk.depkeu.go.id

REALISASI APBD TRIWULAN I 2006

Realisasi APBD triwulan I 2006 di Nusa Tenggara Barat (propinsi, kota dan kabupaten) dengan pendekatan realisasi secara triwulan pada tahun 2005 di Propinsi NTB, Kota Mataram dan

Kabupaten Sumbawa Barat, pada triwulan I 2006 anggaran pendapatan diperkirakan terealisasi rata-rata sebesar 19,40% dan anggaran belanja diperkirakan baru terealisasi rata-rata sebesar 7,36%, sedangkan pembiayaan diperkirakan dapat direalisasi sebesar 70,33% dari yang direncanakan.

Tabel 4.6 Perkiraan realisasi APBD 2006
(Propinsi NTB, Kota Mataram & Kab.Sumbawa Barat)

NO.	URAIAN	REALISASI			
		s.d Tw I	s.d Tw II	s.d Tw III	s.d Tw IV
I	PENDAPATAN	19.40	37.08	73.06	111.55
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.14	28.40	66.78	104.30
	2. DANA PERIMBANGAN	22.74	42.31	73.43	112.24
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11.91	37.56	103.08	103.08
II	BELANJA	7.36	21.91	38.97	86.83
	1. APARATUR DAERAH	9.25	26.31	40.39	84.58
	2. PELAYANAN PUBLIK	5.85	15.26	30.28	91.69
	3. BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	2.55	21.68	61.36	90.70
	4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	1.13	7.77	2.22	22.17
III	PEMBIAYAAN	70.33	70.33	70.33	100.00
	1. PENERIMAAN DAERAH	66.27	66.27	66.27	100.00
	2. PENGELUARAN DAERAH	22.22	22.22	22.22	100.00

Sumber : Biro Keuangan Prop.NTB, Bagian Ekonomi Kota Mataram & Kab. Sumbawa Barat (diolah)

Besarnya peningkatan DAU dan DAK pada tahun 2006 yang rata-rata meningkat masing-masing sebesar 56,84% dan 181,77% yang mempengaruhi pula terhadap peningkatan anggaran belanja yang terjadi di semua daerah (propinsi, kota & kabupaten), dengan pendekatan APBD 2006 Propinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Dompu dan Kota Bima yang meningkat rata-rata sebesar 32,15%, diperkirakan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional terutama pertumbuhan dari sisi pengeluaran fiskal dari konsumsi pemerintah (*government expenditure*), sepanjang terjadi optimasi pengeluaran anggaran belanja terutama belanja pada sektor pelayanan publik.

BAB V PERKEMBANGAN INVESTASI DI NUSA TENGGARA BARAT

Perkembangan data investasi terkini yang diperoleh dari BKPM Propinsi NTB adalah data kumulatif hingga tahun 2005. Secara umum, perkembangan investasi langsung di Propinsi NTB belum menggembirakan. Tercatat rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di NTB pada tahun 2005 hanya meningkat sebesar Rp 500 juta (0,01%) dibandingkan rencana investasi PMDN kumulatif tahun 2004 dari Rp 3,572 triliun menjadi Rp 3,573 triliun. Sedangkan rencana Penanaman Modal Asing (PMA) hanya meningkat sebesar US\$ 13,33 juta (0,23%), dari US\$ 5,632 miliar pada tahun 2004 menjadi US\$ 5,645 miliar pada tahun 2005. PMDN yang direncanakan pada tahun 2005 tidak ada yang terealisasi, sedangkan dari rencana PMA, hanya terealisasi sebesar US\$ 0,77 juta (5,86%), yaitu pada sektor perhotelan (US\$ 0,18 juta) dan sektor jasa lainnya (US\$ 0,59 juta).

Tabel 3.1

Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN Di Propinsi NTB (s.d Desember 2004)							
No	Sektor	Rencana Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK	Realisasi Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK
1	Tanaman pangan	2,250,000	0.06	100	125,000	0.01	11
2	Perikanan	481,711,877	13.48	7,889	146,316,915	14.39	1,893
3	Peternakan	53,013,900	1.48	275	6,060,198	0.60	113
4	Perkebunan	40,426,280	1.13	3,754	14,504,810	1.43	94
5	Kehutanan	1,766,875	0.05	322	20,584,000	2.12	638
6	Pertambangan	70,000	0.00	10	20,000	0.00	11
7	Industri	1,252,562,807	35.06	3,742	69,676,597	6.85	465
8	Perhotelan	1,678,728,448	46.99	8,235	716,997,275	70.51	1,494
9	Pengangkutan	38,744,500	1.08	886	32,859,500	3.23	492
10	Jasa Lainnya	23,054,044	0.65	464	8,764,517	0.86	119
Total		3,572,328,731	100.00	25,677	1,015,908,812	100	5,330
PMA							
1	Perkebunan	21,269	0.38	2,706	73,528	2.38	1,132
2	Perikanan	19,073	0.34	1,579	11,251	0.36	597
3	Pertambangan	2,276,112	40.41	2,487	2,900,920	93.93	4,280
4	Industri	2,703,784	48.01	13,469	652	0.02	39
5	Perhotelan	569,506	10.11	4,103	61,555	1.99	959
6	Jasa lainnya	42,295	0.75	1,112	40,517	1.31	447
Total		5,632,039	100	25,456	3,088,423	100	7,454

Sumber Data : BKPM Propinsi NTB, di olah

Sejak tahun 70-an sampai dengan akhir tahun 2005, dari rencana investasi kumulatif PMDN sebesar Rp3,57 triliun terealisasi Rp1,02 triliun (28,43%), sedangkan rencana kumulatif PMA sebesar US\$5,65 miliar terealisasi sebesar US\$3,09 miliar (54,72%). Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa

sektor yang paling diminati oleh investor asing adalah sektor pertambangan, perkebunan dan perhotelan. Jumlah tenaga kerja yang diserap PMA mencapai 7.454 orang, yang didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, investor lokal lebih cenderung berinvestasi ke sektor perhotelan, perikanan dan industri. Penyerapan tenaga kerja oleh PMDN mencapai 5.330 orang, yang terbanyak di sektor perikanan dan perhotelan.

Pada triwulan I-2006, berdasarkan data dari BKPM Di Propinsi NTB, terdapat 5 perusahaan calon investor asing dari Negara Italia, Singapura, Jepang, Spanyol dan gabungan investasi Belanda Jerman & Swiss yang berminat menanamkan modalnya di NTB dan telah mendapat persetujuan. Total nilai investasi PMA yang telah disetujui tersebut direncanakan sebesar US\$ 253,950 dengan alokasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 183 orang. Bidang usaha yang diminati adalah perdagangan ekspor import, budidaya mutiara, jasa akomodasi, jasa rekreasi dan jasa akomodasi.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN Di Propinsi NTB (s.d Desember 2005)							
No	Sektor	Rencana Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK	Realisasi Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK
1	Tanaman pangan	2,250,000	0.06	100	125,000	0.01	11
2	Perikanan	481,711,877	13.48	7,889	146,316,915	14.39	1,893
3	Peternakan	53,013,900	1.48	275	6,060,198	0.60	113
4	Perkebunan	40,426,280	1.13	3,754	14,504,810	1.43	94
5	Kehutanan	1,766,875	0.05	322	20,584,000	2.12	638
6	Pertambangan	70,000	0.00	10	20,000	0.00	11
7	Industri	1,252,562,807	35.06	3,742	69,676,597	6.85	465
8	Perhotelan	1,678,728,448	46.99	8,235	716,997,275	70.51	1,494
9	Pengangkutan	38,744,500	1.08	886	32,859,500	3.23	492
10	Jasa Lainnya	23,554,044	0.66	464	8,764,517	0.86	119
Total		3,572,828,731	100.00	25,677	1,015,908,812	100	5,330
PMA							
1	Perkebunan	21,269	0.38	2,706	73,528	15.14	1,132
2	Perikanan	21,773	0.39	1,954	11,501	8.71	667
3	Pertambangan	2,276,112	40.32	2,487	2,900,920	56.26	4,280
4	Industri	2,703,784	47.90	13,469	652	0.47	39
5	Perhotelan	575,256	10.19	4,383	61,732	12.70	973
6	Jasa lainnya	46,978	0.83	1,702	40,857	6.72	546
Total		5,645,172	100	26,701	3,089,190	100	7,637

Sumber Data : BKPM Di Propinsi NTB, di olah

Rendahnya investasi di NTB dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor keamanan masih menjadi masalah utama yang menghambat perkembangan investasi di NTB. Di samping itu, masalah lainnya terkait dengan kesulitan para investor dalam menemukan mitra usaha yang profesional di NTB karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam hal manajerial dan kemampuan modal yang terbatas, masih kurang pemahamnya calon investor terhadap kebijakan pemerintah daerah

dan prosedur perizinan investasi di daerah, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sehingga para investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

Pada tahun 2006, diperkirakan nilai investasi yang masuk ke NTB mencapai angka US\$ 10 miliar, yang akan masuk melalui berbagai industri antara lain pembangkit listrik, pertambangan dan bandara. Pembangunan bandara diharapkan dapat segera terealisasi karena bandara merupakan kunci bagi terbukanya iklim investasi yang makin kondusif di NTB.

Beberapa rencana investasi NTB pada tahun 2006 antara lain pembangunan pusat pelelangan mutiara internasional (International Pearl Trade Center - IPTC) di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2006 ini, direncanakan untuk melakukan studi kelayakan program IPTC yang didanai dari APBD NTB. Terkait dengan rencana pembangunan bandara internasional di Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 2006 ini akan dilakukan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan fasilitas pendukung bandara berupa akses jalan dalam lokasi bandara dan pembuatan parit sepanjang 14 km yang melingkari kawasan bandara serta pembuatan batas-batas wilayah bandara dengan tanah milik masyarakat. Guna mengantisipasi penyelesaian masalah keterbatasan energi listrik yang mengakibatkan terjadinya pemadaman aliran listrik di beberapa daerah di NTB, terutama di Lombok Timur, terdapat rencana pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Induk di Pantai Induk, Gerung-Lombok Barat dan Perusahaan Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lombok Timur. Selain itu, ada pula rencana pembangunan kilang minyak di Teluk Ekas, Lombok Timur. Saat ini telah ada 2 investor yang berencana berinvestasi di daerah tersebut. Rencana lainnya adalah membangun pusat perbelanjaan di kawasan Airlangga oleh Pemkot Mataram, menyusul dibangunnya Mataram Square di kawasan tersebut guna mendukung konsep wisata belanja yang tengah dikembangkan di Kota Mataram.

Rencana pembangunan tersebut sepatutnya didukung karena dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan dalam berinvestasi adalah melalui *community development* oleh investor, yang berguna bagi pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat merasa menjadi bagian dari perusahaan dan akan secara aktif turut serta menciptakan situasi yang kondusif. Pihak pemerintah daerah juga perlu memberikan kemudahan-kemudahan, insentif dan fasilitas perizinan yang layak bagi calon investor yang akan masuk. Disamping itu koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, legislatif, pelaku dunia usaha, perbankan dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan guna mempercepat pertumbuhan investasi di NTB.

BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INFLASI REGIONAL

5.1. PROSPEK MAKRO EKONOMI REGIONAL (*ECONOMIC OUTLOOK*)

Pada triwulan II-2006, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha menunjukkan prediksi sebagian besar responden memperkirakan bahwa kegiatan usaha kembali akan mengalami penurunan, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) -1,72% dibandingkan triwulan sebelumnya. Indikasi penurunan yang relatif kecil tersebut hanya terjadi pada beberapa sektor. Adanya ekspektasi negatif terhadap volume permintaan dan menurunnya nilai penjualan/pendapatan di sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa mendorong turunnya kegiatan usaha pada triwulan mendatang. Di samping itu, terjadi pula penurunan produksi pada industri pengolahan dan sektor pertanian. Ekspektasi responden menggambarkan bahwa sektor pertanian akan mengalami kontraksi meskipun hampir seluruh sub sektornya mengindikasikan peningkatan kegiatan usaham, kecuali sub sektor tanaman bahan makanan yang diperkirakan mengalami sedikit gangguan akibat dari bencana banjir yang terjadi di awal dan pertengahan triwulan I-2006.

Sementara itu, gambaran beberapa indikator makro ekonomi yang disurvei menunjukkan bahwa harga jual pada triwulan mendatang diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan, terutama disebabkan naiknya harga bahan baku dan biaya operasional perusahaan. Responden memperkirakan bahwa pada triwulan mendatang masih akan terjadi penyesuaian harga/tarif terutama pada sektor listrik, gas dan air bersih. Di sisi permintaan juga diprediksi mengalami peningkatan, meskipun masih terjadi penurunan pada sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan & komunikasi. Demikian pula nilai penjualan/pendapatan yang diperkirakan akan meningkat, terutama di sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Secara umum, kondisi bisnis dinilai akan semakin membaik. Sedangkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada triwulan mendatang diprediksi akan sedikit meningkat.

Meskipun berdasarkan hasil survei diperkirakan akan terjadi sedikit penurunan di beberapa sektor, namun rencana kegiatan investasi yang cukup besar di NTB diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang mendorong pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2006. Prediksi hasil survei yang cenderung pesimis terhadap pertumbuhan di beberapa sektor diharapkan dapat di-cover jika kegiatan investasi yang direncanakan di NTB dapat terealisasi. Beberapa rencana investasi NTB pada tahun 2006 antara lain pembangunan pusat pelelangan mutiara internasional di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat; pembangunan tahap awal bandara internasional di Kabupaten Lombok Tengah, berupa pembangunan fasilitas pendukung bandara, yaitu akses jalan dalam lokasi bandara dan pembuatan parit dan batas-batas yang melingkari kawasan bandara; pembangunan Perusahaan

Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Induk di Pantai Induk, Gerung-Lombok Barat dan Perusahaan Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lombok Timur; pembangunan kilang minyak di Teluk Ekas, Lombok Timur, pembangunan pusat perbelanjaan, menyusul rencana dibangunnya Mataram Square di kawasan Airlangga – Mataram.

Pada triwulan II-2006, baik secara triwulanan (q-t-q) maupun tahunan (y-o-y), perekonomian NTB diperkirakan mengalami pertumbuhan positif meskipun terdapat kemungkinan terjadi perlambatan pertumbuhan. Secara triwulanan, meskipun terdapat diprediksi terjadinya penurunan kegiatan usaha di beberapa sektor, namun membaiknya faktor *seasonal* pada triwulan ini diperkirakan dapat mendukung peningkatan kegiatan ekonomi di NTB. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap kinerja perekonomian NTB, mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan sebelumnya, diprediksi akan cenderung tumbuh positif pada triwulan mendatang, karena faktor musiman yang sangat dominan terhadap sektor ini, dimana iklim/cuaca pada triwulan II setiap tahunnya cukup baik dan mendukung kegiatan di sektor ini. Seluruh sub sektor di sektor pertanian diperkirakan meningkat pertumbuhannya, baik sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Demikian pula sektor lainnya juga diperkirakan memberikan dorongan pertumbuhan terhadap perekonomian NTB. Sementara itu, bila ditinjau secara tahunan (y-o-y) pertumbuhan ekonomi NTB terutama akan didorong oleh pertumbuhan pada sebagian besar sektor ekonomi. Selain sektor pertanian, sektor lain yang mendominasi struktur perekonomian NTB yaitu sektor pertambangan dan penggalian diharapkan tetap dapat memberikan kontribusi yang tinggi pada triwulan mendatang terkait dengan tahapan produksinya sedang menuju tahapan *maturity*, artinya tingkat produksinya semakin membaik. Namun ekspansi/perluasan areal tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) saat ini sedikit mengalami gangguan keamanan berupa pembakaran kamp PT. NNT, yang mengakibatkan kantor perwakilannya di Kab. Sumbawa dan lokasi eksplorasi di Elang Dodo, Sumbawa ditutup untuk sementara waktu.

Dari sisi penyaluran kredit perbankan di NTB, pertumbuhan penyaluran kredit yang disalurkan kepada sektor riil pada triwulan II-2006, masih dipengaruhi oleh perubahan arah kebijakan pemberian kredit perbankan dari kredit konsumtif kepada kredit modal kerja. Kecenderungan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Faktor-faktor tersebut akan mendorong kinerja perekonomian ke arah pertumbuhan dengan kisaran angka 3-4% (y-o-y) pada triwulan II-2006.

5.2. PROSPEK INFLASI

Inflasi Kota Mataram pada triwulan mendatang dapat diprediksi dari arah kecenderungan pergerakan angka inflasi yang trendnya terus menunjukkan penurunan pada awal tahun 2006. Tekanan inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan tidak akan terlalu tinggi seperti tahun yang

terjadi menjelang akhir tahun 2005, yang didorong terutama oleh inflasi *administered price* sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan kenaikan harga BBM yang cukup tinggi sehingga mendorong pergerakan harga barang-barang secara umum meningkat sangat signifikan dan menurunkan daya beli masyarakat. Adanya isu rencana kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah pada tahun 2006 tampaknya belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap ekspektasi kenaikan harga barang. Secara umum, di daerah NTB tekanan inflasi (y-t-d) diperkirakan akan menurun atau sedikit meningkat apabila tidak terjadi kegagalan panen dan banjir, mengingat karakteristik daerah yang sangat dipengaruhi faktor musiman dan pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor yang tertinggi kontribusinya. Di samping itu, kondisi geografis wilayah NTB yang terpisah oleh lautan dari daerah lainnya, serta masih banyaknya kebutuhan barang masyarakat NTB yang didatangkan dari luar daerah, menjadi penyebab kenaikan biaya-biaya akibat mahal biaya transportasi.

Laju inflasi pada awal triwulan II-2006 diperkirakan akan mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Perlambatan yang terjadi tersebut diperkirakan karena efek *shock* terhadap kenaikan harga barang yang cukup tinggi pada akhir tahun 2005 tidak berlangsung dalam waktu yang panjang, sehingga pola pergerakan harga dapat kembali pada kondisi normalnya, meskipun masih terjadi sedikit kenaikan. Dengan demikian, secara kumulatif (y-t-d) angka inflasi Kota Mataram pada triwulan mendatang diprediksi berada pada kisaran 3% ($\pm 1\%$). Sedangkan secara tahunan (y-o-y), yang membandingkan angka inflasi triwulan berjalan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, angka inflasi masih dominan dipengaruhi oleh inflasi *administered price* karena kebijakan kenaikan harga BBM, sehingga inflasi y-o-y masih berada dalam kisaran angka yang cukup tinggi sebesar 15% ($\pm 1\%$). Inflasi yang cukup tinggi masih akan terjadi pada beberapa kelompok, terutama kelompok transportasi dan komunikasi, kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan angka inflasi yang lebih rendah dari triwulan I-2006. Sementara itu, secara triwulanan (q-t-q), inflasi Kota Mataram sangat dipengaruhi oleh faktor *seasonal* sesuai dengan karakteristik geografis wilayah NTB. Dengan asumsi faktor musiman bersifat normal dan tidak ada faktor eksternal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian NTB, serta prediksi iklim/cuaca yang cukup baik dan mendukung kegiatan di sektor pertanian sebagai basis perekonomian NTB, inflasi q-t-q Kota Mataram akan berada pada kisaran yang rendah yaitu 2% ($\pm 1\%$).

Sebagai salah satu sasaran operasional yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang akan berpengaruh terhadap angka inflasi, pada triwulan II-2006 BI rate diperkirakan masih tetap dipertahankan pada angka yang relatif tinggi seperti triwulan sebelumnya, yang berada pada level 12,50%, hingga triwulan berikutnya.